

PT. KB BUKOPIN FINANCE

HEAD OFFICE

Jl. Melawai Raya No. 66, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - 12160

Telp : (021) 2793 6558 / 1500 209

 E-Mail : bufincare@bukopinfinance.co.id

 Website : www.bukopinfinance.co.id

MEMPERKUAT
KUALITAS PEMBIAYAAN
MENGAKSELERASI
PERTUMBUHAN **BERKELANJUTAN**



Kualitas
Terjaga



Pertumbuhan
Berkelanjutan



Nilai Bagi
Masa Depan

DAFTAR Isi





Daftar Isi..... I

Gambaran Umum

1. Ikhtisar Data Keuangan	1
1.1. Trend Aset	2
1.2. Ikhtisar Keuangan dan Operasional	3
1.3. Trend Keuangan	4
2. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	6
2.1. Laporan Dewan Komisaris	4
2.2. Laporan Direktur	13
3. Profil Perusahaan	20
3.1. Data Perusahaan	21
3.2. Sekilas KB Bukopin Finance	21
3.3. Bidang Usaha	22
3.4. Tujuan dan Strategi Perusahaan	23
3.5. Visi dan Misi	25
3.6. Nilai Perusahaan	25
3.7. Identitas Perusahaan	25
3.8. Jejak Langkah KB Bukopin Finance	26
3.9. Struktur Organisasi KB Bukopin Finance	27
3.10. Dewan Komisaris	30
3.11. Direksi	34
3.12. Dewan Pengawas Syariah	40
3.13. Komposisi Pemegang Saham	41
3.14. Lokasi Kantor Pelayanan	41
4. Analisa dan Pembahasan Manajemen	42
4.1. Analisa dan Pembahasan Manajemen	43
4.2. Kondisi Perekonomian Dunia	43
4.3. Perekonomian Indonesia	45
4.4. Kondisi Industri Perusahaan Pembiayaan	46
4.5. Posisi Perseroan dalam Peers Group	47
4.6. Tinjauan Operasional	47
4.7. Progres dan Strategi	50

5. Unit Pendukung	52
5.1. Teknologi dan Informasi.....	53
5.2. Sumber Daya Manusia	54
5.3. Komposisi Karyawan Berdasarkan Departemen.....	55
5.4. Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan.....	55
6. Tata Kelola Perusahaan.....	56
6.1. Implementasi GCG Didasarkan atas 5 Prinsip Dasar	57
6.2. Tujuan Implementasi GCG	58
6.3. Dasar Acuan Implementasi GCG	58
6.4. Assessment Implementasi GCG	59
6.5. Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan	60
6.6. Struktur dan Mekanisme GCG	61
6.7. Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan.....	62
6.8. Komite Dibawah Dewan Komisaris	64
6.9. Literasi dan Inklusi Keuangan	64
6.10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	65
6.11. Penghargaan	65
6.12. Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025	66

Gambaran Umum

Perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2025 menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan, menjadi dasar yang kuat bagi kinerja ekonomi ke depan. Perekonomian Indonesia di akhir tahun 2025 tetap resilien, yang didukung oleh aktivitas manufaktur yang ekspansif, laju inflasi yang terkendali, serta neraca perdagangan yang tercatat surplus disetiap bulan, sehingga akan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2026.

Sektor manufaktur Indonesia mencapai kinerja positif di akhir tahun 2025. PMI Manufaktur Desember 2025 tercatat sebesar 51,2; angka yang ekspansif dalam kurun waktu lima bulan berturut-turut. Kinerja positif ini didukung oleh tingginya permintaan domestik, meningkatnya serapan tenaga kerja, serta aktivitas pembelian bahan baku yang naik. Optimisme pelaku ekonomi juga mengalami penguatan dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan akan keyakinan terhadap prospek sektor manufaktur ke depan. Secara global, aktivitas manufaktur negara mitra Indonesia secara umum berada di zona ekspansif seperti Amerika Serikat (51,8), China (50,1), dan India (55,7). Di kawasan ASEAN, PMI manufaktur Thailand (57,4) dan Malaysia (50,1) juga meningkat, memberikan sinyal positif bagi permintaan ekspor Indonesia.

Pada tahun 2025, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Peningkatan ekspor terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 10,41 %, mencerminkan meningkatnya nilai tambah ekspor nasional. Sementara itu, impor pada periode yang sama tercatat naik 2,03 % (ctc). Penyumbang utama peningkatan impor adalah dari sisi impor Barang Modal dengan kontribusi 3,28%, sejalan dengan aktivitas produksi yang ekspansif. Ke depan, dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama akan terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai dinamika global.

Inflasi 2025 terkendali di 2,92% (yoy), dipengaruhi kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai dan beras, namun inflasi inti stabil di 2,38% (yoy). Pemerintah dapat menjaga inflasi dengan melakukan intervensi harga dan pasokan pangan.

Indikator ekonomi domestik positif di akhir 2025, dengan Indeks Keyakinan Konsumen menguat dan penjualan listrik meningkat. Pemerintah terus fokus dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi selalu inklusif.

Dari sektor otomotif, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil nasional sepanjang 2025 mencapai 803.687 unit penjualan dari pabrik ke dealer (whole sales). Angka ini turun 7,2 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 865.723 unit. Penjualan dari dealer langsung ke konsumen akhir (retail) sepanjang 2025 tercatat 833.692 unit atau turun 6,3 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 889.680 unit. Penurunan ini mencerminkan melemahnya permintaan kendaraan baru sepanjang tahun 2025.

Kinerja perusahaan pembiayaan di akhir tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun cenderung melambat, dengan piutang tumbuh melambat akibat penurunan daya beli masyarakat. Pembiayaan baru secara industri masih menunjukkan angka positif, namun lajunya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sempat terjadi penurunan pertumbuhan bulanan yang signifikan. Secara keseluruhan, industri multifinance pada 2025 lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit untuk menjaga risiko di tengah melemahnya daya beli.

Di tahun 2025, Perseroan tidak hanya berfokus dalam penyaluran pembiayaan pada segmen korporasi (Fleet), namun juga telah mulai melakukan penyaluran pada segmen retail secara selektif mengingat kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

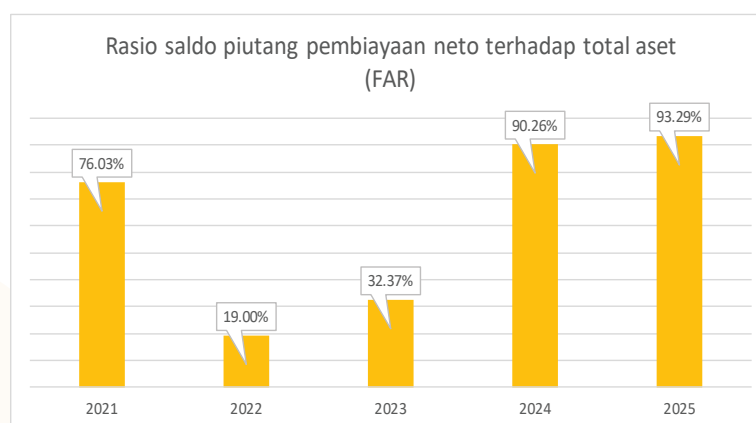
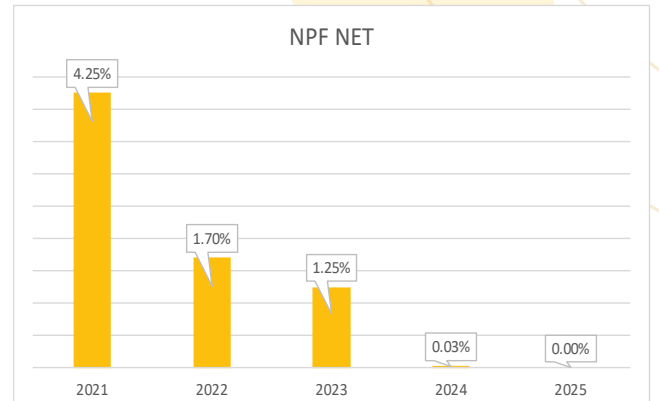
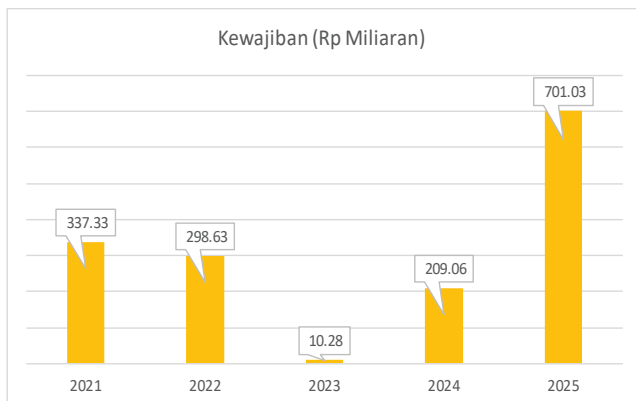
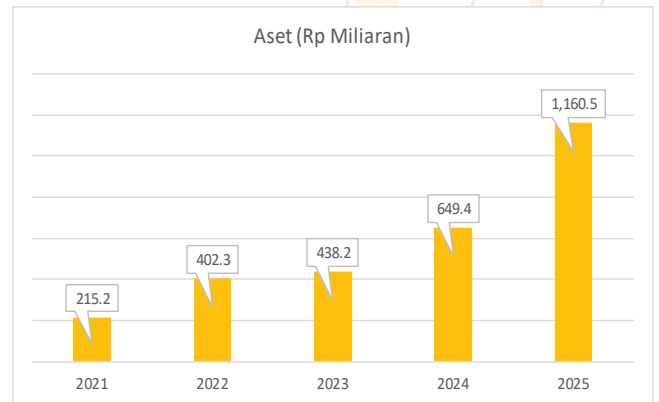
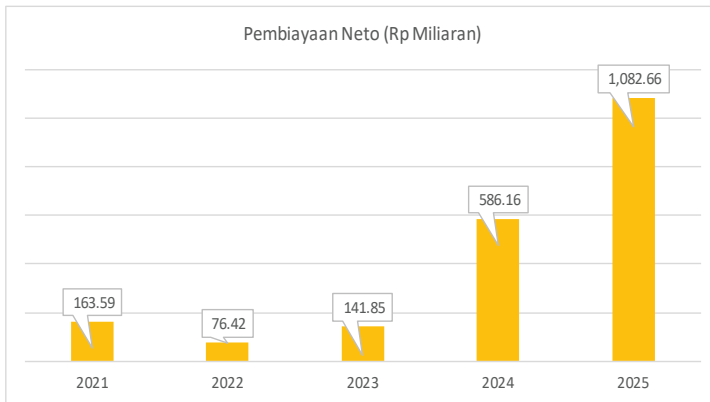
01

IKHTISAR DATA Keuangan Penting



1. Ikhtisar Data Keuangan

1.1. Trend Aset



1.2. Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Neraca

	2021	2022	2023	2024	2025
Aset	215,169,190,088	402,309,590,382	438,201,763,377	649,400,325,543	1,160,496,483,223
Pembiayaan Neto	163,585,493,725	76,424,999,941	141,853,841,934	586,157,071,034	1,082,662,512,499
Kewajiban	337,329,266,769	298,628,543,037	10,276,637,216	209,060,673,187	701,025,392,859
Ekuitas	- 122,160,076,680	103,681,047,345	427,925,126,161	440,339,652,356	459,471,090,364
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	215,169,190,088	402,309,590,382	438,201,763,377	649,400,325,543	1,160,496,483,223

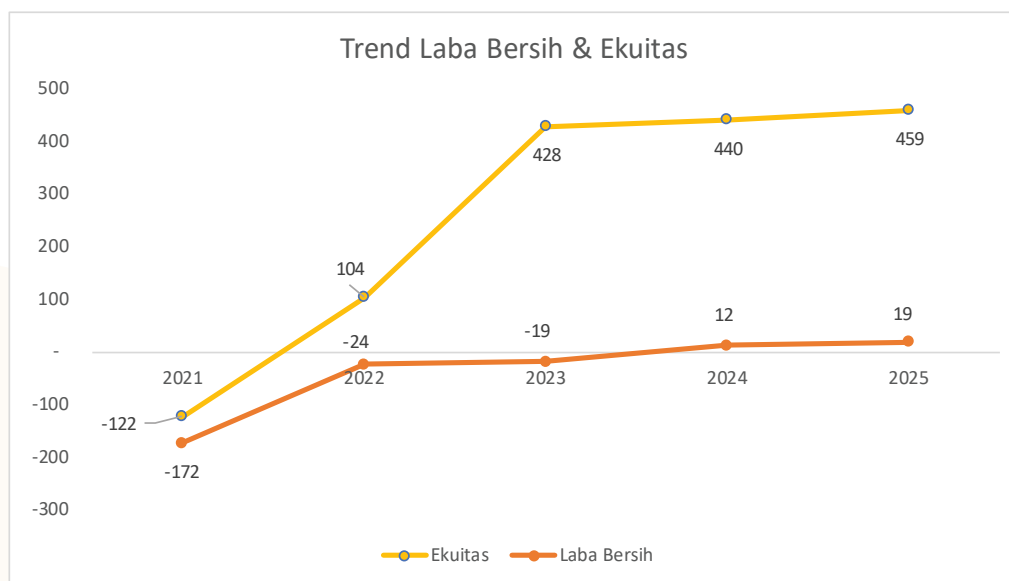
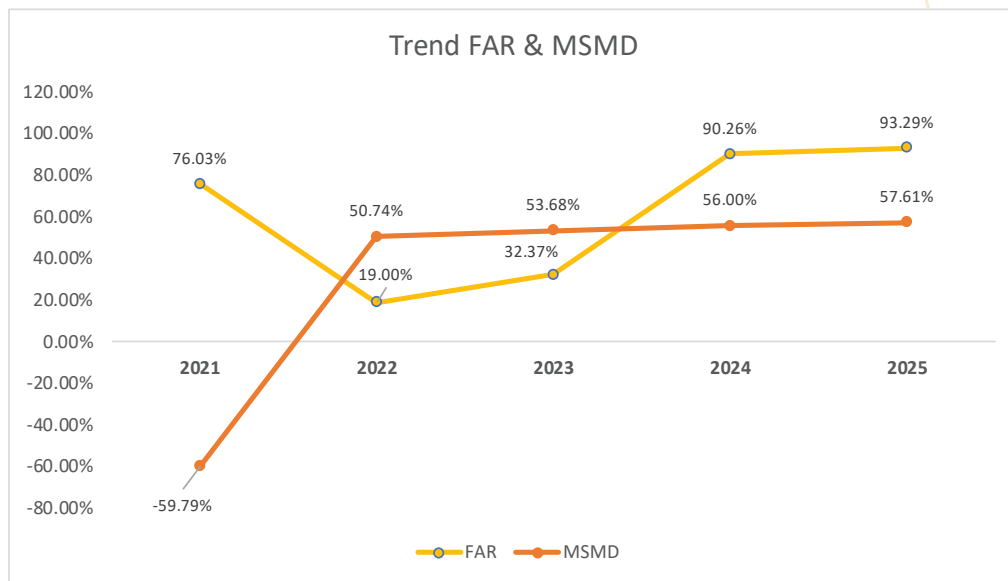
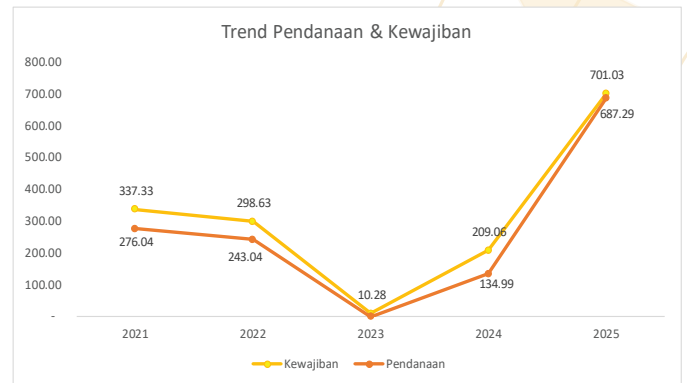
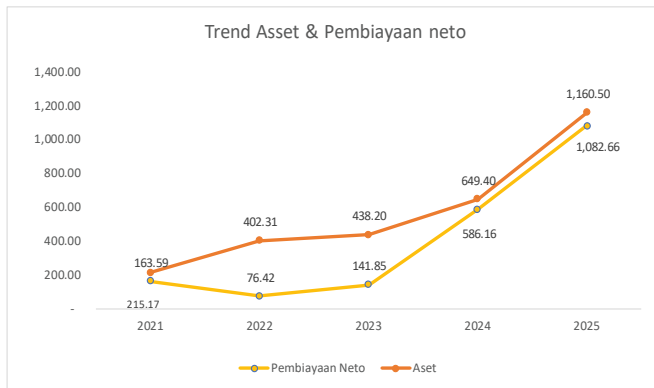
Ikhtisar Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya

	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan					
Pendapatan Pembiayaan	67,287,777,141	34,037,807,246	12,339,121,414	33,981,753,521	83,462,704,194
Denda dan Penalti	6,974,411,512	9,216,868,582	4,189,034,457	3,960,687,175	3,693,395,202
Penghasilan Bunga	172,240,271	480,408,836	3,807,723,510	7,187,038,570	2,234,191,086
Margin Murabahah	2,247,938,742	2,250,389,981	587,676,405	277,870,775	2,543,290,130
Pendapatan Jasa Channeling	2,516,741,022	409,810,521	430,913,076	8,835,246	-
Lain-lain	2,747,392,859	4,999,188,242	3,914,915,099	3,781,209,696	7,510,166,901
Total Pendapatan	81,946,501,547	51,394,473,408	25,269,383,961	49,197,394,983	99,443,747,513
Beban					
Beban Keuangan	53,078,682,271	19,115,054,313	27,118,191,050	1,060,942,698	35,604,161,915
Beban Gaji dan Tunjangan	34,182,666,978	27,221,260,422	21,105,079,646	25,340,293,878	31,576,397,798
Beban Umum dan Administrasi	17,345,133,631	14,337,738,536	11,550,887,719	13,695,722,389	14,274,209,593
Cadangan (Pemulihan) Kerugian penurunan Nilai	148,534,669,414	14,518,676,603	15,988,834,161	3,316,506,748	1,434,480,197
Lain-lain	970,390,015	634,809,995	63,617	18,977	22,853,704
Total Beban	254,111,542,309	75,827,539,869	43,785,387,871	36,780,433,240	80,043,142,813
Laba Sebelum pajak	- 172,165,040,762	- 24,433,066,461	- 18,516,003,910	12,416,961,743	19,400,604,700
Beban Pajak Penghasilan	- 578,974,279	32,824,661	55,039,747	39,010,741	162,262,380
Laba Tahun Berjalan	- 172,744,015,041	- 24,400,241,800	- 18,571,043,657	12,455,972,484	19,238,342,320
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	340,558,101	241,365,826	84,877,527	41,446,289	106,904,312
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	- 172,403,456,940	- 24,158,875,974	- 18,655,921,184	12,414,526,195	19,131,438,008

Rasio Keuangan berdasarkan POJK

	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset (FAR)	76.03%	19.00%	32.37%	90.26%	93.29%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	60.59%	25.32%	63.46%	91.16%	90.75%
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	4.25%	1.70%	1.25%	0.00%	0.00%
Rasio kecukupan Modal	-9.92%	-112.08%	337.58%	143.08%	80.08%
Gearing Ratio	(2.67X)	2.83X	-	0.30X	1.5X
Minimum Ekuitas	- 122,160,076,681	103,681,047,345	427,925,126,161	440,339,652,356	459,471,090,364
Rasio Ekuitas terhadap Modal disetor	-59.79%	50.74%	53.68%	55.23%	57.63%

1.3. Trend Keuangan



02

LAPORAN DEWAN Komisaris dan Direksi







2. Laporan Dewan Komisaris & Direksi

2.1. Laporan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Kami sampaikan laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan dan pemberian nasihat/rekomendasi atas jalannya kepengurusan Perseroan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan PT KB Bukopin Finance. Kami selaku Dewan Komisaris senantiasa berupaya memastikan keseimbangan *check and balances* melalui pemantauan kecukupan pengawasan dan efektivitas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)*.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2025 meliputi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hasil pemeriksaan OJK, hasil pemeriksaan Audit (Audit Internal dan Audit Eksternal/Akuntan Publik), Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, efektivitas sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyadari bahwa kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan industri, arahan/kebijakan perusahaan induk, regulasi/peraturan OJK, serta kebijakan Pemerintah RI tahun 2025.

Laporan ini secara garis besar terdiri dari Kegiatan Organisasi dan Bidang Usaha dan Keuangan.

2.1.1. Kegiatan Organisasi

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan PT KB Bukopin Finance, yaitu 3 (tiga) orang Direksi/Direktur dan 2 (dua) orang Dewan Komisaris. Pada tanggal 30 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang memutuskan untuk mengangkat kembali Sdr. Sunaryono sebagai Komisaris Utama Independen, Sdr. Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama dan Sdr. Moch Bukhori Muslim sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Secara berkala Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat-rapat selama tahun 2025 yaitu:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024
 2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 30 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pengurus Perseroan
- b. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 kali
- c. Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali
- d. Rapat Direksi sebanyak 12 kali
- e. Rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 6 kali
- f. Rapat Komite-komite sebanyak 14 kali

Rapat-rapat telah dilengkapi dengan absensi dan notulen rapat, secara umum hasil/keputusan rapat telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab. Hasil Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal KAP Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) dan pemeriksaan OJK atau surat OJK secara umum sudah ditindaklanjuti. Pada tahun 2025 dilakukan pembukaan/relokasi Grha Bandung, Surabaya, Bekasi, Palembang dan Tangerang.



2.1.2. Bidang Usaha Keuangan

Pada tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi PT KB Bukopin Finance, karena kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya membaik akibat perang Israel dan Palestina dan beberapa negara tetangga, perang Rusia dan Ukraina.

Status pengawasan PT KB Bukopin Finance mulai tanggal 12 Februari 2025 telah berubah dari pengawasan intensif ke pengawasan normal. Status pengawasan normal memungkinkan KB Bukopin Finance melakukan aktivitas bisnis secara leluasa.

Pembiayaan baru dapat direalisasikan pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp999.8 miliar dari target Rp 728 miliar, sehingga pendapatan bunga pada tahun 2025 naik signifikan (113%). Dengan kredit/pembiayaan baru tersebut, terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada kondisi keuangan, kualitas pembiayaan (NPF) dan beberapa rasio penting lainnya.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) dan menyatakan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disajikan secara wajar, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Desember 2025

Neraca	2025 (Audited)	2024 (Audited)	YOY	Anggaran 2025	Pencapaian
Aset	1,160,496	649,410	79%	1,203,435	96%
Portofolio Pembiayaan Nett	1,082,662	586,157	85%	1,181,159	92%
Konvensional	1,033,352	577,264	79%	1,045,250	99%
Syariah	41,310	8,893	398%	136,219	33%
Kewajiban	701,025	209,081	236%	745,454	94%
Ekuitas	459,471	440,340	4%	457,981	100%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1,160,496	649,410	79%	1,203,435	96%
CKPN	(33,589)	(29,874)	12%	-18,767	179%
LAPORAN LABA RUGI					
Pendapatan Piutang pembiayaan	91,233	45,416	101%	106,074	87%
Pendapatan lainnya	7,851	3,781	108%	7,807	101%
Jumlah pendapatan	99,087	49,197	101%	113,802	88%
Beban	80,386	36,780	119%	94,184	85%
Laba sebelum pajak penghasilan	19,400	12,417	56%	19,717	98%
Beban pajak penghasilan	-162	39	-515%	0	-
laba bersih tahun berjalan	19,238	12,456	54%	19,717	98%
Total rugi komprehensif	19,131	12,415	54%	19,717	97%
Liabilitas/Ekuitas	153%	47%	221%	163%	94%

Berdasarkan pencapaian di atas dan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dan pembiayaan baru yang cukup besar, Dewan Komisaris, Direksi dan jajarannya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan dengan baik. Terbukti dengan telah terjadi banyak perubahan/perbaikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan menjadi sangat sehat dan pada tanggal 12 Februari 2025 status Dalam Pengawasan Intensif dicabut OJK dan menjadi Dalam Pengawasan Normal.

2.1.3. Kesimpulan

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Syariah setiap bulan telah melakukan evaluasi kinerja usaha tindak lanjut hasil rapat sebelumnya selama tahun 2025 dengan cara mengadakan rapat secara tatap muka atau zoom guna membahas laporan direksi tentang operasional/jalannya organisasi/Perusahaan tahun 2025. Dewan Komisaris memberikan arahan dan atau saran-saran untuk perbaikan/koreksi yang dinilai perlu.

2. Secara umum kinerja usaha tahun 2025 terjadi perbaikan signifikan, yaitu ROE, ROA, NPF, FAR, GR dan kenaikan signifikan pada Aset 79%, pembiayaan Netto 85% dan Laba Bersih 54%.
3. Tingkat Kesehatan dapat dipertahankan pada tingkat sangat sehat dan peringkat risiko tetap di peringkat 2 (PK-2) dengan perbaikan beberapa kategori risiko dari PK-3 menjadi PK-2.
4. Temuan/hasil pemeriksaan Auditor dan OJK secara umum telah ditindaklanjuti/diselesaikan, ada yang masih proses penyempurnaan sistem informasi teknologi yang terintegrasi, kebijakan terkait manajemen risiko seperti penetapan proporsi per sektor industri dan maksimal plafon debitur atau grup debitur.
5. Penanganan pembiayaan bermasalah berjalan dengan baik dan hasil penyelesaian cukup memadai, kecenderungan meningkatnya kerugian setiap penjualan benda bergerak (kendaraan dan alat berat) akibat kondisinya yang pada umumnya rusak, STNK sudah mati dan harga kendaraan bekas trendnya memang menurun, serta keterlambatan persetujuan harga dasar atau biaya-biaya untuk penyelesaian biaya penarikan kendaraan/proses hukum kredit Joint Financing (JF).
6. Kasus kecurangan (fraud) dan keluhan nasabah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
7. Pembiayaan baru telah sesuai rencana, meskipun masih didominasi pembiayaan fleet dengan margin makin menipis karena sumber dana dari pinjaman bank untuk pembiayaan retail mengalami kenaikan.
8. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui litigasi atau kasus hukum berjalan lambat akibat birokrasi, ada kasus hukum melibatkan pihak lain (selain debitur) dan kendala persetujuan biaya untuk JF (pembiayaan bersama dengan KB Bank).
9. Pelaksanaan Tata Kelola sudah berjalan namun belum menyeluruh dan maksimal, terlihat dari rapat koordinasi dan evaluasi kinerja bulanan rata-rata baru terlaksana setelah minggu ke-2, karena menunggu selesainya laporan keuangan, bisnis, penagihan/collection dan aset manajemen.
10. Opini kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2.1.4 Saran/Nasehat Dewan Komisaris

1. Pencapaian kinerja di tahun 2025 harus dipertahankan dan diperkuat untuk kualitas dan keamanannya, sehingga menjadi penopang untuk pencapaian yang lebih baik di tahun 2026.
2. Pembiayaan baru harus lebih diarahkan pada pembiayaan yang berisiko rendah, peningkatan pembiayaan retail/UKM dan bisnis syariah dengan mengakomodasi arahan Pengawas Syariah.
3. Dalam penetapan dan revisi Rencana Bisnis Tahun 2026 hendaknya selalu dalam kerangka kesehatan Perusahaan Sangat Sehat, yaitu untuk Tata Kelola, Profil Risiko, Rentabilitas dan Permodalan.
4. Target hasil kerja setiap individu Karyawan dan unit kerja harus jelas, cukup menantang dan terukur, target harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaiannya.
5. Harus dipastikan semua temuan atau perhatian Auditor dan OJK sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada kesempatan pertama (tidak ditunda-tunda) dan tidak menjadi temuan berulang, termasuk saran/rekomendasi Dewan Komisaris.

6. Guna antisipasi dan penetapan/penyesuaian strategi, Direksi dan jajarannya perlu mengidentifikasi dan menginventarisir issue penting, seperti perubahan kondisi eksternal, kepatuhan dan regulasi, teknologi dan infrastruktur, kegagalan dalam mitigasi risiko, permodalan dan sumber dana untuk pembiayaan.
7. Komunikasi dan koordinasi dengan KB Bank agar terus diintensifkan guna lebih mempercepat penyelesaian pembiayaan bersama (JF) yang bermasalah, terutama penjualan kendaraan/alat berat, memperoleh sumber dana untuk pembiayaan baru serta sinergi bisnis/pelayanan lainnya.
8. Kondisi internal sering cepat berubah, maka harus secara cepat dan berkala melakukan evaluasi/koreksi terhadap rencana kerja/bisnis yang terdampak perubahan.
9. Pelaksanaan Tata Kelola sudah berjalan, namun perlu lebih menyeluruh dan maksimal terlihat dari pelaksanaan rapat evaluasi kinerja bulanan, baru bisa dilakukan setelah minggu kedua, karena menunggu selesainya laporan keuangan, aset manajemen, penagihan/collection dan bisnis.
10. Pentingnya penentuan skala prioritas berdasarkan urgensinya dan strategi yang tepat atas penggunaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.
11. Direksi dan para Supervisor harus secara maksimal melakukan upaya pencegahan terjadinya fraud antara lain dengan sosialisasi anti fraud, peningkatan disiplin dan pengawasan, tidak meremehkan/memaklumi penyimpangan-penyimpangan meskipun tidak material, *reward* dan *punishment* yang tegas tanpa pandang bulu.
12. Keteladanan manajemen puncak menjadi kunci keberhasilan dalam terciptanya tata kelola yang baik, budaya patuh, budaya risiko dan pencapaian target kerja dan rencana bisnis tahun 2026.

2.1.5 Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki struktur dan budaya Perseroan berdasarkan *best practice* dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*. Dewan Komisaris menilai Perseroan telah secara efektif menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("*Good Corporate Governance*" atau "GCG") dalam menjalankan setiap fungsi dalam tubuh Perseroan, serta mengimplementasikan metode penilaian sendiri demi terciptanya fondasi sumber daya manusia yang tangguh.

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("*Good Corporate Governance*" atau "GCG") dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Perseroan telah membentuk struktur GCG yang memadai dimana Perseroan mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) organ yakni organ utama dan organ penunjang. Organ utama merujuk pada ketentuan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan, organ penunjang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Melalui komite-komite ini, Dewan Komisaris turut serta dalam memantau dan mengawasi kinerja Perseroan dalam meminimalisir risiko usaha dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk di antaranya pengawasan atas penerapan strategi Perseroan melalui berbagai forum antara lain Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dalam penerapan GCG, Perseroan sudah memiliki fungsi kepatuhan sebagai unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dengan melakukan penyediaan, pengkinian dan mensosialisasikan ketentuan OJK yang berlaku serta melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring pengendalian risiko kepatuhan.

Perseroan juga sudah memiliki kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencakup jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan, dan jaminan kerahasiaan pelapor, serta penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang tepat. Perseroan menyiapkan tata cara Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk mendeteksi adanya pelanggaran, yang mana sistem ini diawasi dan dikelola oleh Unit Anti Fraud.

Secara berkala, Perseroan terus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6. Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang seluruhnya diketuai oleh Komisaris Utama Independen.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan Baik. Selama tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Komite Pemantau Risiko mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan risiko. Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama dengan Dewan Komisaris;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi atas Laporan *Self Assessment*;
6. Penerapan Tata Kelola;
7. Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko secara periodik.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat dan menjalankan tugasnya, antara lain:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi memenuhi syarat;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melakukan kajian terhadap tunjangan bagi Pengurus serta Karyawan.

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2025 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup efektif yang dilihat dari penilaian pencapaian kinerja masing-masing komite.

2.1.7. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tahun 2025 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Juni 2025, yaitu mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Sunaryono sebagai Komisaris Utama Independen serta mengesahkan pengunduran diri Sdr. Agustinus Iwan Christanto sebagai Komisaris, dan mengangkat Sdr. Ridwan W Julianto sebagai Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	Lama	Baru
Komisaris Utama Independen	Sunaryono	Sunaryono
Komisaris	Agustinus Iwan Christanto	Ridwan W Julianto



2.1.8. Apresiasi

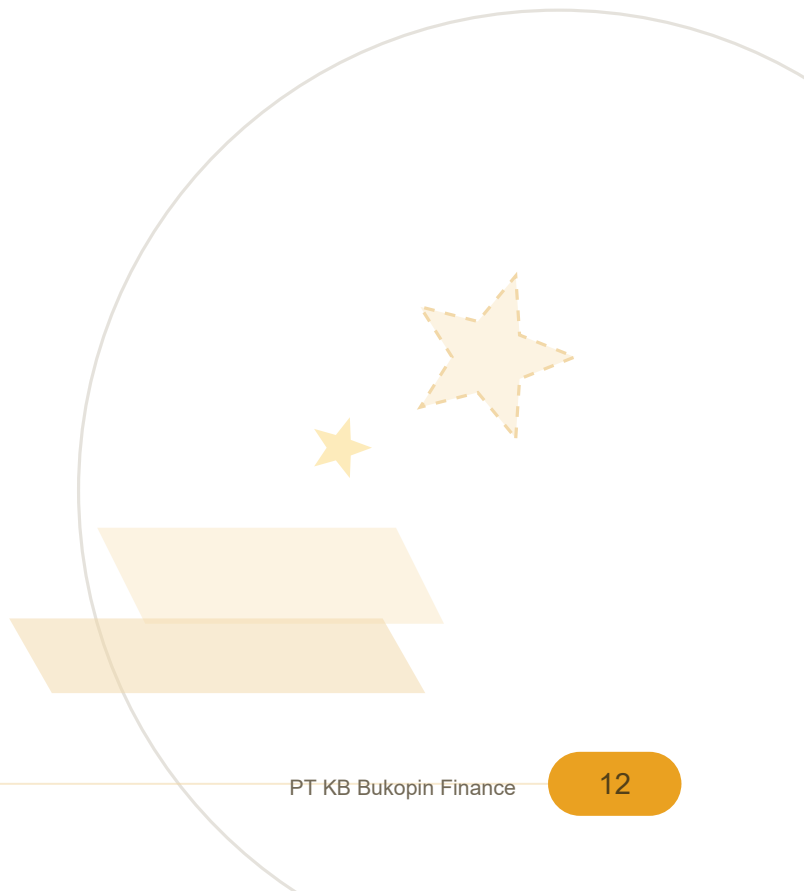
Perseroan telah berhasil memperbaiki kinerja perseroan ditengah tantangan ekonomi dan persaingan bisnis pembiayaan yang cukup tajam. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen Perseroan serta seluruh Karyawan Perseroan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perseroan, sehingga Perseroan menjadi sangat sehat sesuai Ketentuan OJK.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tak lupa, atas nama Dewan Komisaris, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Debitur dan Mitra Kerja Perseroan. Semoga kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran Perseroan untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya, mengingat tantangan bisnis kedepan masih cukup berat.

Dewan Komisaris





2.2. Laporan Direktur

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang berkat rahmat dan ridho Nya sehingga PT KB Bukopin Finance dapat melewati tahun 2025 ini dengan selamat dan dapat menghasilkan perubahan positif bagi perseroan.

Perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan perseroan untuk tahun buku 2025. Berikut ini Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material.

2.2.1. Dinamika Perekonomian 2025

Kondisi politik global tahun 2025 penuh ketidakpastian, dengan gejolak ekonomi dan geopolitik yang mempengaruhi stabilitas Indonesia. Perang dagang dan proteksionisme negara besar berdampak pada ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti CPO, batu bara, dan nikel. Harga pangan dan energi global juga meningkat, memicu inflasi dan keresahan masyarakat.

Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial, dan subsidi upah. Diplomasi ekonomi juga ditingkatkan, dengan perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa dan penurunan tarif dengan Amerika Serikat. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Perekonomian Indonesia tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak ekonomi global, dengan pertumbuhan 5,11% dan inflasi terkendali di 2,72% (yoy) pada November 2025, dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$. Nilai tukar Rupiah relatif stabil di Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025, didukung komitmen Bank Indonesia. Sektor industri manufaktur dan jasa tumbuh positif, dengan PMI Manufaktur mencapai 53,3 pada November 2025. Pemerintah fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan investasi infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Stabilitas sistem keuangan terjaga dengan permodalan perbankan kuat dan risiko kredit bermasalah rendah. Digitalisasi sistem pembayaran meningkat pesat, menopang ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Kondisi ini menciptakan peluang bagi sektor pembiayaan, terutama dalam mendukung ekspansi industri dan konsumsi. Stabilitas ekonomi makro dan digitalisasi keuangan diharapkan mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan inklusif di tahun 2026.

Penjualan mobil baru di Indonesia tahun 2025 mengalami penurunan. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales mencapai 803.687 unit, turun 7,2% dibandingkan tahun 2024. Penjualan retail juga menurun 6,3% menjadi 833.692 unit. Penurunan penjualan mobil baru ini berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama pada sektor industri otomotif dan pembiayaan. Pertumbuhan kredit perusahaan pembiayaan melambat pada 2025, lebih rendah dibandingkan target OJK.

2.2.2. Inisiatif Strategi

Pada tahun 2025, Perusahaan terus melanjutkan kinerja pembiayaan korporasi (Fleet) dengan lebih ekspansif dan maksimal serta melakukan penetrasi pada pembiayaan retail khususnya pembiayaan berbasis kendaraan dengan menyasar nasabah-nasabah yang berkualitas.

Segmen Pembiayaan Fleet pada tahun 2025 masih dominan pada 3 sektor industri yaitu logistik dan transportasi, manufaktur, dan jasa kontraktor. Pembiayaan Fleet di sektor logistik dan transportasi di tahun 2025 mencapai Rp219,91 miliar, diikuti oleh pembiayaan di sektor jasa kontraktor sebesar Rp197,92 miliar, dan sektor manufaktur sebesar Rp142,41 miliar.

Pembiayaan Retail pada tahun 2025 sudah mulai berkontribusi dalam pertumbuhan portofolio pembiayaan dan aset perusahaan. Tercatat selama tahun 2025 Perusahaan berhasil membukukan pembiayaan retail baru sebesar Rp161,69 miliar atau sebesar 16% dari total pembiayaan baru selama tahun 2025. Pembiayaan retail yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2025 yaitu pembiayaan dealer (Dealer Financing), pembiayaan mobil baru dan mobil bekas, pembiayaan alat kesehatan, dan pembiayaan sepeda motor listrik. Perusahaan menerapkan strategi produk yang variatif agar Perusahaan tidak hanya terfokus pada satu produk tertentu sehingga potensi pertumbuhan pembiayaan menjadi lebih besar.

Untuk pembiayaan retail tersebut, Perusahaan telah merekrut karyawan yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki jaringan yang luas dengan dealer mobil baru dan showroom mobil bekas yang ada, sehingga penetrasi pada pembiayaan retail dapat dengan mudah dilakukan.

Pengembangan infrastruktur dari sisi analisa kredit dilakukan Perusahaan dengan mengembangkan scoring engine yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses analisa sehingga Perusahaan kedepannya dapat bersaing dengan kompetitor yang telah terlebih dahulu bermain pada segmen pembiayaan retail.

Dari sisi pendanaan, Perusahaan telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa bank rekanan dengan memberikan fasilitas pinjaman. Total fasilitas pinjaman yang diaktivasi oleh Perusahaan selama tahun 2025 mencapai Rp809 miliar.

Komitmen Perusahaan dalam mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan diimplementasikan dengan tetap berfokus dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah berkualitas yang memiliki track record pembiayaan yang baik serta didukung oleh mitigasi risiko dan analisa pembiayaan yang terus disempurnakan. Penanganan pembiayaan bermasalah oleh tim penagihan internal terus dioptimalkan sehingga dapat berkontribusi dalam pemulihan piutang bermasalah perusahaan. Di akhir tahun 2025 rasio Non-Performing Finance (NPF) Bruto Perusahaan tercatat sebesar 1,91% dan dengan pencadangan yang telah dilakukan, NPF Net Perusahaan adalah sebesar 0,00%.

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia juga dilakukan Perusahaan, baik itu melalui in-house training maupun seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh pihak profesional.

2.2.3. Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, Perusahaan membukukan pembiayaan baru senilai Rp999,85 miliar, yang terdiri dari pembiayaan fleet senilai Rp838,16 miliar dan pembiayaan retail senilai Rp161,69 miliar. Penyaluran pembiayaan baru tersebut berhasil meningkatkan portofolio piutang pembiayaan Perusahaan dari yang hanya senilai Rp586,16 miliar pada tahun 2024 menjadi senilai Rp1.082,66 miliar diakhir tahun 2025.

Aset Perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada 2024 sebesar Rp649,4 miliar, menjadi sebesar Rp1.160,5 miliar, mengalami kenaikan sebesar 78,70%

Pada posisi Desember 2025, Financing to Asset Ratio Perusahaan mencapai 93,29%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 90,26%.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan Perusahaan selama 2025 tidak terlepas dari dukungan beberapa rekanan bank nasional yang memberikan fasilitas pinjaman bagi Perusahaan. Terdapat senilai Rp809,1 miliar fasilitas pinjaman dari perbankan yang ditarik Perusahaan selama tahun 2025. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan Liabilitas Perusahaan dari senilai Rp209,06 miliar pada akhir tahun 2024, menjadi senilai Rp701,03 miliar pada akhir 2025.

Ekuitas Perusahaan pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan dari Rp440,34 miliar pada akhir tahun 2024, menjadi Rp459,47 miliar ditahun 2025. Kenaikan ini merupakan hasil dari pembentukan laba di tahun 2025 sebesar Rp19,13 miliar.

Pertumbuhan portofolio pembiayaan Perusahaan berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan Perusahaan. Selama tahun 2025, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp99,79 miliar meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp49,19 miliar.

Pada sisi beban, di tahun 2025 Perusahaan membukukan beban senilai Rp80,39 miliar, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp36,78 miliar.

Pada tahun 2025, Perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp19,13 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp12,41 miliar.

2.2.4. Penilaian Kinerja Komite dibawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite yang berada dibawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Produk dan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Kedisiplinan serta Komite Pengarah Teknologi Informasi. Sepanjang 2025, Komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberikan masukan-masukan kepada Direksi terkait lingkup tugasnya masing-masing.

Komite Manajemen Risiko bertugas memberi gambaran dan arahan kepada Direksi terkait pengelolaan risiko yang dihadapi perseroan. Direksi dapat menyusun kebijakan strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, melakukan penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko dan hal-hal lain terkait keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Komite Kredit merupakan komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam perencanaan pengelolaan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan Perseroan. Komite Kredit mengelola portofolio kredit dan pembiayaan perseroan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan optimalisasi dan minimalisasi risiko pemberian kredit.

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah merupakan Komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan. Direksi dapat melakukan evaluasi maupun penyempurnaan atas produk atau kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.

Komite Kedisiplinan merupakan Komite yang berada dibawah Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan internal yang berlaku di Perseroan. Komite secara berkala mengevaluasi pelanggaran yang terjadi di Perseroan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas membantu Direksi dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis TI yang mendukung model bisnis pembiayaan, digitalisasi layanan pembiayaan, penagihan dan customer onboarding termasuk mengelola risiko dan keamanan sistem informasi.

2.2.5. Prospek Usaha

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi ini dapat berbeda tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi global dan kebijakan pemerintah. DPR dan pemerintah, menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ditetapkan sebesar 5,4%, dan rata-rata prediksi IHSG dari beberapa sekuritas adalah sekitar 7.868.

Prediksi IHSG di tahun 2026 menunjukkan prospek yang cerah dengan didorong oleh beberapa sektor utama yaitu:

- a. Sektor Konsumer: yang didukung oleh belanja pemerintah dan suku bunga yang stabil.
- b. Sektor Nikel: sebagai salah satu komoditas strategis dengan permintaan global yang meningkat.
- c. Sektor Properti: didukung oleh program pemerintah dan peningkatan permintaan.
- d. Sektor Otomotif: sebagai salah satu sektor yang patut dicermati investor karena pertumbuhan permintaan domestik yang stabil.

Pertumbuhan sektor Konsumer ini akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh kepada sektor logistik dan transportasi, dimana banyak barang konsumsi yang berasal dari daerah tertentu sehingga memerlukan modal transportasi yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan trucking yang ada. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor logistik dan transportasi di segmen korporasi (Fleet).

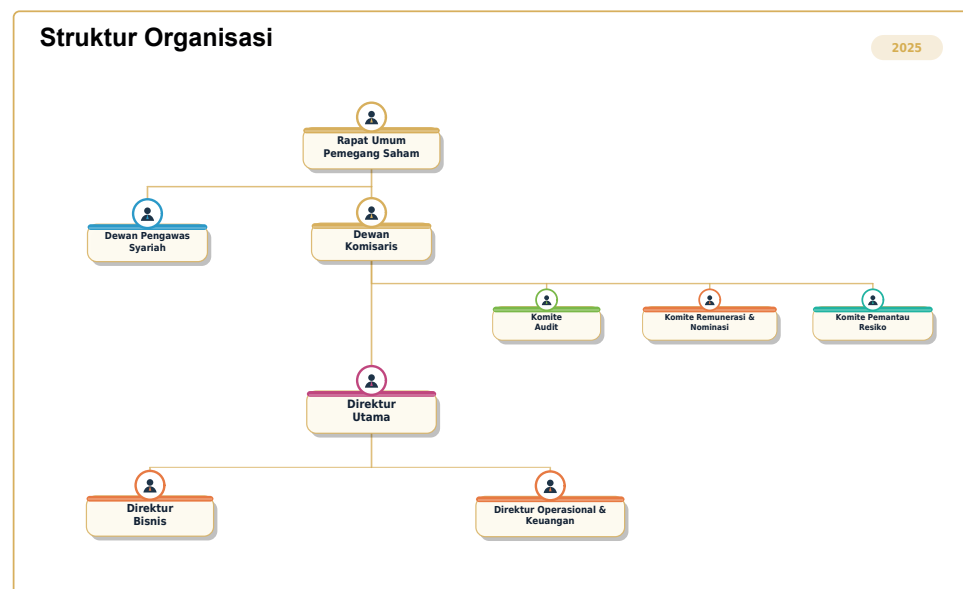
Penjualan mobil baru pada tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, dimana penjualan secara wholesale turun 7,2% menjadi 803.687 unit dan penjualan retail turun 6,3% menjadi 833.692 unit. Di tahun 2026 ini, Asosiasi industri otomotif Indonesia, GAIKINDO, menargetkan penjualan mobil baru sejumlah 850.000 unit selama tahun 2026, sedikit diatas realisasi tahun 2025. Namun pada kuartal 1 tahun 2026, terlihat pertumbuhan yang baik dari penjualan mobil baru, dimana pada bulan Januari penjualan whole sales naik 7% secara YoY dibandingkan dengan Januari 2025, sedangkan penjualan retail sales naik 4,5% secara YoY dibandingkan tahun Januari 2025. Pertumbuhan itu terus berlanjut sampai dengan bulan Februari dimana secara kumulatif penjualan Januari-Februari tahun 2026 lebih tinggi 9,9% dari penjualan di periode yang sama tahun 2025.

2.2.6. Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Juni 2025 mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama, sehingga komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris	Nama
Direktur Utama	Hendra Gunawan
Direktur	Fajar Satritama
Direktur	Raden Ari Priyadi

Struktur Organisasi



2.2.7. Penutup

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan yang dengan dukungan yang positif yang telah diberikan, Perseroan dapat terus meningkatkan kinerja dan tumbuh secara berkesinambungan di tahun-tahun mendatang.

Direksi juga sangat berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi para karyawan sehingga Perusahaan dapat melewati tahun 2025 ini dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Komisaris atas perhatian, dukungan, pengawasan, dan nasehat yang telah diberikan sehingga pengelolaan perseroan dapat berjalan dengan baik.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh nasabah, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan, atas dukungan, kontribusi, dan kepercayaannya. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan bersama.

Direksi

03

Profil Perusahaan



3. Profil Perusahaan

3.1. Data Perusahaan

Nama	: PT KB Bukopin Finance
Nama Panggilan	: KB Bukopin Finance
Bidang Usaha	: Jasa Pembiayaan
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Melawai Raya No. 66 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
Telepon	: 021-27936558
BuFin Care	: 1500 209
Website	: www.bukopinfinance.co.id
Tanggal Berdiri	: 9 Juni 2008
Dasar Hukum Pendirian	: Akta Pendirian No.1 (9 Juni 2008)
Modal Dasar	: Rp. 800.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp. 797.230.000.000,-
NPWP	: 01.360.669.4-019.000
TDP	: 0903.164.17030
SITU	: KEP-118/KM.10/2009
Kantor Layanan	: 9
Jumlah Karyawan	: 124 orang
Pemegang Saham	: - PT Bank KB Indonesia, Tbk = 99,24% - Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin = 0,49% - Koperasi Konsumen Bhakti Jaya Makmur = 0,27%

3.2. Sekilas KB Bukopin Finance

Cikal bakal PT KB Bukopin Finance (Perseroan) diawali dengan berdirinya PT Leasing Indo Corporation berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 11 Maret 1983 yang dibuat dihadapan Tan A. Sioe, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat keputusan No. C2-5233.HT.01.01. TH83 Tanggal 29 Juli 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26, beserta tambahan Nomor 432 Tanggal 1 April 1986. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan RI sesuai Surat Keputusan No. 66/KMK.017/1994 tertanggal 5 Maret 1994.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan nama menjadi PT Indo Trans Buana Multi Finance sesuai Akta Nomor 99 tanggal 3 Mei 1991 dan masuknya PT Bank Bukopin sebagai Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 181 tanggal 26 Desember 1994.

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 7 Mei 2008 telah disetujui perubahan nama dari PT Indo Trans Buana Multi Finance menjadi PT Bukopin Finance, yang tercantum Akta Notaris Amastasia Dau, SH dengan Akta Nomor 1 tertanggal 9 Juni 2008.

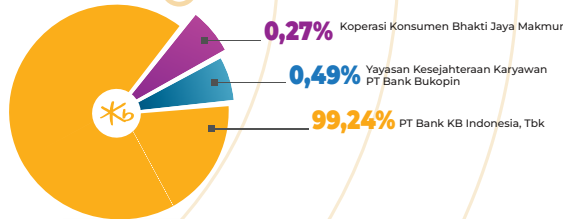
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat umum pemegang saham Nomor 270 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dihadapan Otty H.C Urbayani, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Bukti Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250215 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0132386.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 27 Juli 2021 Perseroan PT Bukopin Finance berubah nama menjadi PT KB Bukopin Finance yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pada 26 Desember 2022, perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda untuk mengubah anggaran dasar peningkatan modal dasar dari Rp 400 miliar menjadi Rp 800 miliar. Perubahan ini dicatat dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 2 Januari 2023 yang kemudian telah dicatat disetujui oleh Kemenkumham pada tanggal 3 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1092 Tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp204.330.000.000,00- menjadi Rp797.230.000.000,-. Perubahan ini telah dicatat dan disetujui oleh Kemenkumham pada tanggal 27 Oktober 2023 dan TBNRI Tanggal 22/3 - 2024 No. 24.

Untuk susunan pemegang saham dan struktur permodalan PT KB Bukopin Finance adalah sebagai berikut:



KEPENGURUSAN

Berdasarkan Akta Nomor 4813 tanggal 30 Juni 2025, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT KB Bukopin Finance adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Sunaryono
 Komisaris : Ridwan W Julianto

Direksi

Direktur Utama : Hendra Gunawan
 Direktur : Fajar Satritama
 Direktur : Raden Ari Priyadi

Dewan Pengawas Syariah : Moch Bukhori Muslim

3.3. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan pendirian perseroan sesuai Akta Perubahan No.191 tanggal 17 Juni 2016 pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha Pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mencapai maksud dan tujuan pembiayaan maka kegiatan usaha perseroan sebagai berikut:

1. Pembiayaan investasi sebagaimana dimaksudkan dengan cara:
 - 1) Sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
 - 2) Jual dan sewa-balik (*Sale and Leaseback*);
 - 3) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang
 - 4) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
 - 5) Pembiayaan proyek
 - 6) Pembiayaan infrastruktur, dan/atau
 - 7) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksudkan dengan cara:
 - 1) Jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*)
 - 2) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang
 - 3) Anjak Piutang tanpa pemberian jaminan
 - 4) Fasilitas modal usaha; dan/atau
 - 5) Pembiayaan lainnya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK

3. Pembiayaan multiguna sebagaimana dimaksudkan dengan cara:
 - 1) Sewa pembiayaan (Finance lease);
 - 2) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan/atau
 - 3) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Kegiatan Usaha Syariah sebagaimana dimaksudkan dengan cara:
 - 1) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dengan cara (Murabahah)
 - 2) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dengan (Mudharabah dan Musyaraka Mutanaqishoh).
 - 3) Pembiayaan Jasa sebagaimana yang dimaksud (Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik).

3.4. Tujuan dan Strategi Perusahaan

Perseroan menyusun langkah-langkah strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, untuk mewujudkan visi perusahaan "Menjadi perusahaan multifinance yang sehat, profitable, dan profesional".

1. Strategi Jangka Panjang
 - i. Meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan melalui diversifikasi produk dan pengelolaan risiko yang efektif.
 - ii. Meningkatkan kualitas aset dengan mengelola risiko kredit secara efektif melalui penerapan kebijakan kredit yang ketat dan pemantauan yang berkelanjutan.
 - iii. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
 - iv. Meningkatkan efisiensi operasional melalui implementasi teknologi yang tepat dan otomatisasi proses bisnis untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.
 - v. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan, pengembangan, dan pendidikan berkelanjutan untuk mendukung kinerja perusahaan.
 - vi. Menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, dan Governance) melalui pengembangan produk ramah lingkungan, program sosial, dan tata kelola perusahaan yang efektif dan transparan.
2. Strategi Jangka Menengah
 - i. Mencapai pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dan stabilitas bisnis pembiayaan yang menguntungkan.
 - ii. Meningkatkan pendanaan melalui kerja sama dengan bank untuk suku bunga kompetitif dan penerbitan instrumen utang atau pasar modal untuk mendukung pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan.
 - iii. Mengembangkan produk pembiayaan inovatif berbasis teknologi, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengembangkan platform digital untuk kemudahan transaksi, serta mengintegrasikan program dan strategi keuangan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
 - iv. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui pelatihan SDM, sistem manajemen keluhan yang efektif, dan infrastruktur teknologi informasi yang andal.
 - v. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengembangkan strategi pemasaran berbasis data, dan memperkuat jaringan distribusi serta kemitraan strategis.
 - vi. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengembangkan proses bisnis yang lebih efisien, menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis data, dan mengoptimalkan otomatisasi untuk mengurangi biaya.
 - vii. Mengembangkan SDM melalui pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.
 - viii. Mengelola risiko dengan mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif, meningkatkan kepatuhan, dan menyiapkan rencana kontinjensi, serta melanjutkan penerapan prinsip Governance Risk & Compliance (GRC) dan memperkuat pengendalian internal di bawah pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

3. Strategi Jangka Pendek

- i. Penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp1,24 triliun pada tahun 2026, dengan fokus pada produk pembiayaan Fleet dan Retail, termasuk pembiayaan kendaraan komersial, alat berat, sepeda motor listrik, invoice, dan pembiayaan retail produktif, serta pengembangan produk syariah dan produk pembiayaan UMKM yang didukung dengan perluasan jaringan kantor.
- ii. Pengembangan sistem penilaian kredit melalui enhancement scoring system, evaluasi kebijakan dan Risk Acceptance Criteria (RAC) sesuai perkembangan industri, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses kredit bisnis.
- iii. Optimalisasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta peningkatan struktur dan monitoring dalam program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).
- iv. Meningkatkan pelaksanaan aspek kepatuhan, quality assurance, dan manajemen risiko melalui implementasi Taskboard Compliance, Dashboard Quantum System, dan RCSA (Risk Control Self Assessment) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkini, meningkatkan kualitas operasional, dan meminimalisir risiko.
- v. Melakukan audit internal dengan fokus pada evaluasi proses bisnis utama dan pendukung, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian internal, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
- vi. Optimalisasi pengelolaan piutang bermasalah melalui penyelesaian persuasif dan upaya hukum, serta meningkatkan efisiensi bisnis melalui pengkinian perjanjian dan penyesuaian sumber daya.
- vii. Menerapkan strategi penanganan akun yang komprehensif, meliputi pengiriman Welcoming Letter dan pemanfaatan Desk Collection untuk akun lancar, identifikasi dan monitoring untuk akun NPF dan Write Off, serta pengembangan sumber daya manusia dan jaringan eksternal untuk meningkatkan efektivitas recovery.
- viii. Melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan sistem untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan pengelolaan risiko, termasuk penyimpanan dokumen, penyelesaian pengaduan, proses pembiayaan, monitoring penjaminan asuransi, penerimaan angsuran, dan pengembangan chatbot untuk konfirmasi penerimaan angsuran.
- ix. Inisiatif dan Inovasi dalam Pengelolaan Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan.
- x. Melakukan transformasi digital melalui beberapa inisiatif, yaitu penggantian core system, implementasi Web Application Firewall (WAF), pengembangan SDM teknologi informasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan scoring system untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan.
- xi. Melakukan peningkatan proses pengelolaan aset tarikan melalui pelaksanaan stock opname berkala, peningkatan kerjasama dengan Balai Lelang, dan pengembangan proses internal untuk mempercepat penjualan aset non-produktif dan meningkatkan nilai recovery.
- xii. Melakukan peremajaan fasilitas operasional, pengelolaan kendaraan operasional, pemenuhan kebutuhan logistik kantor, serta peningkatan kebersihan dan keamanan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan.
- xiii. Penyempurnaan struktur organisasi agar lebih adaptif, pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten melalui rekrutmen dan training, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

3.5. Visi dan Misi

Guna menyatukan energi untuk menetapkan tujuan Perusahaan maka ditetapkan Visi dan Misi Perusahaan, sebagai berikut:

VISI

Menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan menjadi pilihan utama di Indonesia

MISI

- Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan mitra usaha
- Memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dan mensejahterakan karyawan
- Membangun sinergi bisnis dengan perusahaan induk dan group usaha

3.6. Nilai Perusahaan (Core Value)

Nilai Perusahaan (*Core Value*) merupakan prinsip dasar yang dijadikan pedoman oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini menggambarkan karakter dan budaya yang ingin dibangun oleh perusahaan, baik di dalam lingkungan internal maupun dalam hubungan eksternal dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Perseroan telah menyusun nilai perusahaan yang tertuang dalam nilai-nilai perusahaan yaitu *Integrity, Multitasking, Service Excellent, Team Work, Agility & Inovative, Respect (I'm Star)*.

Berikut penjabaran dari Core Value Perusahaan I'm Star :



Integrity, Menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam segala tindakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Multitasking, Mempunyai kemampuan dan terampil dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Service Excellent, Memberikan pelayanan terbaik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.



Team Work, Membangun kerjasama efektif untuk membentuk satu kesatuan tujuan dan tindakan.



Agility & Inovative, Selalu mengembangkan diri untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan.



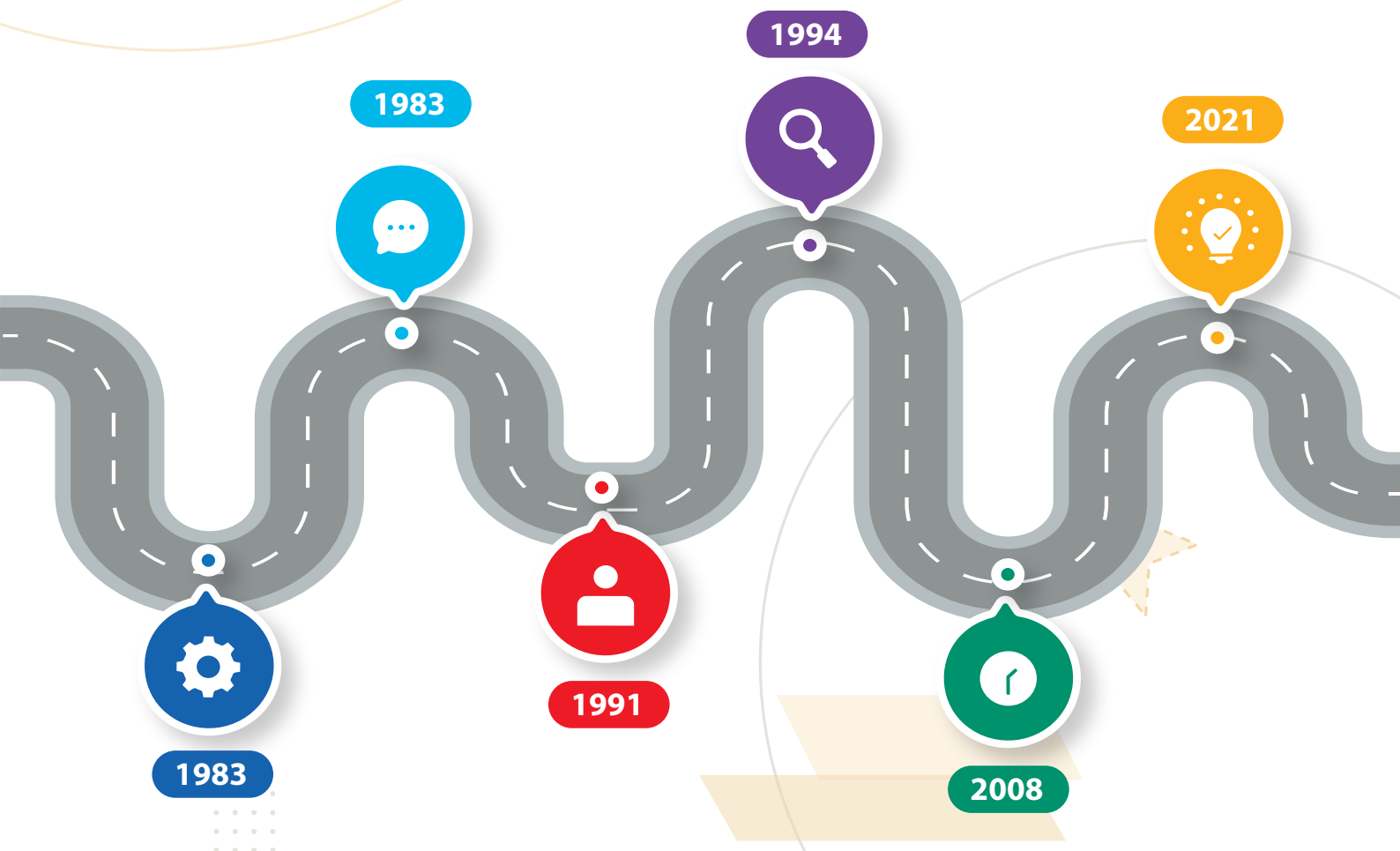
Respect, Saling menghargai dan menghormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.

3.7. Identitas Perusahaan

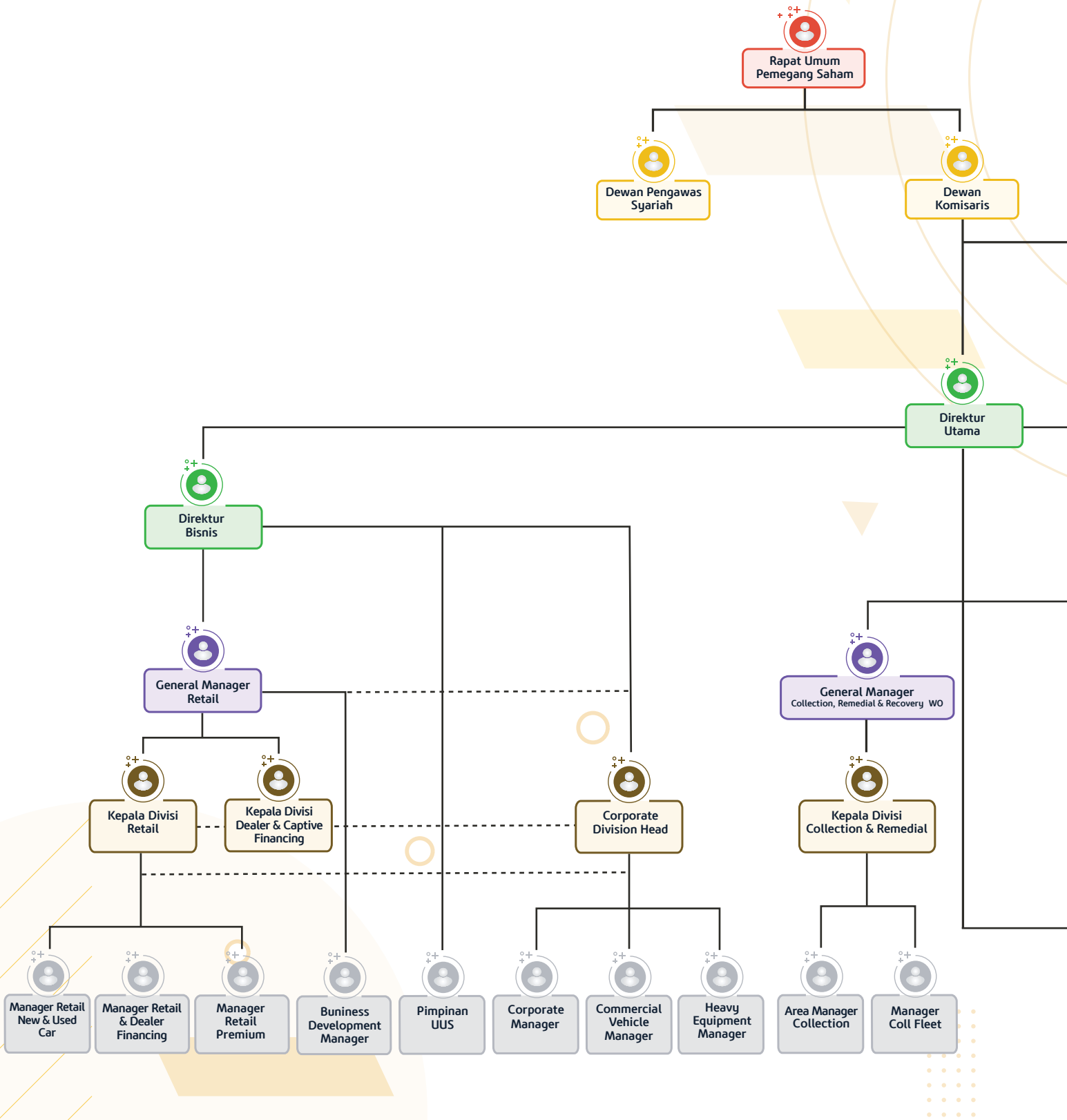
Pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

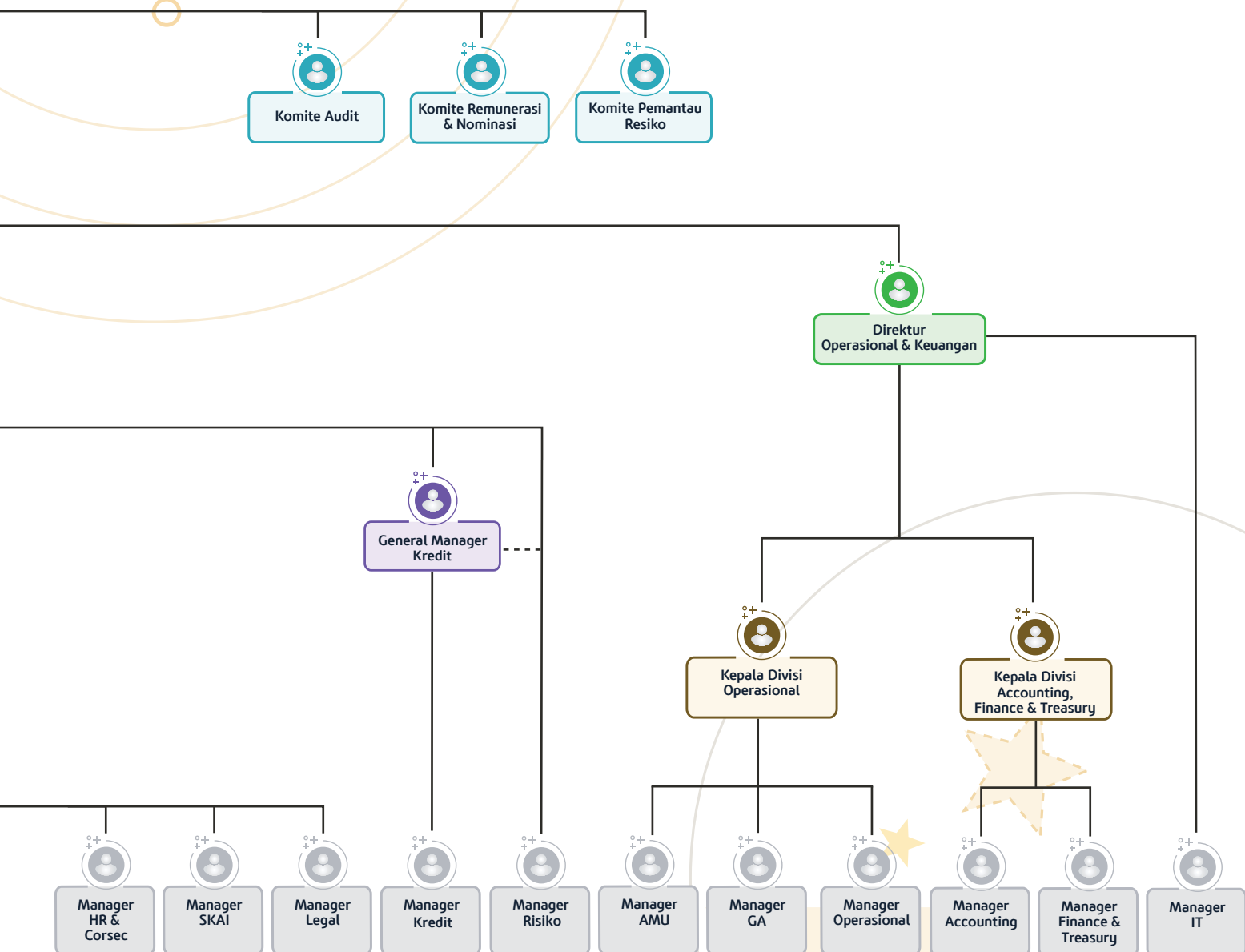
3.8. Jejak Langkah KB Bukopin Finance

1. PT Leasing Indo Corporation.
Dimiliki oleh perorangan tahun 1983.
2. PT Leasing Indo Trans Buana
Pada tanggal 20 Juli 1983 dilakukan perubahan nama dari PT. Leasing Indo Corporation menjadi PT Leasing Indo Trans Buana sesuai Akta Pembetulan.
Pada tanggal 20 April 1988 Koperasi Karyawan Bukopin membeli saham sesuai Akta No. 116 dibuat oleh Raharti Sujarjati, SH Notaris di Jakarta.
3. PT Indo Trans Buana Multi Finance
Pada tanggal 23 Mei 1991 PT Leasing Indo Trans Buana mengambil alih saham PT Jaya Aneka Artha Guna Leasing dan sekaligus dilakukan perubahan nama menjadi PT Indo Trans Buana Multi Finance sesuai Akta no. 99 dibuat oleh Raharti Sujarjati, SH notaris di Jakarta.
4. PT Indo Trans Buana Multi Finance
Pada tanggal 26 Desember 1994 Koperasi Karyawan Bukopin, Yayasan Kesejahteraan Bukopin dan PT Bank Bukopin mengambil alih saham dan seluruh pemegang saham lama.
5. PT Bukopin Finance
Pada tanggal 07 Mei 2008 melalui RUPSLB disetujui perubahan nama dari PT Indo Trans Buana Multi Finance menjadi PT Bukopin Finance sesuai akta no 1 tanggal 09 Juni 2008 dibuat oleh Amatasya dau, SH notaris di Jakarta.
6. PT KB Bukopin Finance
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 27 Juli 2021 Perseroan PT Bukopin Finance berubah nama menjadi PT KB Bukopin Finance.



3.9. Struktur Organisasi KB Bukopin Finance





Update: Desember 2024

Sunaryono
(Komisaris Utama Independen)



3.10. DEWAN KOMISARIS

3.10.1. Komisaris Utama Independen

Warga Negara Indonesia lahir di Karanganyar, 30 Juni 1956. Memperoleh gelar Insinyur Peternakan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1981, Magister Bisnis Administrasi di Institut Pembangunan Wiraswasta Indonesia pada tahun 1993 dan Magister Hukum di Universitas Gajah Mada pada tahun 2013.

Awal menjabat sebagai Komisaris Utama Independen PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2022 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 sampai dengan Tahun Buku 2027.

Berpengalaman lebih dari 35 tahun bekerja di bidang jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan (2003–2006) dan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Pengembangan SDM (2006–2013) di PT Bank KB Bukopin Tbk (d.h PT Bank Bukopin Tbk) dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank KB Bukopin (2019–2022).



Ridwan W Julianto
(Komisaris)



3.10. DEWAN KOMISARIS

3.10.2. Komisaris

Komisaris Warga Negara Indonesia lahir di Banjarmasin, 01 Juli 1967. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1990. Menjabat sebagai Komisaris PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tahun 2025. Berpengalaman lebih dari 30 tahun bekerja di bidang perbankan yang diawali di Lippobank, CIMB Niaga hingga saat ini menjabat sebagai salah satu Kepala Divisi di PT Bank KB Indonesia (2023 – sampai sekarang)



Hendra Gunawan
(Direktur Utama)



3.11. DIREKSI

3.11.1. Direktur Utama

Warga Negara Indonesia lahir di Tanjung Pandan pada tanggal 24 Maret 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Magister Manajemen di Indonesia Banking School pada tahun 2024.

Awal menjabat sebagai Direktur Utama PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2022, dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 sampai dengan Tahun Buku 2027.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2022 sampai saat ini. Sebelumnya, memulai awal karir sebagai Management Trainee hingga menjadi Branch Manager di Astra Credit Companies (1998–2003), National Sales Head KPM di PT Permata Bank Tbk (2003–2004), Area Marketing Manager di Adira Dinamuka Multi Finance (2004–2005), GM sampai menjadi Senior Executive GM di U Finance Indonesia (2005–2021), Fleet Sales & Marketing Division Head di PT Shinhan Indo Finance (2021–2022).



| Fajar Satritama
(Direktur | Bisnis)



3.11. DIREKSI

3.11.2. Direktur | Bisnis

Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta, 11 Juli 1970. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Awal menjabat sebagai Direktur | Bisnis PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2021 dan diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 sampai dengan Tahun Buku 2026.

Sebelumnya memulai awal karir di dunia perbankan sebagai Account Officer di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1996-1999), Corporate Banking Section Head di PT Bank OCBC Nisp Tbk (2000-2010), Head of Corporate Banking III Dept di PT Bank ICBC Indonesia (2011-2017) dan Kepala Divisi Corporate, SME & Value Chain di PT Bank Ganesha Tbk (2017-2018). Kemudian berpindah ke industri perusahaan pembiayaan sebagai Direktur di PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (2018- 2021).



| Raden Ari Priyadi
(Direktur | Operasional & Keuangan)



3.11. DIREKSI

3.11.3. Direktur | Operasional & Keuangan

Warga Negara Indonesia lahir di Bandung, 1981. Memperoleh gelar Sarjana di Unika Atmajaya Jakarta pada tahun 2006.

Berpengalaman lebih dari 19 tahun bekerja di lembaga keuangan baik Bank, Pasar Modal dan Pembiayaan. Saat ini terdaftar sebagai Anggota komite R4 APPI dan sebagai Asesor LSPPI bersertifikat BNSP. Menjabat sebagai Direktur | Operasional & Keuangan PT KB Bukopin Finance berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2023 sampai saat ini.



Moch. Bukhori Muslim
(Dewan Pengawas Syariah)



3.12. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

3.12 Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di STAI Azziyadah Jakarta pada tahun 2000, Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2005 dan Doktor Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2007.

Mejabat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT KB Bukopin Finance sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Saat ini juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta sejak tahun 2017, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Nano Syariah sejak tahun 2024.



3.13. Komposisi Pemegang Saham

Data tabel pemegang saham per Desember 2025.

No	Pemegang Saham	Nilai Saham	Lembar	%
1	PT Bank KB Indonesia, Tbk	791.165.000.000	158.233	99,24%
2	Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin	3.940.000.000	788	0,49%
3	Koperasi Konsumen Bhakti Jaya Makmur	2.125.000.000	425	0,27%
Total		797.230.000.000	159.446	100%

PT Bank KB Indonesia, Tbk

99,24%

Nilai saham: 791.165.000.000

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin

0,49%

Nilai saham: 3.940.000.000

Koperasi Konsumen Bhakti Jaya Maakmur

0,27%

Nilai saham: 2.125.000.000

3.14. Lokasi Kantor Pelayanan KB Bukopin Finance

Sebaran Lokasi Kantor Pelayanan

Kantor pusat dan kantor pelayanan tersebar di wilayah operasional utama.



PT KB Bukopin Finance - Kantor Pusat

Jl. Melawai Raya No. 66, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

WILAYAH 1

4 kantor

Kantor Pelayanan

- Jakarta
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Jakarta Syariah
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Tangerang
Tangerang, Banten
- Bekasi
Bekasi, Jawa Barat

WILAYAH 2

3 kantor

Kantor Pelayanan

- Bandung
Bandung, Jawa Barat
- Surabaya
Surabaya, Jawa Timur
- Palembang
Palembang, Sumatera Selatan

WILAYAH 3

1 kantor

Kantor Pelayanan

- Makassar 2
Makassar, Sulawesi Selatan

04

Analisa dan Pembahasan Manajemen



4. Analisa dan Pembahasan Manajemen

4.1. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Perekonomian global pada tahun 2025 mengalami perlambatan akibat ketidakpastian geopolitik, kebijakan tarif resiprokal AS, dan kerentanan rantai pasok global. Untuk tahun 2026, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan sedikit lebih rendah menjadi 3,2% dibandingkan tahun 2025 sebesar 3,3%. Harga emas dunia mencetak rekor tertinggi baru, mencapai \$4.100 per troy ons pada kuartal III dan IV 2025, didorong oleh kebijakan tarif impor AS, pembelian emas oleh bank sentral, dan ketidakpastian ekonomi. Dolar AS pun melemah 9,4% akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan dan ekspektasi penurunan suku bunga Fed. Konflik bersenjata di Timur Tengah juga memicu kenaikan harga minyak dan risiko stagflasi global.

Perekonomian Indonesia tahun 2026 diproyeksikan tumbuh 5,0-5,3% di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mempengaruhi harga minyak dan kebijakan tarif impor AS. Ketegangan geopolitik memicu capital outflow, melemahkan rupiah, dan meningkatkan biaya impor. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 4,75% untuk menjaga stabilitas ekonomi. Cadangan devisa Indonesia US\$151,9 miliar, mencukupi untuk 6 bulan impor. Surplus neraca perdagangan diprediksi US 0,95-1,5 miliar. Inflasi diharapkan berada pada angka 1,5-3,5%. Sektor otomotif diperkirakan belum mencapai 1 juta unit penjualan, namun mobil listrik dan hybrid tumbuh signifikan. Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4-5,6%.

Kinerja industri perusahaan pembiayaan sepanjang 2025 mengalami tekanan, dengan total aset kontraksi 0,01% dan pertumbuhan piutang pembiayaan terbatas di 0,61% (Rp506,50 triliun). Pertumbuhan piutang sempat meningkat pada Oktober-November 2025, namun melemah pada Desember. Faktor utama adalah ketergantungan pada pembiayaan kendaraan bermotor, yang turun 8% (803 ribu unit) berdasarkan Gaikindo. Risiko kredit terjaga dengan NPF gross 2,51% dan NPF net 0,77%. Gearing ratio 2,18 kali, di bawah batas maksimum 10 kali. Laba industri multifinance turun 7,32% YoY per November 2025 karena penurunan penyaluran pembiayaan dan peningkatan NPF.

4.2. Kondisi Perekonomian Dunia

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang disertai dengan kerentanan rantai pasok secara global dan meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik. Kondisi tersebut mendorong penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara maju sehingga mengakibatkan tertahannya peningkatan aliran modal ke negara berkembang.

Prospek perekonomian global kedepannya masih akan terus melambat akibat ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2026 akan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi AS pada 2026 diprediksi meningkat dipengaruhi investasi sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus pemotongan pajak. Sementara itu, Jepang, China, dan India, pertumbuhan ekonominya diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor yang disebabkan oleh tarif resiprokal AS.

Ketidakpastian global di tahun 2025 ini menjadikan tahun 2025 sebagai tahun yang paling luar biasa bagi pergerakan harga emas dunia, dimana mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.



Memasuki awal tahun 2025, harga emas dunia langsung tancap gas. Pada pertengahan Februari 2025, emas sempat mencetak rekor di area kisaran \$2.940-an per troy ons. Pada kuartal III dan IV 2025, harga emas dunia bahkan sempat melonjak tajam hingga mendekati level resistensi baru di kisaran \$4.100 per troy ons. Lonjakan harga emas global yang masif ini membawa harga emas Antam di dalam negeri terbang tinggi. Dari yang awalnya berada di kisaran Rp1,6 juta per gram di awal tahun, melesat hingga menembus angka Rp2,5 juta per gram pada akhir Desember 2025.

Kenaikan harga emas yang sangat signifikan di tahun 2025 dipicu oleh kombinasi faktor-faktor seperti Kebijakan tarif impor yang agresif dari pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat, Bank-bank sentral di berbagai belahan dunia terus memborong emas dalam jumlah besar untuk memperkuat cadangan devisa mereka guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, kebijakan pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral AS, dan ketidakpastian ekonomi yang mendorong lonjakan permintaan fisik pada emas batangan maupun produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas, terutama di kawasan Amerika Utara dan Asia.

Dolar AS (USD) sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan mengalami tren penurunan yang signifikan, dengan Indeks Dolar (DXY) turun sekitar 9,4% akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan, defisit anggaran, dan ekspektasi penurunan suku bunga Fed. Meskipun melemah secara global, USD sempat bergejolak tinggi di paruh pertama, terutama terhadap Rupiah yang tertekan hingga menembus kisaran Rp16.500-Rp17.000+ per dolar.

Eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di awal tahun 2026 juga merupakan sebuah guncangan asimetris (asymmetric shock) yang masif, dimana wilayah Timur Tengah memegang peranan sangat vital dalam suplai energi dan jalur logistik dunia. Jalur perdagangan di Selat Hormuz (yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak dunia) mengalami disrupsi yang cukup signifikan. Hambatan di jalur ini secara langsung membuat harga minyak mentah Brent sempat naik melampaui level \$100 per barel. Lonjakan harga ini memicu inflasi di berbagai negara pengimpor minyak, terutama di kawasan Asia dan Eropa.

Kombinasi antara inflasi yang tinggi dan aktivitas produksi yang melambatnya akibat mahalnya biaya logistik memicu risiko stagflasi. International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa perang ini akan merusak pemulihan ekonomi global. J.P. Morgan pun menganalisis jika harga minyak bertahan tinggi, maka pertumbuhan PDB global bisa turun sekitar 0,6% pada semester pertama tahun 2026.

Transaksi ekspor dan impor dunia pun terdampak dari konflik ini. Ketegangan militer di sekitar Teluk Persia dan berlanjutnya krisis di Laut Merah membuat perusahaan pelayaran harus memutar rute. Selain waktu tempuh yang lebih lama, tarif premi asuransi kapal (maritime insurance) akan melonjak drastis sehingga akan meningkatkan beban harga barang jadi. Selain minyak, wilayah Teluk merupakan produsen utama gas alam cair (LNG) serta bahan baku industri seperti aluminium dan helium (yang digunakan dalam manufaktur semikonduktor). Terhambatnya pasokan bahan-bahan ini mengganggu rantai pasok industri teknologi dan otomotif secara global.

Konflik ini juga akan berpengaruh kepada nilai tukar US Dolar (USD) terhadap seluruh negara di dunia. Ketika perang pecah, investor global akan menghindari aset berisiko (risk-off) di negara berkembang dan memindahkan likuiditas mereka ke aset yang dianggap paling aman. Dolar AS merupakan salah satu instrumen safe haven utama dunia. Masifnya arus modal keluar (capital outflow) dari bursa saham dan obligasi negara-negara berkembang demi memburu USD membuat mata uang lokal melemah. Di Indonesia sendiri, sentimen gejolak ini sempat mendorong nilai tukar Rupiah menembus level psikologis baru di atas Rp17.000 per dolar AS.



Harga emas dunia pun terdampak akibat konflik ini, yang terbukti begitu serangan militer pertama kali pada akhir Februari 2026, harga emas dunia langsung melonjak tajam. Emas memegang peran tradisionalnya yang sangat kuat sebagai pelindung kekayaan murni di tengah ketakutan pecahnya perang skala besar. Dalam beberapa pekan setelah konflik berjalan, harga emas beberapa kali mengalami penurunan tajam yang terjadi karena para investor yang menderita kerugian di pasar saham terpaksa menjual (melikuidasi) kepemilikan emas mereka untuk menutupi kebutuhan uang tunai mendesak dan menyeimbangkan portofolio. Secara jangka panjang, terlepas dari koreksi teknis jangka pendek, fondasi emas untuk jangka panjang di tahun 2026 tetap kokoh didukung oleh tingginya inflasi global dan aksi borong emas yang masih dilakukan oleh bank-bank sentral dunia.

4.3. Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia di tahun 2026 akan dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi kestabilan harga minyak serta kebijakan tarif impor dari Amerika yang akan menekan kinerja ekspor non-migas Indonesia.

Ketegangan geopolitik juga akan memicu keluarnya dana investor asing menuju safe haven seperti Dolar AS sehingga akan menekan nilai tukar rupiah dan kemudian meningkatkan biaya impor bahan baku industri dan pangan yang pada akhirnya akan menurunkan keuntungan sektor manufaktur. Beban pembayaran utang negara akan semakin tinggi dengan nilai tukar rupiah yang lemah, sehingga penerimaan negara akan lebih banyak teralokasikan kepada pembayaran utang daripada pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya.

Dengan kondisi tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tetap tumbuh pada rentang 5,0% sampai 5,3%. Cadangan devisa Indonesia per Februari 2026 tercatat sebesar US\$ 151,9 miliar, nilai tersebut dinilai oleh Bank Indonesia masih mencukupi karena setara dengan pembiayaan impor untuk 6 bulan, jauh diatas standar kecukupan internasional (3 bulan impor). Untuk neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih dapat dipertahankan pada rentang US\$ 0,95 miliar sampai US\$ 1,5 miliar, dimana hal ini dipengaruhi oleh ekspor komoditas non-migas. Namun Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan dalam nilai impor minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

Pemerintah melalui Bank Indonesia, sampai dengan Maret 2026 masih mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75%. Hal ini ditujukan untuk menyeimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global serta menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap tumbuh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih dibayangi oleh capital outflow ke pasar negara maju akibat sentimen perang di luar negeri dan fluktuasi harga komoditas.

Inflasi diharapkan dapat terjaga pada rentang 1,5% sampai 3,5%, namun masih terdapat komponen biaya logistik yang patut diwaspadai, baik itu biaya logistik global yang berpotensi naik, maupun potensi kenaikan harga BBM non-subsidi dalam negeri yang juga berpotensi mengalami kenaikan apabila harga minyak dunia tetap tinggi.

Sektor otomotif, sebagai salah satu sektor yang memberikan pengaruh kepada perekonomian Indonesia, diperkirakan masih belum dapat menembus angka penjualan 1 juta unit di tahun 2026. Hal ini dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah serta suku bunga kredit kendaraan yang masih relatif tinggi. Namun untuk penjualan mobil baru tipe mobil listrik dan hybrid, mengalami pertumbuhan yang signifikan yang disebabkan oleh adanya insentif pajak serta efisiensi biaya perjalanan di tengah gejolak harga minyak yang berpotensi adanya kenaikan harga BBM domestik.

Sektor pertambangan tahun 2026 diproyeksikan oleh Bank Indonesia akan menghadapi laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, namun tetap memiliki peran penting bagi ekspor, pendapatan negara, dan bahan baku industri dalam negeri. Untuk komoditas batu bara, di tahun 2026 ini pemerintah menurunkan kuota produksi nasional menjadi hanya sebesar 600 juta ton yang diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di pasar global. Untuk komoditas Nikel, Pemerintah juga melakukan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga umur cadangan nikel dapat bertahan untuk waktu yang lebih panjang. Sedangkan untuk pertambangan emas, perusahaan penambang emas mendapatkan keuntungan yang meningkat dengan adanya lonjakan harga emas akibat ketidakpastian perang global yang sedang berlangsung. Dilain itu, kapasitas produksi tembaga juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan tembaga untuk produksi teknologi dunia dan kendaraan listrik.

Pengurangan kuota produksi, pengetatan RKAB, serta kenaikan biaya logistik, akan memberikan pengaruh terhadap permintaan pembelian alat berat selama tahun 2026. Korporasi tambang akan cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi pembukaan lahan baru dan melakukan penambangan secara terbatas.

Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4% sampai 5,6%. Target pertumbuhan ini akan mengandalkan konsumsi rumah tangga, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta keberlanjutan program hilirisasi industri.

4.4. Kondisi Industri Perusahaan Pembiayaan

Kinerja industri perusahaan pembiayaan sepanjang 2025 tercatat mengalami tekanan. Secara tahunan, total aset industri mengalami kontraksi 0,01%, sementara pertumbuhan piutang pembiayaan tercatat terbatas di level 0,61% dengan nominal sebesar Rp506,50 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan sempat menunjukkan perbaikan pada Oktober 2025 di angka 0,68% dan tumbuh menjadi 1,08% pada November 2025. Namun, tren tersebut kembali melemah pada Desember 2025. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja industri pembiayaan adalah tingginya ketergantungan perusahaan pembiayaan terhadap pembiayaan kendaraan bermotor. Dimana sepanjang tahun 2025, penjualan kendaraan baru berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), hingga Desember 2025 turun sekitar 8% menjadi 803 ribu unit.

Secara profil risiko, rasio Non-Performing Financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan terjaga sebesar 2,51% dan NPF net sebesar 0,77%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan masih berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,18 kali, di bawah batas maksimum 10 kali. Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), outstanding pembiayaan tumbuh 25,44% yoy dengan nominal Rp96,62 triliun dan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) pada level 4,32%.

Secara laba rugi, berdasarkan data statistik OJK per November 2025, laba industri multifinance mengalami penurunan 7,32% secara Year On Year (YoY). Selain karena turunnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan, penurunan laba ini juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan angka kredit macet Non Performing Financing (NPF).

4.5. Posisi Perseroan dalam Peers Group

Perusahaan selama 2025 dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan, membukukan aset sebesar Rp1,16 Triliun berdasarkan pengelompokan Perusahaan Pembiayaan oleh Infobank, Perusahaan kembali “naik kelas” dari kelompok aset Rp500 Miliar - Rp1 Triliun menjadi kelompok aset Rp1 Triliun - Rp5 Triliun. Piutang pembiayaan bersih Perusahaan di akhir 2025 tercatat sebesar Rp1,08 Triliun, mencapai 1,12% dari total piutang pembiayaan bersih kelompok aset Rp1 Triliun - Rp5 Triliun nasional per Desember 2025.

Financial to Asset Ratio (FAR) Perusahaan di akhir tahun 2025 mencapai 93,29%, mengalami kenaikan dibandingkan FAR pada tahun 2024 yang sebesar 90,26%, dan berada diatas FAR industri yang sebesar 86,01%.

Gearing Rasio (GR) Perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, dari sebesar 0,31 kali menjadi sebesar 1,50 kali diakhir 2025. Angka ini masih dibawah rata-rata industri yang mencapai 2,13 kali.

Untuk rasio Non-Performing Financing (NPF), Perusahaan mencatatkan kinerja NPF Nett sebesar 0,00%, yang dihasilkan dari pembentukan pencadangan sebesar 100% dari nilai NPF yang ada. Secara industri, NPF akhir tahun 2025 tercatat sebesar 0,77%.

Perusahaan menutup tahun 2025 dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp19,13 miliar sehingga secara rasio Return on Equity (RoE) tercapai sebesar 4,16%, masih berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 10,71%.

4.6. Tinjauan Operasional

Tahun 2025 bukan hanya tentang mengejar pertumbuhan, namun tentang memperkuat fondasi operasional. Perseroan menempatkan kualitas portofolio, efisiensi biaya, serta manajemen risiko sebagai prioritas utama guna memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Dengan strategi yang adaptif dan disiplin operasional yang kuat, Perseroan optimistis dapat menjaga stabilitas kinerja sekaligus mempersiapkan pertumbuhan yang lebih solid pada tahun berikutnya.

Tantangan Utama

Selama tahun 2025 tantangan utama yang masih kami hadapi adalah dinamika ekonomi domestik maupun global yang mempengaruhi pertumbuhan industri pembiayaan.

1. Kondisi Ekonomi Umum

- Pertumbuhan ekonomi domestik tetap berada di kisaran $\pm 5\%$, namun mengalami tekanan dari perlambatan global dan moderasi konsumsi rumah tangga. Stabilitas tetap terjaga berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
- Inflasi relatif terkendali, tetapi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, khususnya pada segmen menengah bawah. Hal ini tercermin dari perlambatan pada beberapa sektor konsumsi, termasuk pembelian kendaraan bermotor, yang berdampak langsung terhadap pembiayaan konsumtif.
- Ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta pelemahan ekonomi di Tiongkok dan sebagian wilayah Eropa, memberikan tekanan terhadap perdagangan global, nilai tukar, dan arus investasi. Kondisi ini berdampak tidak langsung pada sektor riil dan kebutuhan pembiayaan.

- Di sisi lain, peluang tetap terbuka, didukung oleh stimulus fiskal melalui APBN 2025, belanja infrastruktur, serta program perlindungan sosial yang menjaga konsumsi domestik. Stabilitas kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait turut menopang ketahanan sektor jasa keuangan.
- Transformasi digital di sektor keuangan dan multifinance menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses kredit, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat. Digitalisasi juga membantu Perseroan dalam memperkuat pengendalian risiko melalui sistem monitoring yang lebih terintegrasi.

2. Sektor Pembiayaan

- **Sektor Otomotif** masih menjadi kontributor utama dalam portofolio pembiayaan nasional, namun menghadapi tantangan dari tren penjualan kendaraan baru yang belum sepenuhnya pulih. Tekanan inflasi dan ketidakpastian global membuat daya beli masyarakat lebih selektif, sehingga pertumbuhan penjualan kendaraan relatif moderat dibandingkan periode sebelumnya.
- **Mobil Baru** berdasarkan data Gaikindo tahun 2025 sebanyak 803.687 (dari Pabrik ke Dealer) dan 833.692 (dari Dealer ke Konsumen), penjualan mobil di Indonesia tahun 2025 turun sekitar 7% dibandingkan tahun 2024 sebanyak 865.723 unit
- **Mobil Bekas:** Pasar mobil bekas Indonesia tahun 2025 masih tumbuh sekitar 5%, terutama didorong oleh konsumen di daerah. Namun, di kota besar penjualan melemah karena masyarakat menunda pembelian mobil baru, sehingga suplai mobil bekas juga berkurang, dikarenakan konsumen selalu membandingkan tren mobil baru listrik vs mobil bekas 2025.
- Perusahaan perlu strategi diversifikasi pembiayaan, tidak hanya fokus pada mobil baru Retail atau Fleet, tetapi juga memperkuat portofolio pembiayaan mobil bekas dan kendaraan listrik.
- Permintaan pembiayaan tetap tumbuh, terutama dari segmen konsumtif dan produktif (UMKM), pertumbuhan portofolio piutang pembiayaan pada tahun 2025 OJK memproyeksi pertumbuhan portofolio piutang pembiayaan multifinance di 2025 diperkirakan naik 8–9% YoY, atas dukungan OJK dengan kebijakan deregulasi dan kondisi makro agar tetap relatif stabil, tercatat portofolio piutang pembiayaan pada tahun 2024 hanya sebesar 6,82%, sedangkan pada diakhir tahun 2025 naik tipis 0.61% dari tahun 2024, dengan nilai piutang pembiayaan Rp.506,5 triliun, namun pada pembiayaan modal kerja di tahun 2025 naik 10.06 % YoY.
- Persaingan pasar semakin ketat, dengan semakin banyaknya pemain baru di industri multifinance serta kehadiran fintech yang menawarkan solusi pembiayaan cepat, digital, dan inovatif. Kondisi ini mendorong perusahaan multifinance untuk memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses bisnis.
- Peluang tetap terbuka melalui digitalisasi, kolaborasi dengan fintech, atau perusahaan manufaktur serta pembiayaan sektor produktif yang sejalan dengan program Pemerintah dalam mendukung UMKM dan pembangunan nasional.

3. Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi

- Kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang masih bertahan sampai Desember 2025 sebesar 4.75%, hal ini memberikan dampak langsung terhadap suku bunga pinjaman. Kondisi ini menekan biaya pendanaan bagi sektor pembiayaan dan multifinance, sehingga efisiensi operasional dan strategi diversifikasi sumber dana menjadi semakin penting.

- Regulasi dan kebijakan stimulus ekonomi Pemerintah masih perlu terus diperkuat untuk mendorong investasi dan menjaga daya beli masyarakat. Dukungan fiskal melalui APBN 2025 diarahkan untuk stimulus perlindungan sosial untuk ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dan proyek strategis, dukungan UMKM & sektor produktif, insentif pajak & sektor otomotif, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi yang konsisten dan tepat sasaran, kebijakan dan konsolidasi fiskal, stimulus ekonomi 1-2025 dan sinkronisasi APBN dengan strategi pertumbuhan baru yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
- Ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi di negara maju serta risiko geopolitik turut memengaruhi arus investasi dan perdagangan, sehingga Perusahaan multifinance harus lebih adaptif dalam mengelola portofolio pembiayaan.
- Digitalisasi ekonomi menjadi faktor pendukung yang signifikan, membuka peluang efisiensi biaya, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif.

4. Teknologi dan Inovasi

- Perkembangan teknologi digital di tahun 2025 semakin mempercepat transformasi operasional Perusahaan Pembiayaan. Tahun 2025 menjadi fase adopsi dan fondasi digital. Digitalisasi proses bisnis tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas aksesibilitas bagi nasabah melalui layanan berbasis aplikasi, web dan integrasi data real-time.
- Fintech semakin kuat sebagai alternatif sumber pembiayaan, dengan menawarkan solusi cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi. Kondisi ini mendorong Perusahaan Pembiayaan tradisional untuk beradaptasi dengan teknologi informasi, memperkuat sistem keamanan digital, serta menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih inovatif dan kompetitif.
- Kolaborasi antara multifinance dan fintech menjadi peluang strategis, memungkinkan integrasi data, pengembangan produk baru, serta peningkatan pengalaman nasabah dengan basis startup teknologi, UMKM berbasis digital, ekosistem inovasi.
- Teknologi analitik dan big data semakin berperan dalam mendukung pengambilan keputusan operasional, monitoring risiko, dan personalisasi layanan pembiayaan.

5. Risiko Ekonomi

- Gejolak ekonomi global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perekonomian domestik. Perlambatan pertumbuhan di negara maju, ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, serta risiko geopolitik dapat berdampak pada ekspor, investasi, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia.
- Tingkat default nasabah berpotensi meningkat apabila kondisi ekonomi memburuk, terutama akibat tekanan suku bunga yang relatif tinggi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini berdampak pada kinerja portofolio pembiayaan, sehingga perusahaan perlu memperkuat sistem monitoring, penanganan nasabah bermasalah, serta strategi mitigasi risiko.
- Fluktuasi nilai tukar dan inflasi global juga menjadi risiko tambahan, yang dapat menekan biaya operasional dan memengaruhi harga barang konsumsi, termasuk sektor otomotif sebagai kontributor utama pembiayaan.
- Ancaman digital fraud dan keamanan data semakin relevan di era digitalisasi 2025, menuntut perusahaan untuk memperkuat kontrol internal dan sistem keamanan informasi.

4.7. Progres dan Strategi

1. Manajemen Risiko yang Komprehensif

- Perusahaan telah melengkapi kebijakan dan prosedur manajemen risiko dengan fokus utama pada pengurangan risiko kredit, operasional, serta risiko digital yang semakin relevan di era transformasi teknologi.
- Pemantauan portofolio dilakukan secara berkala, dengan perhatian khusus pada nasabah yang terdampak oleh tekanan suku bunga tinggi dan ketidakpastian global serta memastikan kondisi nasabah dapat terpantau lebih dini dan ditangani dengan langkah yang tepat dan cepat.
- Pendekatan proaktif sejak awal membantu Perusahaan dalam mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat, sekaligus menyusun strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi kerugian dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
- Integrasi teknologi dan memiliki basis data mendukung proses monitoring risiko secara real-time, sehingga pengambilan keputusan lebih informatif dan berbasis data.
- Kolaborasi lintas divisi (Risk, Operasional, Sisdur, IT, dan Legal) semakin diperkuat untuk memastikan manajemen risiko berjalan komprehensif, adaptif, dan sesuai regulasi OJK terbaru.

2. Optimalisasi Proses Operasional

- Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju, Perusahaan berhasil mengoptimalkan berbagai tahap proses operasional melalui sistem digital yang terintegrasi. Sistemisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kontrol internal dan akurasi data.
- Sistem pembayaran berbasis *payment point* terus diperluas, dengan jangkauan yang lebih luas dan sosialisasi yang intensif kepada nasabah dan peningkatan fitur pada *mobile apps*, *mobile collection system*, *core system scoring*, penambahan *cloud* dan meningkatkan keamanan server yang terhubung langsung dengan *core system* telah memudahkan proses pengajuan dan pencairan fasilitas pembiayaan secara lebih cepat dan transparan.
- Langkah digitalisasi ini mempercepat waktu penyelesaian proses, mengurangi potensi kesalahan manual, serta meningkatkan akurasi dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah sekaligus mendukung efisiensi operasional Perusahaan.
- Integrasi data dan analitik juga mulai diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan operasional, monitoring portofolio, serta evaluasi kinerja secara *real-time*.

3. Peningkatan Layanan Pelanggan

- Perusahaan terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dengan menyediakan informasi yang jelas dan transparan sejak awal proses pembiayaan hingga masa pembiayaan selesai. Perubahan digitalisasi layanan semakin memudahkan nasabah untuk memantau status pembiayaan secara *real-time* melalui aplikasi dan sistem terintegrasi.
- Peningkatan komunikasi dan penanganan yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan nasabah menjadi komitmen Perusahaan, sesuai regulasi OJK terbaru yang menekankan perlindungan konsumen. Hal ini diwujudkan melalui kanal layanan digital, call center interaktif, web, email serta sistem pengaduan yang lebih cepat dan terintegrasi.
- Solusi yang diberikan dengan tepat dan cepat dalam penyelesaian pembiayaan, pengambilan jaminan, maupun penanganan pengaduan, terbentuk hubungan baik dengan nasabah sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan dan berdampak dengan tumbuhnya bisnis Perusahaan.

4. Peningkatan Produktivitas

- Perusahaan telah menyesuaikan tugas dan tanggung jawab Karyawan dengan lebih terstruktur, berdasarkan kompetensi dan kemampuan masing-masing individu. Langkah ini dilakukan untuk mendukung strategi Perusahaan di tahun 2025 yang menekankan efisiensi, inovasi, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.
- Optimalisasi sumber daya manusia dilakukan melalui penempatan Karyawan sesuai posisi dan keahliannya, sehingga produktivitas meningkat dan proses operasional berjalan lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan transformasi digital yang menuntut keterampilan baru dalam penggunaan sistem dan teknologi.
- Peningkatan produktivitas keseluruhan berdampak positif terhadap Perusahaan, baik dalam hal efisiensi biaya, kualitas layanan, maupun pencapaian target bisnis. Dengan adanya sistem monitoring kinerja berbasis data, Perusahaan dapat memastikan setiap Karyawan berkontribusi optimal sesuai perannya.
- Program pengembangan SDM berkelanjutan seperti pelatihan digital, leadership, dan risk management semakin diperkuat di tahun 2025, untuk memastikan Karyawan siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan.

05

Unit Pendukung



5. Unit Pendukung

5.1. Teknologi dan Informasi

Optimalisasi dan Inovasi Teknologi Berkelanjutan

Seiring dengan selesainya berbagai penguatan infrastruktur dasar, KB Bukopin Finance kini memasuki fase optimalisasi dan inovasi berkelanjutan. Fokus utama perusahaan tidak lagi hanya pada digitalisasi proses, namun pada pemanfaatan teknologi secara cerdas untuk menciptakan nilai tambah bagi bisnis, memperkuat keamanan data, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih personal dan responsif bagi seluruh debitur.

Tujuan Strategis

1. Efisiensi melalui Otomasi

Mengurangi beban kerja manual melalui sistem yang terintegrasi, memastikan akurasi data yang lebih tinggi serta efisiensi biaya operasional.

2. Peningkatan Produktivitas

Menyediakan ekosistem kerja digital yang memungkinkan seluruh tim bekerja lebih cepat dengan risiko kesalahan yang minimal.

3. Customer-Centric Innovation

Menggunakan data dan *touchpoints* digital untuk merespons kebutuhan nasabah secara lebih adaptif dan instan.

4. Skalabilitas & Jangkauan Pasar

Memperluas akses pembiayaan melalui platform digital yang mampu menjangkau berbagai wilayah tanpa batasan fisik.

5. Mitigasi Risiko Proaktif

Memperkuat keamanan dan analisis risiko berbasis data untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika ekonomi.

Capaian Strategis 2025

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan infrastruktur inti. Seluruh inisiatif pada tahun ini telah terealisasi dengan sukses pada Semester 1 tahun 2025:

1. Modernisasi Infrastruktur & Networking

Peningkatan kualitas jaringan dan protokol keamanan untuk menjamin stabilitas sistem di seluruh lini perusahaan.

2. Optimalisasi Kapasitas (Capacity Planning)

Penguatan *Core System* dalam menangani lonjakan volume data transaksi dan kesiapan *backup* untuk mendukung peluncuran produk-produk baru.

3. Sentralisasi Data (Implementasi NAS)

Pengelolaan data kini dilakukan secara terpusat dan terstruktur melalui *Network Attached Storage*, yang mempermudah aksesibilitas serta menjamin keamanan penyimpanan data antar unit bisnis.

4. Enhancement Core System

Penyempurnaan sistem utama yang kini mendukung skema *In Advance* (ADDM), mekanisme subsidi bunga 0%, serta sentralisasi fungsi *Credit Analyst* melalui *Bucket CA* untuk efisiensi persetujuan kredit di seluruh cabang.



Arah Kebijakan & Rencana Kerja 2026 (Akselerasi Inovasi)

Memasuki tahun 2026, strategi Teknologi dan Informasi (TI) diarahkan pada penerapan teknologi mutakhir yang mendukung pertumbuhan bisnis secara agresif dan aman:

- 1. Pembaharuan & Upgrade Core System**
Pembaharuan menyeluruh pada modul-modul operasional utama untuk menciptakan proses bisnis yang lebih ramping, akurat, dan mampu beradaptasi dengan target bisnis yang lebih besar.
- 2. Implementasi Engine Scoring & Fast Approval**
Transformasi proses kredit melalui analitik tingkat lanjut yang memungkinkan penilaian risiko dilakukan secara presisi dan instan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat.
- 3. Penguatan Keamanan via Web Application Firewall (WAF)**
Adopsi sistem perlindungan berbasis *cloud* yang cerdas untuk memitigasi ancaman siber terhadap aplikasi dan data perusahaan secara *real-time*.
- 4. Ekosistem Omnichannel & Chatbot AI**
Pemanfaatan AI Chatbot yang terintegrasi dengan WhatsApp (Centang Biru) dan berbagai platform media sosial dalam satu portal terpadu. Inovasi ini memastikan layanan pelanggan dan fungsi penagihan (*collection*) berjalan lebih efisien, konsisten, dan responsif.

5.2. Sumber Daya Manusia

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan industri yang semakin masif dan mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Perseroan meyakini bahwa SDM yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi menjadi kunci dalam mewujudkan Visi, Misi, serta strategi Perseroan. Perseroan menerapkan proses rekrutmen yang selektif dan transparan untuk memperoleh Karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Dalam pengembangan kompetensi, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Karyawan melalui pelatihan internal (*in house*) maupun eksternal, termasuk seminar dan sertifikasi, sehingga masing-masing Karyawan dapat terus berkompetisi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.

Selain itu, fokus penilaian SDM Perseroan juga dilakukan dengan peningkatan kualitas melalui sistem penilaian kinerja yang diterapkan pada semua level Karyawan. Penetapan poin-poin penilaian target kinerja Karyawan ditetapkan berdasarkan objektivitas organisasi yang diturunkan ke unit kerja masing-masing, hingga ke level individu. Pengawasan dan penilaian kinerja dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kinerja setiap Karyawan. Dengan begitu, poin-poin penilaian yang hasilnya belum memuaskan dapat diperbaiki, sehingga target kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Perseroan juga mengelola sistem *reward* dan *punishment* sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada kinerja. *Reward* diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi Karyawan, sementara *punishment* diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu aktivitas kerja. Dengan demikian, setiap Karyawan dapat memahami pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Perseroan.



5.3. Komposisi Karyawan Berdasarkan Departemen

NO	Dept/Div	Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak		Karyawan Probation		Total		Grand Total
		Manajerial	Staf	Manajerial	Staf	Manajerial	Staf	Manajerial	Staf	
1	Bisnis	11	1	4	15	1	0	16	16	32
2	Unit Usaha Syariah	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Kredit	3	0	1	4	0	0	4	4	8
4	Manajemen Risiko	1	1	1	1	0	0	2	2	4
4	Collection & Remedial	7	5	4	8	0	0	11	13	24
5	HR & Corporate Secretary	2	1	0	1	0	0	2	2	4
6	Legal	2	1	0	0	0	0	2	1	3
7	Satuan Kerja Audit Internal / SKAI	2	1	0	0	0	0	2	1	3
9	Operasional	6	14	0	8	0	0	6	22	28
10	Accounting	2	0	0	3	0	0	2	3	5
11	Finance & Treasury	0	2	0	0	0	0	0	2	2
12	IT & General Affair	1	2	0	7	0	0	1	9	10
Grand Total		38	28	10	47	1	0	49	75	124

5.4. Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak		Karyawan Probation		Sub Total		Grand Total
	PENDIDIKAN	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kantor Pusat - Sub Total		42	11	14	12	1	0	57	23	80
1	Strata-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Strata-1	35	10	9	8	1	0	45	18	63
3	Diploma	7	1	0	1	0	0	7	2	9
4	SLTA	0	0	5	3	0	0	5	3	8
5	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Grha - Sub Total		6	5	30	3	0	0	36	8	44
1	Strata-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Strata-1	2	1	22	2	0	0	24	3	27
3	Diploma	2	4	4	1	0	0	6	5	11
4	SLTA	2	0	4	0	0	0	6	0	6
5	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		48	16	44	15	1	0	93	31	124

06

Tata Kelola Perusahaan



6. Tata Kelola Perusahaan

Dalam perkembangan di Sektor Jasa Keuangan yang pesat, tata kelola perusahaan yang baik (**Good Corporate Governance** atau **GCG**) menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memastikan keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan pembiayaan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (**Good Corporate Governance** atau **GCG**) merupakan struktur Organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha, mengoptimalkan nilai Perusahaan dan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan praktik GCG bertujuan untuk meraih kinerja yang optimal dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada etika tinggi serta kepatuhan terhadap setiap perundangan yang mengikat bisnis Perusahaan. Penerapan GCG dalam industri pembiayaan, sangat penting bagi Perusahaan untuk melaksanakan bisnis yang bertanggung jawab dan terpercaya.

Dalam usaha memajukan kinerja Perusahaan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perusahaan, serta meningkatkan ketaatan pada peraturan dan kode etik yang umumnya berlaku di industri jasa keuangan, Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

6.1. Implementasi GCG Didasarkan atas 5 Prinsip Dasar

1. Keterbukaan (**Transparency**), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan serta standard, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha pembiayaan secara sehat.
2. Akuntabilitas (**Accountability**), yaitu terdapatnya kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggung organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
3. Pertanggungjawaban (**Responsibility**), yaitu terdapatnya kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
4. Kemandirian (**Independency**), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
5. Kesenjajaran dan Kewajaran (**Fairness**), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan

6.2. Tujuan Implementasi GCG

Implementasi prinsip-prinsip GCG memiliki tujuan antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perseroan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan Anggaran Dasar, etika bisnis, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Meningkatkan kepatuhan organ Perseroan serta jajaran dibawahnya agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan hidup.
6. Sebagai pedoman bagi Perseroan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
7. Sebagai pedoman bagi Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
9. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

6.3. Dasar Acuan Implementasi GCG

Perseroan menerapkan dan melaksanakan GCG sebagaimana diwajibkan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru dengan Nomor 48/POJK/2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dimana sebelumnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020.

Dalam menerapkan dan melaksanakan GCG, PT KB Bukopin Finance telah menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan OJK No. 48/POJK/2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan melaporkan Transparansi Penerapan GCG diantaranya meliputi aspek:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, program kerja dan realisasi program kerja dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Manajemen Risiko, Komite, Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah dan Komite Pengarah Teknologi Informasi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite.
5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.
6. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
7. Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.
8. Penanganan benturan kepentingan.

9. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perseroan sesuai ketentuan.
11. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
12. Pengungkapan kepemilikan saham bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
13. Penerapan etika bisnis.
14. Kebijakan pembiayaan.
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
16. Sistem *Whistleblowing*.
17. Pengungkapan hal-hal penting lainnya.

Hasil Laporan Penerapan Transparansi Penerapan GCG, tidak terdapat kekurangan sehingga tidak memerlukan rencana tindak (*action plan*) atas kekurangan penerapan Tata Kelola.

Penerapan prinsip GCG Perusahaan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun berdasarkan pada POJK yang terbaru.

6.4. Assessment Implementasi GCG

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan telah melakukan penilaian sendiri faktor GCG untuk posisi 31 Desember 2025 dengan hasil nilai Peringkat Kesehatan yaitu PK-2.

Perusahaan secara berkala melakukan pengukuran atas penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas penerapan Tata Kelola dapat terjaga dan mengalami peningkatan dan juga sebagai pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Perusahaan.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:

1. Penerapan prinsip GCG pada Perseroan;
2. Kecukupan Tata Kelola atas struktur (*Governance Structure*), proses (*Governance Process*), dan hasil penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada Perseroan; dan
3. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Dari aspek faktor Tata Kelola, Pelaksanaan Tata Kelola dinilai pada peringkat 2 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG.

Hasil Penilaian Sendiri Untuk Tata Kelola Perusahaan

Peringkat	Keterangan
2	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yaitu Baik, secara umum Manajemen Perusahaan telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, mencakup struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>) maupun hasil (<i>outcome</i>) dari tata kelola Perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

- a. Secara umum, aspek jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan.
- b. Memiliki unit pengendali internal diantaranya, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Memiliki Komite Audit dan Komite Lainnya yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2. Proses Tata Kelola (Governance Process)

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi.
- b. Menerapkan strategi bisnis dengan menyusun “Rencana Bisnis Tahunan” atau “RBT” dan *Corporate Plan* serta melakukan monitoring atas pencapaian/realisasinya.
- c. Pelaksanaan fungsi Komite Audit dan Komite lainnya telah berjalan dengan baik sehingga membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (Governance Outcome)

- a. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam mengambil keputusan.
- b. Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Perusahaan.
- c. Melakukan transparansi kondisi Laporan Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan.

6.5. Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG merupakan prinsip-prinsip dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing perseroan yang berkelanjutan.

Proses implementasi infrastruktur Tata Kelola mengacu pada penerapan *Code of Conduct*, piagam (*Charter*), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Adapun infrastruktur Tata Kelola yang telah dimiliki oleh Perusahaan antara lain:

1. Pedoman kerja dan kode etik Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
3. Pedoman Manajemen Risiko
4. Pedoman Kepatuhan
5. Pedoman Etika Bisnis (*Code of Conduct*)
6. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)
8. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
9. Pedoman Komite Pemantau Risiko
10. Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi
11. Kebijakan internal terkait Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
12. Kebijakan internal terkait penyusunan Rencana Bisnis

13. Pedoman Penerapan APU-PPT dan PPSPM
14. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
15. Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
16. Pedoman Benturan Kepentingan
17. Pedoman Anti Fraud
18. Pedoman Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
19. Pedoman Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
20. Pedoman Perlindungan Data Pribadi

6.6. Struktur dan Mekanisme GCG

Organ Perseroan berperan penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Masing-masing Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. Organ Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi dalam organisasi Perseroan. RUPS memiliki hak untuk membuat keputusan tertentu, termasuk diantaranya mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, membuat keputusan menyangkut tindakan dan keputusan Perseroan yang menjadi kewenangan RUPS.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menguraikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Peraturan mengenai RUPS juga terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun untuk membahas agenda rutin sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk memutuskan agenda-agenda tertentu.

Selama tahun 2025, Perseroan mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris adalah atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ataupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan atas dasar prinsip-prinsip GCG.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perseroan yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dan menjamin seluruh produk, jasa layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

6.7. Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh:

- a) Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- b) Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c) Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian dan evaluasi atas setiap risiko yang ada di PT KB Bukopin Finance dalam rangka menilai kecukupan risiko.

Organ pendukung Direksi terdiri dari:

a) Komite Manajemen Risiko

Sebagai implementasi dari POJK NO.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 097/SK-DIREKSI/BUFIN/IX/2022 telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Perusahaan. Dimana salah satu tugasnya, yakni melakukan evaluasi perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, dengan menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.

b) Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Sebagai implementasi dari POJK No 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 102/SK-DIREKSI/BUFIN/XII/2022 telah dibentuk Komite Produk dan Pengembangan kegiatan Usaha Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

- Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha syariah Perseroan.
- Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran, pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko.
- Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c) Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas membantu direksi dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis TI yang mendukung model bisnis pembiayaan, menjamin keselarasan antara strategi TI dengan strategi bisnis secara kepatuhan regulasi OJK dan kebutuhan pasar.

d) Komite Kedisiplinan

Komite Kedisiplinan merupakan organ Perusahaan yang bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi adanya indikasi pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan atas tindakan yang merugikan konsumen dan Perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

e) Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite di bawah Direksi yang bertugas untuk membuat keputusan kredit sesuai risk appetite dan pedoman serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku guna memastikan optimalisasi dan meminimalkan risiko pemberian kredit yang dilakukan oleh Perseroan.

f) Satuan Kerja Audit Internal

Merupakan bagian dari organ GCG yang bertugas untuk menjaga seluruh perencanaan, regulasi dan semua kebijakan Perusahaan agar visi, misi dan tujuan Perusahaan dapat tercapai.

Audit Internal berfungsi untuk melaksanakan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian internal, efektivitas sistem pengendalian, serta kualitas atas kinerja meski masih perlu perbaikan dalam prosesnya, selain itu juga berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses Tata Kelola Perusahaan.

g) Sekretaris Perusahaan

Merupakan bagian dari pendukung Direksi yang berperan dalam memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Sekretaris Perusahaan juga bertugas membangun komunikasi internal dan eksternal yang efektif dengan para pemangku kepentingan serta bertanggung jawab dalam menjaga citra dan reputasi Perusahaan.

h) Unit Kerja Manajemen Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan pembiayaan dan Perusahaan pembiayaan syariah

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan meliputi:

- 1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kecukupan Kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- 4) Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.

i) Unit Kerja Kepatuhan

Pada periode tahun 2022, Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tanggung jawab antara lain yaitu:

1. Memastikan bahwa Perusahaan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan.

6.8. Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan maka dewan komisaris membentuk komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Komite dibawah Dewan Komisaris yang dimiliki Perseroan saat ini adalah:

- Fungsi dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pegendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- Fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
- Fungsi dari Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian dan evaluasi atas setiap risiko yang ada di PT KB Bukopin Finance dalam rangka menilai kecukupan risiko.

6.9. Literasi dan Inklusi Keuangan

Perusahaan menjalankan amanat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam memberikan dampak positif terhadap tingkat Literasi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan program Literasi dan Inklusi Keuangan, Perusahaan telah berupaya turut serta mendorong Literasi Keuangan untuk dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat secara finansial. Berikut informasi kegiatan yang telah dijalankan oleh Perusahaan selama tahun 2025, antara lain:

Edukasi Keuangan

Komitmen yang dijalankan Perseroan dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat dengan melaksanakan kegiatan edukasi keuangan melalui penyediaan produk dan/atau layanan berupa promosi produk pembiayaan konvensional dan syariah kepada >100 orang tenaga kesehatan di wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan pada Semester I tahun 2025 dengan tujuan pengembangan serta peningkatan pemanfaatan produk atau layanan kepada tenaga kesehatan.

Selain itu, pada Semester II tahun 2025, Perseroan melaksanakan kegiatan edukasi keuangan melalui perluasan akses layanan keuangan berupa penyediaan layanan transaksi debitur secara online kepada masyarakat umum. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan kemudahan customer dalam melakukan transaksi secara cepat, efektif, efisien dan transparan.

Literasi dan Inklusi

Komitmen yang dijalankan Perseroan dalam rangka peningkatan Literasi dan Inklusi di sektor jasa keuangan berlangsung dengan memberikan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai produk Perusahaan Pembiayaan termasuk pentingnya memahami hak, kewajiban, manfaat, risiko serta kiat-kiat pemanfaatan produk dan layanan pada Semester I tahun 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya pada Semester II tahun 2025, Perseroan kembali menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi kepada masyarakat umum dan para mahasiswa/i dengan memberikan pemahaman mengenai produk dan layanan pembiayaan dan pengelolaan keuangan syariah yang dilaksanakan di Kota Bogor, Jawa Barat.

6.10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Kepedulian dan keterlibatan perusahaan secara intens dalam dinamika sosial masyarakat akan mempengaruhi nilai yang konstruktif bagi Perusahaan.
- Tanggung jawab sosial Perusahaan diyakini memiliki efek positif bagi perkembangan dan pencitraan sebuah perusahaan dalam konteks yang luas.
- Tanggung jawab sosial Perusahaan tidak hanya berupa kepedulian sosial Perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga diharapkan mampu memberdayakan anggota masyarakat dalam kegiatan produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan.
- Sebagai perwujudan nyata dari tanggung jawab sosial, pada tahun 2025 melalui Unit Usaha Syariah telah melaksanakan program pemberian bantuan dana untuk pengembangan pendidikan serta santunan kepada anak-anak yatim dari Yayasan Rumah Yatim Arrohman yang berlokasi di Jakarta.



"Buka Puasa Bersama & Santunan"

KB Bukopin Finance dan Yayasan Yatim Arrohman
Jakarta

6.11. Penghargaan

6.11.1. KB Bukopin Finance berhasil meraih predikat "Sangat Bagus" dalam rating Multifinance Versi Infobank

KB Bukopin Finance berhasil meraih predikat "Sangat Bagus" dalam rating Multifinance Versi Infobank 2025 dan meraih penghargaan "The Most Accelerating Financing Growth" di Acara Pemberian Apresiasi 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski tanggal 1 Agustus 2025.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bapak Eko B. Supriyanto selaku Chairman Infobank Media Group dan Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

PT KB Bukopin Finance sangat berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Stakeholder, Karyawan dan Mitra Bisnis yang telah mendukung kesuksesan ini.

Pencapaian ini menjadi motivasi bagi KB Bukopin Finance untuk terus melangkah maju, menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan, inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.



"Sangat Bagus"

The Most Accelerating Financing Growth
PT KB Bukopin Finance

6.11.2. Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025

Di penghujung tahun 2025, KB Bukopin Finance kembali memperoleh prestasi dengan meraih 2 Penghargaan pada ajang bergengsi "Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025" yang diselenggarakan oleh Media Infobank.

Ke-2 Penghargaan Bergengsi Tersebut adalah:

"100 TOP CEO 2025"

Direktur Utama PT KB Bukopin Finance, Bapak Hendra Gunawan

"Future Leaders 2025"

Direktur | Operasional & Keuangan PT KB Bukopin Finance, Bapak Raden Ari Priyadi

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan para pemimpin Perusahaan di Indonesia dalam menunjukkan performa luar biasa, baik dari sisi kinerja keuangan, inovasi, maupun upaya transformasi yang telah dijalankan.

Apresiasi ini diberikan kepada para CEO atas kontribusi mereka terhadap organisasi dan lingkungan eksternal, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang unggul dan kompetitif.

Pencapaian ini kami persembahkan kepada seluruh Nasabah KB Bukopin Finance atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada Karyawan KB Bukopin Finance yang selalu menjadi bagian dari perjalanan kami.



"100 TOP CEO 2025"

Direktur Utama
PT KB Bukopin Finance
Bapak Hendra Gunawan



"Future Leaders 2025"

Direktur Operasional & Keuangan
PT KB Bukopin Finance
Bapak Raden Ari Priyadi

PT KB Bukopin Finance

Laporan Keuangan/
Financial Statements
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024

	<u>Halaman/ Page</u>
Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report	
Surat Pernyataan Direksi/Board of Directors' Statement	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/ FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2025 and 2024	
Laporan Posisi Keuangan/Statements of Financial Position.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.....	2
Laporan Perubahan Ekuitas/Statements of Changes in Equity.....	3
Laporan Arus Kas/Statements of Cash Flows.....	4-5
Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to the Financial Statements.....	6-53

Branch Office:

EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A
Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA

T +62-21-2283 6086
F +62-21-2283 6096

Laporan Auditor Independen

No. 00410/3.0478/AU.1/09/1671-5/1/IV/2026

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT KB Bukopin Finance**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT KB Bukopin Finance ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00410/3.0478/AU.1/09/1671-5/1/IV/2026

**The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT KB Bukopin Finance**

Opinion

We have audited the financial statements of PT KB Bukopin Finance (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mencatat piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah masing-masing sebesar Rp1.046.045.567.487, Rp24.908.333.332 dan Rp45.297.633.663, dan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah masing-masing sebesar Rp32.428.400.083, Rp173.441.000 dan Rp987.180.900 yang merepresentasikan saldo-saldo yang signifikan dalam laporan keuangan. Informasi kebijakan akuntansi material atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 2c dalam laporan keuangan terlampir.

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tersebut di atas, memerlukan pertimbangan dan estimasi yang signifikan oleh manajemen, yang mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Karena itu kami menganggap cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah sebagai hal audit utama.

Untuk merespon hal audit utama ini, kami melakukan prosedur audit berikut:

- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian yang relevan terkait proses pemberian, pencatatan dan pengawasan piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah, serta mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian tersebut, termasuk menguji efektivitas operasionalnya.
- Kami memperoleh pemahaman, menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, dan dasar data masukannya, serta menilai kewajaran atas asumsi signifikan yang digunakan oleh Perusahaan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai.
- Kami menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Perusahaan untuk piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah.

The key audit matter identified in our audit is described as follows:

Allowance for impairment losses on financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables

As at December 31, 2025, the Company recorded financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables amounted to Rp1,046,045,567,487, Rp24,908,333,332 and Rp45,297,633,663, respectively, and the allowance for impairment losses on these financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables amounted to Rp32,428,400,083, Rp173,441,000 and Rp987,180,900, respectively, which represented significant balances in the financial statements. The material accounting policy information of allowance for impairment losses of financial assets are disclosed in Note 2c to the accompanying financial statements.

Determination of allowance for impairment losses of the above-mentioned financial assets requires significant judgment and estimation by the management, which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models, including forward-looking macroeconomic factors.

Therefore, we considered the allowance for impairment losses on financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables as a key audit matter.

To address this key audit matter, we performed the following audit procedures:

- We obtained an understanding of controls relevant to the granting, recording and monitoring processes of financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables, and evaluated the design and implementation of such controls, including testing their operating effectiveness.
- We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validated allowance for impairment losses' models and its basis data input and assessed reasonableness of significant assumptions used by the Company in calculating the allowance for impairment losses.
- We tested the credit classification into three stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Company for financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables.

- Kami membandingkan pengalaman historis dengan keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisa faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah.
- Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.
- Kami menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.
- Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

- We compared the historical experience with the current circumstances and the recent losses incurred in the portfolios and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables.
- We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment for the entire portfolio.
- We assessed whether the financial statements disclosures are adequately and appropriately reflecting the Company's exposures to credit risk.
- We involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific skills are needed.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Denny Susanto
Izin Akuntan Publik No. AP. 1671/
Public Accountant License No. AP. 1671

28 April 2026/April 28, 2026



00410

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT KB BUKOPIN FINANCE
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT KB BUKOPIN FINANCE
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name : Hendra Gunawan
Alamat kantor/Office address : Gedung Bank Bukopin
Jl. Melawai Raya No. 66, Jakarta Selatan
Alamat domisili/Address of domicile : Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten
Nomor telepon/Telephone number : (021) 7260756
Jabatan/Position : Direktur Utama/President Director
2. Nama/Name : Raden Ari Priyadi
Alamat kantor/Office address : Gedung Bank Bukopin
Jl. Melawai Raya No. 66, Jakarta Selatan
Alamat domisili/Address of domicile : Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Nomor telepon/Telephone number : (021) 7260756
Jabatan/Position : Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KB Bukopin Finance;
1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT KB Bukopin Finance;
2. Laporan keuangan PT KB Bukopin Finance telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. The financial statements of PT KB Bukopin Finance have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT KB Bukopin Finance telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT KB Bukopin Finance tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. a. All information contained in PT KB Bukopin Finance's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT KB Bukopin Finance's financial statements do not contain material incorrect information or facts, nor do they omit any material information or facts;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT KB Bukopin Finance.
4. We are responsible for PT KB Bukopin Finance's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors
Jakarta, 28 April 2026/April 28, 2026


Hendra Gunawan
Direktur Utama/President Director


Raden Ari Priyadi
Direktur/Director



PT KB BUKOPIN FINANCE
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT KB BUKOPIN FINANCE
Statements of Financial Position
December 31, 2025 and 2024
(Figures are presented in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	68.430.101.077	4,20	56.826.135.076	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan - neto	1.013.617.167.404	5	552.843.703.069	Financing receivables - net
Tagihan anjak piutang - neto	24.734.892.332	6	24.497.686.183	Factoring receivables - net
Piutang pembiayaan murabahah - neto	44.310.452.763	7	8.815.681.782	Murabahah financing receivables - net
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	1.197.481.565	20	11.399.452	Related parties
Pihak ketiga	123.800.550		737.876	Third parties
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.258.209.091		1.743.927.954	Prepayments and advances
Aset tetap - neto	425.132.064		57.125.418	Fixed assets - net
Aset takberwujud - neto	374.534.835		672.746.089	Intangible assets - net
Aset hak-guna - neto	2.673.445.367		1.297.080.579	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	58.951.194	13	191.061.076	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	2.292.314.981	8	2.443.040.989	Other assets
TOTAL ASET	1.160.496.483.223		649.400.325.543	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	-	10	58.433.230.450	Trade payables - third parties
Pinjaman bank		9		Bank loans
Pihak berelasi	207.822.098.260	20	39.904.826.802	Related parties
Pihak ketiga	479.466.122.612		95.086.896.100	Third parties
Utang lain-lain		11		Other payables
Pihak berelasi	342.350.371	20	247.091.484	Related parties
Pihak ketiga	6.391.699.815		8.450.767.646	Third parties
Utang pajak	718.799.348	13	245.789.659	Taxes payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	3.342.917.118	12	4.526.531.035	Accrued liabilities
Liabilitas sewa	1.724.444.465		1.324.317.325	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	1.216.960.870	14	841.222.686	Employee benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	701.025.392.859		209.060.673.187	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp5.000.000 per saham				Share capital - par value of Rp5,000,000 per share
Modal dasar - 160.000 saham				Authorized - 160,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 159.446 saham	797.230.000.000	15	797.230.000.000	Issued and fully paid - 159,446 shares
Penghasilan komprehensif lain	653.294.209		760.198.521	Other comprehensive income
Akumulasi rugi	(338.412.203.845)		(357.650.546.165)	Accumulated losses
EKUITAS NETO	459.471.090.364		440.339.652.356	NET EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.160.496.483.223		649.400.325.543	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT KB BUKOPIN FINANCE
Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT KB BUKOPIN FINANCE
Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are presented in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan pembiayaan	83.462.704.194	16	33.981.753.521	Financing income
Denda dan penalti	3.693.395.202		3.960.687.175	Fine and penalty
Marjin murabahah	2.543.290.130		277.870.775	Murabahah margin
Penghasilan bunga	2.234.191.086		7.187.038.570	Interest income
Pendapatan jasa <i>channelling</i>	-		8.835.246	Channelling fees
Lain-lain	7.510.166.901		3.781.209.696	Others
TOTAL PENDAPATAN	99.443.747.513		49.197.394.983	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban gaji dan tunjangan	31.576.397.798	17	25.340.293.878	Salaries and allowances
Beban umum dan administrasi	14.274.209.593	18	13.695.722.389	General and administrative expense
Beban keuangan	35.604.161.915	19	1.060.942.698	Financing costs
Kerugian penyelesaian dan penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang dari aset yang diambil alih - neto	(213.610.656)		2.128.932.201	Loss on settlement and provision (recovery) for impairment of receivables from foreclosed of assets - net
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan - neto	(1.220.869.541)		(5.445.438.949)	Recovery for impairment losses on financing receivables - net
Lain-lain	22.853.704		(18.977)	Others
TOTAL BEBAN	80.043.142.813		36.780.433.240	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	19.400.604.700		12.416.961.743	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Tangguhan	(162.262.380)	13	39.010.741	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	19.238.342.320		12.455.972.484	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(137.056.810)	14	(53.136.268)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait	30.152.498	13	11.689.979	Related income tax
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(106.904.312)		(41.446.289)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR - NET OF TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.131.438.008		12.414.526.195	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT KB BUKOPIN FINANCE
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT KB BUKOPIN FINANCE
Statements of Changes in Equity
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are presented in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/Other comprehensive income (loss)	Akumulasi rugi/ Accumulated losses	Ekuitas neto/ Net equity
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024/ Balance as at January 1, 2024	797.230.000.000	801.644.810	(370.106.518.649)	427.925.126.161
Laba tahun berjalan/ Income for the year	-	-	12.455.972.484	12.455.972.484
Rugi komprehensif lain tahun berjalan/ Other comprehensive loss for the year	-	(41.446.289)	-	(41.446.289)
Total laba komprehensif tahun berjalan/ Total comprehensive income for the year	-	(41.446.289)	12.455.972.484	12.414.526.195
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024/ Balance as at December 31, 2024	797.230.000.000	760.198.521	(357.650.546.165)	440.339.652.356
Laba tahun berjalan/ Income for the year	-	-	19.238.342.320	19.238.342.320
Rugi komprehensif lain tahun berjalan/ Other comprehensive loss for the year	-	(106.904.312)	-	(106.904.312)
Total laba komprehensif tahun berjalan/ Total comprehensive income for the year	-	(106.904.312)	19.238.342.320	19.131.438.008
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025/ Balance as at December 31, 2025	797.230.000.000	653.294.209	(338.412.203.845)	459.471.090.364

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT KB BUKOPIN FINANCE
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT KB BUKOPIN FINANCE
Statements of Cash Flows
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are presented in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum manfaat				Income before income
(beban) pajak penghasilan	19.400.604.700		12.416.961.743	tax benefit (expense)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi				Adjustments to reconcile
laba sebelum manfaat				income before income
(beban) pajak penghasilan				tax benefit (expense)
menjadi kas neto yang				to net cash used in
digunakan untuk				operating activities:
aktivitas operasi:				Loss on settlement and
Kerugian penyelesaian dan				provision (recovery) for
penyisihan (pemulihan)				impairment losses of
penurunan nilai piutang				receivables from foreclosed
dari aset yang				of assets - net
diambil alih - neto	(213.610.656)		2.128.932.201	Depreciation expense
Beban penyusutan	1.588.557.107	18	1.332.051.724	Financing costs
Beban keuangan	35.604.161.915		1.060.942.698	Employee benefit expense
Beban imbalan kerja	269.457.073	14	178.441.654	Recovery for impairment
Pemulihan kerugian				losses on financing
penurunan nilai piutang				receivables - net
pembiayaan - neto	(1.220.869.541)		(5.445.438.949)	
Keuntungan atas				Gain on write-off and
penghapusan dan				disposal of fixed assets
penjualan aset tetap	-		(84.471.894)	Changes in operating
Perubahan atas aset				assets and liabilities:
dan liabilitas operasi:				Financing receivables
Piutang pembiayaan	(459.099.915.935)	24	(437.333.150.047)	Factoring receivables
Tagihan anjak piutang	36.480.487		3.680.412.895	Murabahah financing
Piutang pembiayaan				receivables
murabahah	(36.112.137.305)		(8.108.440.538)	Finance lease receivables
Piutang sewa pembiayaan	-		1.523.477.277	Other receivables
Piutang lain-lain	(1.309.144.787)		46.285.672.193	Prepayments and
Biaya dibayar dimuka				advances
dan uang muka	(514.281.137)		376.015.028	Other assets - refundable deposits
Aset lain-lain - uang jaminan	(38.000.000)		-	Trade payables
Utang usaha	(58.433.230.450)		58.433.230.450	Other payables
Utang lain-lain	(1.963.808.944)		2.582.898.083	Taxes payable
Utang pajak	473.009.689		174.271.928	
Liabilitas yang masih				Accrued liabilities
harus dibayar	(1.806.389.965)		1.238.597.754	
Penerimaan neto dari				Net proceeds from settlement
penyelesaian melalui				through sale of receivables
penjualan piutang dari				from foreclosed assets
aset yang diambil alih	293.337.496		2.653.375.176	Payments of interest
Pembayaran beban				expenses on bank loans
bunga pinjaman bank	(32.140.414.871)		(436.222.089)	Payment of employee benefits
Pembayaran imbalan kerja	(30.775.699)	14	-	
Kas neto yang digunakan				Net cash used in
untuk aktivitas operasi	(535.216.970.823)		(317.342.442.713)	operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(405.765.973)		(48.337.820)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset takberwujud	(253.550.000)		(304.678.350)	Acquisition of intangible assets
penjualan aset tetap	-		86.831.532	Proceeds from sale of fixed assets
Kas neto yang digunakan				Net cash used in
untuk aktivitas investasi	(659.315.973)		(266.184.638)	investing activities

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are
an integral part of these financial statements.

PT KB BUKOPIN FINANCE
Laporan Arus Kas (lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT KB BUKOPIN FINANCE
Statements of Cash Flows (continued)
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are presented in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	805.500.000.000	24	140.000.000.000	Proceeds of bank loans
Pembayaran pinjaman bank	(251.989.550.838)	24	(3.970.512.218)	Payments of bank loans
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	(3.935.946.921)	24	(1.075.000.000)	Payments of loan transaction cost
Pembayaran liabilitas sewa	(1.975.274.177)	24	(766.054.802)	Payments of lease liabilities
Pembayaran bunga sewa	(118.975.267)	19	(71.385.198)	Payments of lease interest
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	547.480.252.797		134.117.047.782	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	11.603.966.001		(183.491.579.569)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	56.826.135.076		240.317.714.645	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	68.430.101.077	4	56.826.135.076	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of these financial statements.

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT KB Bukopin Finance ("Perusahaan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Leasing Indo Corporation, berdasarkan Akta Notaris Tan A, Sioe, S.H., No. 05 tanggal 11 Maret 1983. Akta Pendirian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5233. HT.01.01.Th.83. tanggal 29 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1986, Tambahan No. 432. Pada tanggal 28 Juni 2021, nama Perusahaan diubah dari PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Linsia, S.H., M.Kn., No. 1092 tanggal 25 Oktober 2023, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0134039 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 22 Maret 2024, Tambahan No. 9434.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 66/KMK.017/1994 tanggal 5 Maret 1994 dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam surat No. 674/NB.223/2016 tanggal 28 September 2016 untuk unit usaha syariah. Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan konvensional dan di bidang pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan kegiatan usaha syariah, meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah mutanaqisah, ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Gedung Bank Bukopin, Jl. Melawai Raya No. 66, Kebayoran Baru, Jakarta.

Perusahaan mulai aktif beroperasi secara komersial pada tahun 1983.

1. General

a. Establishment of the Company and General Information

PT KB Bukopin Finance (the "Company") was established in Jakarta under the name of PT Leasing Indo Corporation, based on the Notarial Deed No. 05 of Tan A, Sioe, S.H., dated March 11, 1983. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-5233.HT.01.01.Th.83. dated July 29, 1983 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 26 dated April 1, 1986, Supplement No. 432. On June 28, 2021, the Company's name was changed from PT Bukopin Finance to PT KB Bukopin Finance.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 1092 of Linsia, S.H., M.Kn., dated October 25, 2023, in connection with increase in the Company's issued and paid-up capital. The amendment deed has been reported and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic Indonesia in its Acceptance Letter No. AHU-AH.01.03-0134039 dated October 27, 2023 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 24 dated March 22, 2024, Supplement No. 9434.

The Company obtained business license as financing company from Minister of Finance of Republic of Indonesia in his decision letter No. 66/KMK.017/1994 dated March 5, 1994 and license from Financial Services Authority in its letter No. 674/NB.223/2016 dated September 28, 2016 for sharia business unit. In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the Company's purpose is to conduct business in conventional financing and sharia financing. Conventional financing is engaged in preparing fund and capital goods, among others lease financing, factoring receivable and consumer financing. Sharia financing business activities engaged in murabahah financing, mudharabah, musyarakah mutanaqisah, ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik.

The Company's head office is located at Gedung Bank Bukopin, Jl. Melawai Raya No. 66, Kebayoran Baru, Jakarta.

The Company commenced its commercial operation in 1983.

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	H. Sunaryono
Independen	Ridwan Widjio Julianto
Komisaris	
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Hendra Gunawan
Direktur	Fajar Satritama
Direktur	Raden Ari Priyadi
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	H. Sunaryono
Anggota	Ridwan Widjio Julianto
Anggota	Gigih Aryandanu
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>	
Ketua	Moch. Bukhori Muslim
Anggota	-

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 64 dan 60 karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 28 April 2026.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

1. General (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024
<u>Board of Commissioners</u>	
Independent President	H. Sunaryono
Commissioner	Agustinus Iwan Christanto
Commissioner	
<u>Board of Directors</u>	
President Director	Hendra Gunawan
Director	Fajar Satritama
Director	Raden Ari Priyadi
<u>Audit Committee</u>	
Chairman	H. Sunaryono
Member	Agustinus Iwan Christanto
Member	Gigih Aryandanu
<u>Sharia Supervisory Board</u>	
Chairman	Moch. Bukhori Muslim
Member	Hasbi Mauriza Hasyim

As at December 31, 2025 and 2024, the Company has a total of 64 and 60 permanent employees (unaudited), respectively.

c. Completion of the Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of these financial statements that were completed and authorized for issue on April 28, 2026.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Preparation and Presentation of the Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and regulations of Financial Services Authority for entities under its control.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2025.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus mempertahankan kelangsungan usahanya.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perusahaan memilih menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan pertimbangan kritis akuntansi dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada Catatan 3 serta pengelolaan modal pada Catatan 22.

b. Standar Akuntansi Baru

Amendemen dan standar akuntansi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 tentang Informasi Komparatif";
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran".

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Basis of Preparation and Presentation of the Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2024, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2025.

The Company has prepared the financial statements on the basis that the Company will continue to operate as a going concern.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The statements of cash flow are prepared based on indirect method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

The Company elected to present one single statement of profit or loss and other comprehensive income and disclosed critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 22.

b. New Accounting Standards

New and amendments on accounting standards issued and effective for the financial year beginning on or after January 1, 2025 which do not have a material impact to the financial statements of the Company are as follows:

- PSAK No. 117, "Insurance Contract";
- Amendment to PSAK No. 117, "Insurance Contract - Initial Adoption of PSAK No. 117 and PSAK No. 109 about Comparative Information";
- Amendment to PSAK No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Lack of Exchangeability".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

Standar baru dan amendemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan : Kontrak Yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam";
- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan", PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan", PSAK No. 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas";
- PSAK No. 338 (Revisi 2025), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2027:

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan";
- PSAK No. 119, "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik : Pengungkapan";
- PSAK No. 413, "Penurunan Nilai - Aset Keuangan Syariah dan Pengakuan Provisi Kafalah Penjaminan Risiko Kredit";
- PSAK No. 414, "Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat".

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan amendemen dan standar akuntansi baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

b. New Accounting Standards (continued)

New standards and amendments issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2025 that may have certain impact on the financial statements are as follows:

Effective on or after January 1, 2026:

- Amendments to PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instrument";
- Amendment to PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosure : Contracts Referencing Nature - Dependent Electricity";
- 2024 Annual Improvements to PSAK No. 107, "Financial Instruments - Disclosures", PSAK No. 109, "Financial Instruments", PSAK No. 110, "Consolidated Financial Statements" and PSAK No. 207, "Statement of Cash Flows";
- PSAK No. 338 (Revised 2025), "Business Combinations of Entities Under Common Control".

Effective on or after January 1, 2027:

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements";
- PSAK No. 119, "Subsidiaries without Public Accountability : Disclosures";
- PSAK No. 413, "Impairment - Sharia Financial Assets and the Recognition of Kafalah Provisions for Credit Risk Guarantees";
- PSAK No. 414, "Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Applying Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities".

The Company is assessing the impact of these new and revised accounting standards to the Company's financial statements.

c. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah yang semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Seluruh aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL dan FVTOCI.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi; dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset.

ii. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

All of the Company's financial assets are classified as financial assets measured at amortized cost. The Company has no financial asset measured at FVTPL and FVTOCI.

Financial assets measured at amortized cost are initially measured at fair value plus transaction cost; and subsequently measured at cost which is amortized using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset.

ii. Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities measured at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Seluruh liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi untuk liabilitas keuangan yang tidak diukur pada FVTPL. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal, diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Financial Instruments (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

All of the Company's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at FVTPL.

All financial liabilities are initially recognized at fair value, including transaction costs, for financial liabilities not measured at FVTPL. Financial liabilities measured at amortized cost, after initial recognition, are subsequently measured at cost which is amortized using the EIR method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Company recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur cadangan penurunan nilai aset keuangan menggunakan ECL 12 bulan (*Stage 1*). Perusahaan mengukur cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan menggunakan ECL lifetime jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage 2*) atau mengalami penurunan nilai kredit (*Stage 3*). Jika tidak, perusahaan terus mengukur cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan ECL 12 bulan (*Stage 1*).

ECL 12 bulan & ECL lifetime

ECL 12 bulan adalah ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar aset keuangan yang terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). *ECL lifetime* adalah ECL yang diakibatkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan umur aset keuangan.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (*Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3*) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada tanggal pelaporan.

Stage 1: mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung. Aset keuangan yang dikategorikan sebagai *Stage 1* adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 hari.

Stage 2: mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit, namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* diakui. Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai *Stage 2* adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31 - 90 hari.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

At the initial recognition, the Company measured allowance of impairment of financial assets using 12-months expected credit losses (*Stage 1*). The Company measured allowance of impairment losses of financial assets using lifetime expected credit losses if there's significant increase in credit risk (*Stage 2*) or become credit impaired (*Stage 3*). Otherwise, the Company continue to measure allowance of impairment losses of financial assets using 12-months expected credit losses (*Stage 1*).

12 Months & Lifetime ECL

12-month ECLs are the ECLs that result from default events on a financial asset within 12 months after the reporting date (or a shorter period if the expected life of the financial assets are less than 12 months). Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of the financial assets.

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (*Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3*) by determining whether a significant increase in credit risk has occurred on financial assets since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Stage 1: includes financial assets that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL are recognized. Financial assets categorized as *Stage 1* is financial assets with days overdue less or equal than 30 days.

Stage 2: includes financial assets that have had a significant increase in credit risk but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognized. Financial assets considered to experience significant increase in credit risk and categorized as *Stage 2* is financial assets with days overdue 31 - 90 days.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Stage 3: termasuk aset keuangan yang memiliki bukti obyektif atas penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Stage ini memiliki obligor yang sudah mengalami penurunan nilai (*default*). Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Stage 3 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan lebih dari 90 hari.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan ECL 12 bulan (*Stage 1*) atau ECL *lifetime* (*Stage 2*) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada tanggal pelaporan.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya ditambah atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai aset keuangan yang tercatat melebihi biaya perolehan diamortisasi seandainya penurunan nilai tersebut tidak diakui pada saat tanggal pemulihan penurunan nilai. Pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 3: includes financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already are impaired (defaulted). Financial assets categorized as Stage 3 is financial assets with days overdue more than 90 days.

The key factor in determining whether a financial assets needs 12-month (*Stage 1*) or lifetime ECL (*Stage 2*) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). Determining significant increase in credit risk (SICR) criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at reporting date.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced (recovered) by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

d. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposit with maturities within three months or less which are not restricted in use and that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value.

e. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses in each of reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss, unless non-financial assets carried at revalued amounts.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam angka (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to Company;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or parent of the entity);
 - (viii) entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, provides services to the key management personnel of the Company or to the parent entity of the Company.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

g. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year.

Management periodically evaluates positions taken in Annual tax returns (SPT) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

h. Imbalan Kerja

Perhitungan estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan metode penilaian aktuarial "*Projected Unit Credit*".

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

g. Income Taxes (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

h. Employee Benefits

The calculation of estimated employee benefits expense and liabilities under the Law is determined using the "Projected Unit Credit" valuation method.

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Actuarial gain and losses;
- ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest;
- iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

h. Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyelesaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada penghasilan komprehensif lainnya pada tahun di mana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

i. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Ketika Perusahaan mengharapkan sebagian atau seluruh provisi diganti, maka penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah tetapi hanya pada saat timbul keyakinan penggantian pasti diterima. Beban yang terkait dengan provisi disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai pengantiannya.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan memberikan layanan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau memperoleh manfaat dari penggunaan layanan tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi pada suatu waktu atau seiring waktu. Jika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dari waktu ke waktu, pendapatan diakui berdasarkan persentase penyelesaian yang mencerminkan kemajuan menuju pemenuhan kewajiban pelaksanaan tersebut.

Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

h. Employee Benefits (continued)

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

Actuarial gain and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

i. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Where the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in the profit or loss net of any reimbursement.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

j. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when the Company satisfies a performance obligation by extending a service to the customers, which is when the customers obtain control of the goods or derived benefits from the usage of the service. A performance obligation may be satisfied at a point in time or over time. If a performance obligation is satisfied over time, the revenue is recognized based on the percentage of completion reflecting the progress towards complete satisfaction of that performance obligation.

The amount of revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Kriteria pengakuan khusus berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan

Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan disajikan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik pihak-pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama. Pendapatan bunga dicatat dengan metode akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Margin murabahah merupakan pendapatan dari transaksi piutang pembiayaan murabahah yang diakui dengan metode akrual.

Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga pembiayaan yang piutangnya telah lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari. Pendapatan bunga yang telah diakui selama 90 hari tetapi belum tertagih, dibatalkan pengakuannya. Pendapatan tersebut akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran piutang diterima.

Pendapatan denda dan penalti

Pendapatan penalti dari biaya keterlambatan dan penghentian lebih awal diakui pada saat diterima.

Beban diakui atas dasar akrual.

k. Akuntansi Piutang Pembiayaan, Anjak Piutang dan Pembiayaan Murabahah

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang dari transaksi pembiayaan dibahas dalam Catatan 2c.

Akuntansi piutang pembiayaan

Piutang pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Piutang pembiayaan disajikan pada jumlah piutang neto setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

j. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled under contract with customer and excluding amounts collected on behalf of third parties.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Interest income from financing activities

Interest income from consumer financing activities is presented net of with financing income belongs to the other parties in relation with channelling and joint financing transactions. Interest income recorded on an accrual basis using the effective interest rate method.

Murabahah margin represents of income from murabahah financing receivables which are recognized on accrual method.

The Company does not recognize financing interest income on receivables that are overdue for more than 90 days. The interest income previously recognized during the 90 days but not yet collected is reversed against interest income. Such income is recognized only when the overdue receivable is collected.

Fine and penalty income

Penalty income from late charges and early termination is recognized at a point in time when received.

Expenses are recognized on accrual basis.

k. Accounting for Financing Receivables, Factoring and Murabahah Financing

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, impairment and derecognition of receivables from financing transactions are discussed in Note 2c.

Accounting for financing receivables

Financing receivables are derived after deducting the part that have been financed by banks in connection with joint financing agreements. Financing receivables are presented net of amounts of receivables after deducting unearned financing income and allowance for impairment losses on financing receivables.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

k. Akuntansi Piutang Pembiayaan, Anjak Piutang dan Pembiayaan Murabahah (lanjutan)

Akuntansi piutang pembiayaan (lanjutan)

Penyelesaian kontrak sebelum masa piutang pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak piutang pembiayaan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Akuntansi anjak piutang

Anjak piutang *with recourse* diakui sebesar tagihan anjak piutang dikurangi pendapatan anjak piutang yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara tagihan anjak piutang *with recourse* dengan jumlah pembayaran ke nasabah diakui sebagai pendapatan anjak piutang yang belum diakui, yang akan diakui sebagai pendapatan anjak piutang berdasarkan proporsi waktu selama periode kontrak menggunakan tingkat suku bunga efektif.

Akuntansi pembiayaan murabahah

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin). Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang pembiayaan murabahah.

Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan piutang pembiayaan.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi margin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

k. Accounting for Financing Receivables, Factoring and Murabahah Financing (continued)

Accounting for financing receivables (continued)

Early termination is treated as a cancellation of the existing contract financing receivables and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Accounting for factoring

Factoring receivables with recourse are stated at the outstanding balance less the unearned factoring income and the allowance for impairment losses.

The difference between factoring receivables with recourse and total payment to customer are recognized as unearned factoring income which will be recognized based on the proportion of time in the period of contract using the effective interest rate method.

Accounting for murabahah financing

Murabahah is a sell-buy goods contract with selling price amounting to acquisition cost plus agreed profits and the Company must disclose the cost to consumer.

When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognized over the year of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Substantially, murabahah contract is a financing transaction, so that margin recognition is carried out based on the standards which regulate financing transaction, as mentioned in financing receivables policies.

At the end of the financial reporting period, murabahah financing receivables are stated at their net realizable value, which are the balance of murabahah receivables less deferred margin and allowance for impairment losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

k. Akuntansi Piutang Pembiayaan, Anjak Piutang dan Pembiayaan Murabahah (lanjutan)

Pembiayaan bersama

Dalam pembiayaan bersama antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga/margin yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga/margin yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama.

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan dan piutang pembiayaan murabahah di laporan posisi keuangan (pendekatan neto).

Pendapatan piutang pembiayaan dan pendapatan margin murabahah disajikan di laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

l. Piutang dari Aset yang Diambil Alih

Piutang dari aset yang diambil alih merupakan piutang yang berasal dari aset yang diagunkan milik pelanggan yang diambil alih untuk pelunasan piutang pembiayaan yang disajikan neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto aset yang diambil alih dicatat sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai piutang aset yang diambil alih dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pembalikan penurunan nilai piutang dari aset yang diambil alih diakui dalam laba rugi. Piutang aset yang diambil alih dicatat sebagai bagian dari aset lain-lain.

Beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan piutang dari aset yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selisih antara nilai tercatat piutang dari aset yang diagunkan dengan hasil penjualan aset yang diambil alih untuk melunasi piutang diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penyelesaian piutang dari aset yang diambil alih pada saat penjualan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

k. Accounting for Financing Receivables, Factoring and Murabahah Financing (continued)

Joint financing

In joint financing arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates/margin to consumer than the interest rates/margin stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider.

All joint financing contracts entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments are recorded as financing receivables and murabahah financing receivables in the statement of financial position (net approach).

Financing receivables income and murabahah margin income is presented in the statement of profit or loss after deducting the portions which belong to other parties participating to these joint financing transactions.

l. Receivables from Foreclosed Assets

Receivables from foreclosed assets represent receivables derived from collateralized assets owned by customers for settlement of their financing receivables, which is presented net of allowance for impairment losses. The difference between the carrying amount and the net realizable value of the foreclosed assets is recorded as allowance for impairment of receivables from foreclosed assets and is charged to the current year profit or loss.

A reversal of an impairment of receivables from foreclosed assets is recognized immediately in profit or loss. Receivables from foreclosed assets are recorded as part of other assets.

Expenses in relation with the acquisition and maintenance of receivables from foreclosed assets are charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The difference between the carrying amount of receivables from collateralized assets and the related proceeds from sale of foreclosed assets to settle the receivables is recognized as gain or loss from settlement of receivables from foreclosed assets at the time of sale.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan, jika ada.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi.

Kenaikan Signifikan pada Risiko Kredit ("SICR")

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset *Stage 1*, atau ECL seumur hidup untuk aset *Stage 2* atau *Stage 3*. Suatu aset bergerak ke *Stage 2* ketika risiko kreditnya meningkat secara signifikan sejak awal pengakuan. PSAK No. 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi *forward-looking* yang wajar dan mendukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

m. Event After Reporting Period

Any post period-end events that need adjustments and provide additional information about the Company's position at the reporting date (*adjusting event*) are reflected in the financial statement, if any.

Any post period-end events that is not an adjusting event is disclosed in the noted to the financial statements when material.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Instruments

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 109.

Significant Increase in Credit Risk ("SICR")

Expected credit losses (ECL) are measured as an allowance equal to 12-month ECL for Stage 1 assets, or lifetime ECL for Stage 2 or Stage 3 assets. An asset moves to Stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are described below.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

PSAK No. 109 mensyaratkan pencantuman informasi tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan. Estimasi perubahan kerugian kredit ekspektasian harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data observasi terkait dari periode ke periode. Perhitungan ECL membutuhkan estimasi *forward-looking Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), *Exposure At Default* (EAD) dan *Macro-Economic Variables* (MEV).

***Probability of Default* (PD)**

PD adalah kemungkinan seorang konsumen akan gagal bayar yang terjadi pada waktu tertentu. PD yang digunakan dalam PSAK No. 109 adalah *PD point in time* yang menggambarkan PD yang terjadi pada suatu kondisi ekonomi. PD yang dihitung sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (PD 12 bulan) digunakan untuk perhitungan ECL dari aset yang dikategorikan *Stage 1*, sementara PD yang dihitung sepanjang umur aset (*PD lifetime*) digunakan untuk perhitungan ECL dari aset yang dikategorikan *Stage 2* dan *Stage 3*.

***Loss Given Default* (LGD)**

LGD adalah kerugian yang diperkirakan akan timbul pada konsumen yang mengalami gagal bayar, dengan memperhitungkan dampak dari asumsi ekonomi di masa mendatang yang relevan dimana hal ini menggambarkan perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima Perusahaan. Biasanya, LGD disajikan sebagai suatu nilai persentase dari EAD. Perusahaan memperkirakan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan akun yang gagal bayar dengan memperhitungkan tingkat pembayaran yang diterima serta pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan (jika relevan).

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for Expected Credit Losses ("ECLs")

PSAK No. 109 requires inclusion of information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of ECL requires estimation of *forward-looking Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), *Exposure At Default* (EAD) and *Macro-Economic Variables* (MEV).

***Probability of Default* (PD)**

PD is the probability that a consumer will default in which happened at certain time. PD used in PSAK No. 109 is *PD point in time* which represent PD at a certain economy condition. PD is calculated until next 12 months after reporting period (12-month PD), is used to calculate ECL from assets categorized as *Stage 1*, while PD calculated during the lifetime of assets (*Lifetime PD*), is used to calculate ECL from assets categorized as *Stage 2* and *Stage 3*.

***Loss Given Default* (LGD)**

LGD is the loss that is expected to arise on default consumer, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions, which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. Usually, LGD was presented as percentage to *Expected at Default* (EAD). The Company estimates LGD based on the historical recovery of default consumer by considering the payment received and the recovery of any collateral of financial assets, taking into account forward looking economic assumptions (if relevant).

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL") (lanjutan)

Exposure at Default (EAD)

Perkiraan nilai buku pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan profil arus kas aset keuangan selama umur aset keuangan. Hal ini juga memperhitungkan pembayaran, baik pokok maupun bunga.

Macro-Economic Variables (MEV)

MEV merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan kondisi perekonomian yang diharapkan di masa depan. MEV digunakan sebagai faktor untuk melakukan penyesuaian terhadap PD dan LGD terkait dampak perubahan kondisi perekonomian di masa mendatang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses ("ECLs") (continued)

Exposure at Default (EAD)

The expected statement of financial position exposure at the time of default, taking into account the cash flow profile of financial assets during the life time of the financial assets. This incorporates the impact of repayments, both principal and interest.

Macro-Economic Variables (MEV)

MEV is one of main component in determining the expected economy condition in the future. MEV is used as factor to perform adjustment on PD and LGD related to impact of change of economy condition in the future.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimations of whether additional corporate income tax will be due.

4. Kas dan Setara Kas

	2025
<u>Kas</u>	
Rupiah	11.500.000
<u>Kas di bank - Rupiah</u>	
Pihak berelasi (Catatan 20)	7.482.980.956
Pihak ketiga	2.035.620.121
Sub-total	9.518.601.077
<u>Deposito berjangka - Rupiah</u>	
Pihak berelasi (Catatan 20)	30.000.000.000
Pihak ketiga	28.900.000.000
Sub-total	58.900.000.000
Total	68.430.101.077
Tingkat suku bunga deposito per tahun	2,50% - 7,00%

4. Cash and Cash Equivalents

	2024
<u>Cash on hand</u>	
Rupiah	9.933.488
<u>Cash in banks - Rupiah</u>	
Related parties (Note 20)	28.750.126.173
Third parties	4.266.075.415
Sub-total	33.016.201.588
<u>Time deposits - Rupiah</u>	
Related party (Note 20)	23.800.000.000
Third parties	-
Sub-total	23.800.000.000
Total	56.826.135.076
Time deposits interest rate per annum	3,25% - 7,50%

5. Piutang Pembiayaan

	2025
Piutang pembiayaan - Rupiah	1.231.009.626.904
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(184.964.059.417)
Total	1.046.045.567.487
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32.428.400.083)
Piutang pembiayaan - neto	1.013.617.167.404

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk kendaraan bermotor (mobil, truk dan alat berat) kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Rata-rata tingkat suku bunga efektif per tahun pada tahun 2025 dan 2024 untuk piutang pembiayaan masing-masing sebesar 11,49% dan 16,93%.

Jangka waktu kontrak piutang pembiayaan berkisar antara 3 - 5 tahun.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan kendaraan, Perusahaan menerima Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagian piutang pembiayaan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 9).

Perusahaan melakukan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk) (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

	2025
Investasi	1.130.601.520.285
Multiguna	54.176.743.306
Modal kerja	46.231.363.313
Total piutang pembiayaan	1.231.009.626.904

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, analisa umur piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2025
Belum jatuh tempo	1.193.262.021.519
Telah jatuh tempo:	
1 - 90 hari	7.021.727.725
91 - 120 hari	-
121 - 180 hari	-
Lebih dari 180 hari	30.725.877.660
Total piutang pembiayaan	1.231.009.626.904

5. Financing Receivables

	2024	
Financing receivables - Rupiah	686.108.176.747	
Unearned financing income	(104.037.804.778)	
Total	582.070.371.969	
Allowance for impairment losses	(29.226.668.900)	
Financing receivables - net	552.843.703.069	

This account represents receivables arising from financing activities in the form of vehicles (cars, truck and heavy equipments) to consumers with regular installment payments.

Weighted average effective interest rate per annum for the years 2025 and 2024 for financing receivables were 11.49% and 16.93%, respectively.

The period of financing receivables contract is ranging from 3 - 5 years.

As collateral to the vehicles financing receivables, the Company received the Certificates of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

As at December 31, 2025 and 2024, certain financing receivables have been pledged as collateral for bank loans (Note 9).

The Company entered into joint financing with PT Bank KB Indonesia Tbk (formerly PT Bank KB Bukopin Tbk) (Note 21).

As at December 31, 2025 and 2024, financing receivables based on business activities are as follows:

	2024	
Investment	666.880.758.650	
Multipurpose	19.221.881.542	
Working capital	5.536.555	
Total financing receivables	686.108.176.747	

As at December 31, 2025 and 2024, the aging analysis of financing receivables are as follows:

	2024	
Not past due	653.766.217.754	
Past due:		
1 - 90 days	175.837.000	
91 - 120 days	181.941.457	
121 - 180 days	21.911.871	
More than 180 days	31.962.268.665	
Total financing receivables	686.108.176.747	

5. Piutang Pembiayaan (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	29.226.668.900
Penyisihan selama tahun berjalan	7.469.530.303
Penghapusan piutang	(1.141.376.664)
Pemulihan selama tahun berjalan	(3.126.422.456)
Saldo akhir	32.428.400.083

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian angsuran piutang pembiayaan yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2025
Kurang dari 1 tahun	534.670.746.666
1 - 2 tahun	386.406.579.921
Lebih dari 2 tahun	309.932.300.317
Total piutang pembiayaan	1.231.009.626.904

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan.

6. Tagihan Anjak Piutang

	2025
Tagihan anjak piutang - Rupiah	25.000.000.000
Pendapatan tagihan anjak piutang yang belum diakui	(91.666.668)
Total	24.908.333.332
Cadangan kerugian penurunan nilai	(173.441.000)
Tagihan anjak piutang - neto	24.734.892.332

Rata-rata tingkat suku bunga efektif per tahun pada tahun 2025 dan 2024 untuk tagihan anjak piutang masing-masing sebesar 13,50% dan 12,90%.

Jangka waktu kontrak tagihan anjak piutang berkisar antara 1 - 3 bulan.

Seluruh tagihan anjak piutang berdasarkan *with recourse basis*, dimana mengharuskan pihak yang mentransfer untuk mengganti biaya Perusahaan untuk jumlah yang tidak tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, analisa umur tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

	2025
Belum jatuh tempo	25.000.000.000

5. Financing Receivables (continued)

The movements of the allowance for impairment losses of financing receivables are as follows:

	2024
Beginning balance	72.130.533.576
Provision during the year	7.882.501.939
Receivables written-off	(42.191.211.276)
Recovery during the year	(8.595.155.339)
Ending balance	29.226.668.900

As at December 31, 2025 and 2024, the summary of installments of financing receivables, which will be received from consumers in accordance with the maturity period are as follows:

	2024
Less than 1 year	261.774.331.791
1 - 2 years	229.003.920.259
More than 2 years	195.329.924.697
Total financing receivables	686.108.176.747

The management is of the opinion that the allowance for impairment losses provided are adequate to cover the possible losses that might arise from non-collection of financing receivables.

6. Factoring Receivables

	2024
Factoring receivables - Rupiah	25.000.000.000
Unearned factoring receivables income	(278.750.000)
Total	24.721.250.000
Allowance for impairment losses	(223.563.817)
Factoring receivables - net	24.497.686.183

Weighted average effective interest rate per annum for the years 2025 and 2024 for factoring receivables were 13.50% and 12.90%, respectively.

The period of factoring receivables contract is ranging from 1 - 3 months.

All factoring receivables were entered with recourse basis, which require the transferor to reimburse the Company for any uncollectible amounts.

As at December 31, 2025 and 2024, the aging analysis of factoring receivables are as follows:

	2024
Not past due	25.000.000.000

6. Tagihan Anjak Piutang (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	223.563.817
Penyisihan selama tahun berjalan	173.441.002
Pemulihan selama tahun berjalan	(223.563.819)
Saldo akhir	173.441.000

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian angsuran tagihan anjak piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2025
Kurang dari 1 tahun	25.000.000.000

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.

6. Factoring Receivables (continued)

The movements of the allowance for impairment losses of factoring receivables are as follows:

	2024	
651.733.113		Beginning balance
223.563.817		Provision during the year
(651.733.113)		Recovery during the year
223.563.817		Ending balance

As at December 31, 2025 and 2024, the summary of installments of factoring receivables, which will be received from consumers in accordance with the maturity period are as follows:

	2024	
25.000.000.000		Less than 1 year

The management is of the opinion that the allowance for impairment losses are adequate to cover the possible losses that might arise from non-collection of factoring receivables.

7. Piutang Pembiayaan Murabahah

	2025
Piutang pembiayaan murabahah - Rupiah	53.601.324.826
Marjin murabahah yang belum diakui	(8.303.691.163)
Total	45.297.633.663
Cadangan kerugian penurunan nilai	(987.180.900)
Piutang pembiayaan murabahah - neto	44.310.452.763

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk kendaraan bermotor (mobil, truk dan alat berat) kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Rata-rata tingkat suku bunga efektif per tahun pada tahun 2025 dan 2024 untuk piutang pembiayaan murabahah masing-masing sebesar 11,96% dan 13,95%.

Jangka waktu kontrak piutang pembiayaan murabahah berkisar antara 3 - 5 tahun.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan kendaraan, Perusahaan menerima Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, sebagian piutang pembiayaan murabahah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 9).

7. Murabahah Financing Receivables

	2024	
10.624.315.459		Murabahah financing receivables - Rupiah
(1.385.294.156)		Unearned murabahah margin
9.239.021.303		Total
(423.339.521)		Allowance for impairment losses
8.815.681.782		Murabahah financing receivables - net

This account represents receivables arising from financing activities in the form of vehicles (cars, truck and heavy equipments) to consumers with regular installment payments.

Weighted average effective interest rate per annum for the years 2025 and 2024 for murabahah financing receivables were 11.96% and 13.95%, respectively.

The period of murabahah financing receivables contract is ranging from 3 - 5 years.

As collateral to the vehicles financing receivables, the Company received the Certificates of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

As at December 31, 2025, certain murabahah financing receivables have been pledged as collateral for bank loans (Note 9).

7. Piutang Pembiayaan Murabahah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, analisa umur piutang pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

	2025
Belum jatuh tempo	49.500.259.560
Telah jatuh tempo:	
1 - 90 hari	3.800.487.835
Lebih dari 180 hari	300.577.431
Total piutang pembiayaan murabahah	53.601.324.826

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	423.339.521
Penyisihan selama tahun berjalan	669.974.510
Penghapusan piutang	(79.829.038)
Pemulihan selama tahun berjalan	(26.304.093)
Saldo akhir	987.180.900

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian angsuran piutang pembiayaan murabahah yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2025
Kurang dari 1 tahun	20.380.603.292
1 - 2 tahun	13.193.876.158
Lebih dari 2 tahun	20.026.845.376
Total piutang pembiayaan murabahah	53.601.324.826

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan murabahah.

8. Aset Lain-lain

	2025
Piutang atas aset yang diambil alih	3.422.662.033
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.175.347.052)
Piutang atas aset yang diambil alih - neto	2.247.314.981
Uang jaminan	45.000.000
Total	2.292.314.981

7. Murabahah Financing Receivables (continued)

As at December 31, 2025 and 2024, the aging analysis of murabahah financing receivables are as follows:

2024	
10.209.731.359	Not past due
	Past due:
42.363.482	1 - 90 days
372.220.618	More than 180 days
10.624.315.459	Total murabahah financing receivables

The movements of the allowance for impairment losses of murabahah financing receivables are as follows:

2024	
3.098.021.202	Beginning balance
225.524.512	Provision during the year
(2.806.071.493)	Receivables written-off
(94.134.700)	Recovery during the year
423.339.521	Ending balance

As at December 31, 2025 and 2024, the summary of installments of murabahah financing receivables, which will be received from consumers in accordance with the maturity period are as follows:

2024	
3.741.872.638	Less than 1 year
3.590.839.733	1 - 2 years
3.291.603.088	More than 2 years
10.624.315.459	Total murabahah financing receivables

The management is of the opinion that the allowance for impairment losses provided are adequate to cover the possible losses that might arise from non-collection of financing receivables murabahah.

8. Other Assets

2024	
4.792.706.895	Receivables from foreclosed assets
(2.356.665.906)	Allowance for impairment losses
2.436.040.989	Receivables from foreclosed assets - net
7.000.000	Refundable deposits
2.443.040.989	Total

8. Aset Lain-lain (lanjutan)

Piutang atas aset yang diambil alih merupakan jaminan piutang pembiayaan dalam bentuk aset yang telah diambil alih oleh Perusahaan (Catatan 21).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang atas aset yang diambil alih telah memadai.

9. Pinjaman Bank

Akun ini terdiri dari:

	2025	
<u>Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 20)</u>		
PT Bank KB Indonesia Tbk		
(dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk)	172.000.000.000	
PT Bank KB Bukopin Syariah	36.316.088.130	
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(493.989.870)	
Sub-total	207.822.098.260	
<u>Pihak ketiga - Rupiah</u>		
PT Bank Oke Indonesia Tbk	201.153.950.047	
PT Bank Shinhan Indonesia	97.916.666.667	
PT Bank Ganesha Tbk	95.628.454.365	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	71.527.777.732	
PT Bank Central Asia Tbk	15.000.000.000	
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(1.760.726.199)	
Sub-total	479.466.122.612	
Total	687.288.220.872	

PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan yang diaktakan dalam Akta Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., No. 27 tanggal 15 Oktober 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa pinjaman *installment* dari Bank KB dengan plafond sebesar Rp200.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 8% per tahun dan akan ditinjau kembali setiap bulan. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 48 bulan (dengan *availability period* 9 bulan) dan pembayaran pokok harus dibayar setiap 3 bulan.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang milik Perusahaan kepada masing-masing debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp250.000.000.000.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan pembatasan tertentu, antara lain:

- Interest service coverage ratio minimum 1,25x;*
- Non-performing loan* dengan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari maksimum 5%;
- Gearing ratio* maksimum 4x;
- Mengalihkan aset yang telah dijamin kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

8. Other Assets (continued)

Receivables from foreclosed assets represents financing receivables collateral in the form of assets that have been foreclosed by the Company (Note 21).

Management believes that the allowance for impairment of receivables from foreclosed assets is adequate.

9. Bank Loans

This account consists of:

	2024	
<u>Related parties - Rupiah (Note 20)</u>		
PT Bank KB Indonesia Tbk		
(formerly PT Bank KB Bukopin Tbk)	40.000.000.000	
- PT Bank KB Bukopin Syariah	-	
Less unamortized loan transaction cost	(95.173.198)	
Sub-total	39.904.826.802	
<u>Third parties - Rupiah</u>		
PT Bank Oke Indonesia Tbk	96.032.487.782	
- PT Bank Shinhan Indonesia	-	
- PT Bank Ganesha Tbk	-	
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	
- PT Bank Central Asia Tbk	-	
Less unamortized loan transaction cost	(945.591.682)	
Sub-total	95.086.896.100	
Total	134.991.722.902	

PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB)

Based on the Secured Loan Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 27 of Dini Lastari Siburian, S.H., dated October 15, 2024, the Company obtained a working capital credit facility in the form of an installment loan from Bank KB with a credit limit of Rp200,000,000,000. This loan bears an interest rate of 8% per annum and will be subject to monthly review. The loan has a maturity period of 48 months (with 9 months of availability period), with principal repayments due every 3 months.

This loan is secured by the Company's receivables to each debtors with a guarantee value of Rp250,000,000,000.

The Company must maintain its financial ratios and restrictions, among others:

- Interest service coverage ratio at a minimum 1.25x;
- Non-performing loan with receivables overdue more than 90 days at a maximum 5%;
- Gearing ratio at a maximum 4x;
- Transferring assets that have been pledged to another party, without prior written approval.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh atas fasilitas kredit tersebut sebesar Rp200.000.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.480.888.770 dan Rp117.153.707 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh pembatasan dari Bank KB telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

PT Bank KB Bukopin Syariah (Bukopin Syariah)

Berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan *Line Facility Mudharabah* yang diaktakan dalam Akta Notaris Rahmat Ramadhan, S.H., No. 45 tanggal 30 September 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk modal kerja kepada *end user* syariah berupa *Line Facility (LF) Mudharabah* dari Bukopin Syariah dengan total fasilitas sebesar Rp70.000.000.000. Fasilitas pembiayaan ini dikenakan nisbah bagi hasil setara 8% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan setiap pencairan fasilitas.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp70.000.000.000.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan pembatasan tertentu, antara lain:

- Gearing ratio* maksimum 10x;
- Non-performing loan* maksimum 4% terhadap total pembiayaan;
- Menjual, mentransfer, memindahkan hak, menghapus sebagian besar atau seluruh harta Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp37.500.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp655.758.831 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari Bukopin Syariah telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB) (continued)

As at December 31, 2025, the Company has fully drawdown its credit facility amounted to Rp200,000,000,000.

Interest expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp13,480,888,770 and Rp117,153,707, respectively, is recorded as part of "Finance Costs" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all of the Bank KB's covenants have been met as at December 31, 2025 and 2024.

PT Bank KB Bukopin Syariah (Bukopin Syariah)

Based on the Mudharabah Line Facility Financing Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 45 of Rahmat Ramadhan, S.H., dated September 30, 2025, the Company obtained a financing facility for working capital to sharia end users in the form of a Mudharabah Line Facility (LF) from Bukopin Syariah with a total facility amounted to Rp70,000,000,000. This financing facility bears a profit-sharing ratio equivalent to 8% per annum with a term of 48 months for each drawdown of the facility.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp70,000,000,000.

The Company must maintain its financial ratios and restrictions, among others:

- Gearing ratio at a maximum 10x;
- Non-performing loan at a maximum 4% of total financing;
- Sell, transfer, assign, or dispose of all or a substantial portion of the Company's assets.

As at December 31, 2025, the Company has drawdown its financing facility amounted to Rp37,500,000,000.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp655,758,831 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all the Bukopin Syariah's covenants have been met as at December 31, 2025.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, No. 39 tanggal 8 Oktober 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Modal Kerja - *Installment Non-Revolving* dari Oke Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung modal kerja pada pembiayaan *corporate* dan pembiayaan usaha mikro. Jangka waktu fasilitas kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan dan dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun.

Pinjaman ini dijaminkan dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh fasilitas pinjaman tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, No. 60 tanggal 22 April 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Modal Kerja - *Installment 2 Non-Revolving* dari Oke Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung modal kerja pada pembiayaan *fleet*, pembiayaan *corporate* dan pembiayaan usaha mikro. Jangka waktu fasilitas kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan dan dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun.

Pinjaman ini dijaminkan dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp60.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh fasilitas pinjaman tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, No. 91 tanggal 25 September 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Modal Kerja - *Installment 3 Non-Revolving* dari Oke Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung modal kerja pada pembiayaan *fleet*. Jangka waktu fasilitas kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan dan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun.

Pinjaman ini dijaminkan dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.000.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 39 of Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, dated October 8, 2024, the Company obtained credit facility in the form of Working Capital Loan - *Installment Non-Revolving* from Oke Bank with principal amount of Rp100,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support working capital for corporate financing and micro business financing. The term of the credit facility is 36 months from the date of each drawdown and bears interest rate at 8.5% per annum.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp120,000,000,000.

As at December 31, 2024, the Company had fully drawdown its loan facility.

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 60 of Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, dated April 22, 2025, the Company obtained credit facility in the form of Working Capital Loan - *Installment 2 Non-Revolving* from Oke Bank with principal amount of Rp50,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support working capital for fleet financing, corporate financing and micro business financing. The term of the credit facility is 36 months from the date of each drawdown and bears interest rate at 8.5% per annum.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp60,000,000,000.

As at December 31, 2025, the Company had fully drawdown its loan facility.

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 91 of Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, dated September 25, 2025, the Company obtained credit facility in the form of Working Capital Loan - *Installment 3 Non-Revolving* from Oke Bank with principal amount of Rp100,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support working capital for fleet financing. The term of the credit facility is 36 months from the date of each drawdown and bears interest rate at 7% per annum.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp100,000,000,000.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh fasilitas pinjaman tersebut.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oke Bank, antara lain:

- Piutang lebih dari 30 hari maksimum 10% dari nilai piutang bruto;
- Menjaga piutang lebih dari 90 hari maksimum 5% dari nilai piutang bruto;
- Kerugian kredit bersih tahunan maksimum 6%;
- Capital adequacy ratio* minimum 14%;
- Gearing ratio* maksimum 8x;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, antara lain, pengurangan modal atau perubahan pemegang saham yang mengakibatkan kepemilikan saham KB Grup dibawah 51%;
- Melakukan likuidasi, peleburan, pembubaran dan/atau hal lain untuk kepentingan Perusahaan;
- Mengalihkan sebagian besar kekayaan Perusahaan dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak ketiga;
- Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dari bank lain dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk apapun apabila tidak memenuhi ketentuan *financial covenant*.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.055.751.232 dan Rp837.042.949 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari Oke Bank telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Andrew T. Mogalana, S.H., M.Kn., No. 85 tanggal 26 November 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Modal Kerja) dari Shinhan dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp200.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perusahaan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 48 bulan untuk setiap pencairan fasilitas kredit dan dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman ini dijaminkan dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.000.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)
(continued)

As at December 31, 2025, the Company had fully drawdown its loan facility.

The Company must maintain its financial ratios and obtained prior written approval from Oke Bank, among others:

- Receivables over 30 days maximum 10% of gross receivables value;
- Receivables over 90 days maximum 5% of gross receivables value;
- Annual net credit loss at a maximum 6%;
- Capital adequacy ratio* at a minimum 14%;
- Gearing ratio* at a maximum 8x;
- Amending the articles of association, among others, capital reduction or changes in shareholding that result in KB Group's share ownership is below 51%;
- Undertaking liquidation, merger, dissolution, and/or any other actions deemed to be in the best interest of the Company;
- Transferring a substantial portion of the Company's assets and/or assuming obligations as a guarantor to third parties;
- Obtaining new credit and/or loans from other banks or third parties in any form, if such actions do not comply with the terms of the financial covenants.

Interest expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp11,055,751,232 and Rp837,042,949, respectively, were recorded as part of "Financing Costs" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all the Oke Bank's covenants have been met as at December 31, 2025 and 2024.

PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan)

Based on Credit Facility Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 85 of Andrew T. Mogalana, S.H., M.Kn., dated November 26, 2025, the Company obtained credit facility in the form of Corporate Loan Facility (Working Capital) from Shinhan with a maximum principle amount of Rp200,000,000,000. The purpose of this facility is to support the Company's working capital requirements. The term of credit facility is 48 months for each drawdown and bears interest rate at 6.75% per annum.

As at December 31, 2025, this loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp100,000,000,000.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan) (lanjutan)

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan pembatasan tertentu, antara lain:

- Gearing ratio* maksimum 5x;
- Non-performing loan* maksimum 3%;
- Merubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha;
- Menjual dan/atau melepaskan hak atas harta Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp717.376.512 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari Shinhan telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Ganesha Tbk (Ganesha)

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Hannywati Gunawan, S.H., No. 60 tanggal 8 Agustus 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk *Fixed Loan (FL) Executing (Non-Revolving)* dari Ganesha dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk membiayai piutang pembiayaan Perusahaan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 48 bulan sejak pencairan kredit dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai *coverage* sebesar 100% dari pinjaman yang ditarik.

Perusahaan tanpa persetujuan dahulu dari Ganesha tidak diperkenankan dan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis, antara lain:

- Merubah susunan pengurus dan pemegang saham, serta membagikan dividen;
- Melakukan penurunan modal;
- Melakukan penjualan aset yang menjadi jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh fasilitas pinjaman tersebut.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.825.636.573 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan) (continued)

The Company must maintain its financial ratios and restrictions, among others:

- Gearing ratio at a maximum 5x;
- Non-performing loan at a maximum 3%;
- Change its legal form/status and/or its line of business;
- Sell and/or dispose of the Company's assets.

As at December 31, 2025, the Company has drawdown its financing facility amounted to Rp100,000,000,000.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp717,376,512 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all the Shinhan covenants have been met as at December 31, 2025.

PT Bank Ganesha Tbk (Ganesha)

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 60 of Hannywati Gunawan, S.H., dated Agustus 8, 2025, the Company obtained credit facility in the form of Fixed Loan (FL) Executing (Non-Revolving) from Ganesha with principle amount of Rp100,000,000,000. The purpose of this credit facility is to finance the Company financing receivables. The term of credit facility is 48 months from the date of drawdown and bears interest rate at 8% per annum.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a coverage value of 100% of the withdrawn loan.

Without prior approval from Ganesha, the Company is not permitted to undertake certain actions and is required to provide prior written notification, among others:

- Change the composition of management and shareholders, and declare dividends;
- Reduce the Company's share capital;
- Dispose of assets pledged as collateral.

As at December 31, 2025, the Company had fully drawdown its loan facility.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp1,825,636,573 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Ganesha Tbk (Ganesha) (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari Ganesha telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang diaktakan dalam Akta Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., No. 53 tanggal 30 Oktober 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Modal Kerja (*Non-Revolving*) dari Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp75.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung tambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat atau sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 48 bulan dikenakan bunga berkisar 7,50% - 7,75% per tahun sesuai dengan masing-masing tenor angsuran.

Pinjaman ini dijaminkan dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp83.250.000.000.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, antara lain:

- Gearing ratio* maksimum 9x;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, antara lain, pengurangan modal atau perubahan pemegang saham mayoritas dibawah 50%;
- Melakukan merger dan akuisisi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh fasilitas pinjaman tersebut.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp883.960.050 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari Mandiri telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Dr. Satria Amiputra A., S.E., Ak., CA., CTL., S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec.Dev., M.H., M.Kn., M.A., No. 2 tanggal 2 Juli 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk *Installment Loan* dari BCA dengan jumlah plafon sebesar Rp50.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit selama 4 tahun dan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank Ganesha Tbk (Ganesha) (continued)

The management is of the opinion that all the Ganesha covenants have been met as at December 31, 2025.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Based on the Working Capital Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 53 of Siti Rohmah Caryana, S.H., dated October 30, 2025, the Company obtained a credit facility in the form of a Non-Revolving Working Capital Facility from Mandiri with a credit limit of Rp75,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support additional working capital for the financing of motor vehicles and heavy equipment or in accordance with the Company's business activities. The term of the credit facility is 48 months, bearing interest at rates ranging from 7.50% to 7.75% per annum, depending on the respective installment tenors.

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a guarantee value of Rp83,250,000,000.

The Company must maintain its financial ratios and obtained prior written approval from Mandiri, among others:

- Gearing ratio* at a maximum 9x;
- Amending the articles of association, among others, capital reduction or changes in shareholding that result in share ownership is below 50%;
- Undertake mergers and acquisitions.

As at December 31, 2025, the Company had fully drawdown its loan facility.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp883,960,050 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all the Mandiri's covenants have been met as at December 31, 2025.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 2 of Dr. Satria Amiputra A., S.E., Ak., CA., CTL., S.H., S.S., M.M., M.Ak., M.Ec.Dev., M.H., M.Kn., M.A., dated July 2, 2025, the Company obtained credit facility in the form of *Installment Loan* from BCA with principle amount of Rp50,000,000,000. The term of credit facility is 4 years and bears interest rate at 8.25% per annum.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas piutang milik Perusahaan dengan nilai *coverage* sebesar 125% dari pinjaman yang ditarik.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain:

- Menjaga rasio likuiditas lebih dari 1x;
- Non-performing financing* dengan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari maksimum 5%;
- Gearing ratio* maksimum 5x;
- Wajib menjaga kepemilikan saham mayoritas atas nama Kookmin Bank Co. Ltd., minimal 51%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.125.000 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua pembatasan dari BCA telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)

Berdasarkan Perjanjian Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB yang diaktakan dalam Akta Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 29 tanggal 20 Juni 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dari Maybank dengan total fasilitas sebesar Rp200.000.000.000. Fasilitas pembiayaan ini dikenakan nisbah bagi hasil setara 8,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 54 bulan (termasuk jangka waktu penarikan).

Selama tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pembiayaan dengan total sebesar Rp140.000.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.511.246.383 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 7 November 2025, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman kepada Maybank.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

This loan is secured by fiduciary on the Company's receivables with a coverage value of 125% of the withdrawn loan.

The Company must maintain its financial ratios and obtained prior written approval from BCA, among others:

- Maintain a liquidity ratio of greater than 1x;
- Non-performing loan with receivables overdue more than 90 days at a maximum 5%;
- Gearing ratio at a maximum 5x;
- To maintain majority share ownership under Kookmin Bank Co. Ltd., at a minimum of 51%.

As at December 31, 2025, the Company has drawdown its financing facility amounted to Rp15,000,000,000.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp3,125,000 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The management is of the opinion that all the BCA covenants have been met as at December 31, 2025.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)

Based on the Mudharabah Financing Line Facility Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 29 of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., dated June 20, 2025, the Company obtained a Mudharabah financing facility from Maybank with a total facility amounting to Rp200,000,000,000. This financing facility is subject to a profit-sharing ratio equivalent to 8.75% per annum, with a facility term of 54 months (including the drawdown period).

During 2025, the Company has drawdown its financing facility totaling Rp140,000,000,000.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp3,511,246,383 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On November 7, 2025, the Company fully repaid all outstanding borrowings to Maybank.

9. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah)

Berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) yang diaktakan dalam Akta Notaris Edwar, S.H., No. 2 tanggal 16 Mei 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan PMK Musyarakah dari BCA Syariah dengan limit pembiayaan sebesar Rp40.000.000.000. Fasilitas pembiayaan ini dikenakan bagi hasil yang ditentukan pada setiap penarikan dan dengan jangka waktu fasilitas selama 60 bulan.

Selama tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pembiayaan dengan total sebesar Rp28.000.000.000.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp629.447.568 dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 7 Oktober 2025, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman kepada BCA Syariah.

9. Bank Loans (continued)

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah)

Based on the Granting Financing Facility Limit (Line Facility) which was legalized by Notarial Deed No. 2 of Edwar, S.H., dated May 16, 2025, the Company obtained a Musyarakah Working Capital Financing (PMK) facility from BCA Syariah with a financing limit of Rp40,000,000,000. This financing facility is subject to a profit-sharing arrangement determined at each drawdown, with a facility term of 60 months.

During 2025, the Company has drawdown its financing facility totaling Rp28,000,000,000.

Interest expenses for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp629,447,568 were recorded as part of "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On October 7, 2025, the Company fully repaid all outstanding borrowings to BCA Syariah.

10. Utang Usaha

	2025	2024
<u>Pihak ketiga - Rupiah</u>		
PT Kobexindo Tractors Tbk	-	39.559.746.000
PT Sany Indonesia Heavy Equipment	-	18.873.484.450
Total	-	58.433.230.450

Utang usaha merupakan utang kepada dealer terkait dengan pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

10. Trade Payables

	2025	2024
<u>Third parties - Rupiah</u>		
PT Kobexindo Tractors Tbk	-	39.559.746.000
PT Sany Indonesia Heavy Equipment	-	18.873.484.450
Total	-	58.433.230.450

Trade payables represent payable to dealers related to financing granted to the debtors.

11. Utang Lain-lain

	2025	2024
Pihak berelasi (Catatan 20)	342.350.371	247.091.484
Pihak ketiga	6.391.699.815	8.450.767.646
Total	6.734.050.186	8.697.859.130

Utang lain-lain pihak ketiga terutama terdiri atas utang premi asuransi kepada perusahaan asuransi untuk perlindungan asuransi atas aset yang dibiayai oleh Perusahaan.

11. Other Payables

	2025	2024
Related parties (Note 20)	342.350.371	247.091.484
Third parties	6.391.699.815	8.450.767.646
Total	6.734.050.186	8.697.859.130

Other payables to third parties mainly consist of insurance premiums payable to insurance companies for insurance protection on assets financed by the Company.

12. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari liabilitas yang masih harus dibayar untuk:

	2025
Gaji, bonus dan kesejahteraan karyawan	1.588.158.620
Jasa tenaga ahli	612.882.159
Bunga pinjaman bank	1.141.876.339
Total	3.342.917.118

12. Accrued Liabilities

This account consists of accrued liabilities for:

2024	
2.881.930.744	Employee salary, bonus and allowances
1.125.500.000	Professional fees
519.100.291	Bank loans interest
4.526.531.035	Total

13. Perpajakan

a. Utang Pajak

	2025
Pajak Pertambahan Nilai	15.812.500
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2) - Final	108.000
Pasal 21	684.377.667
Pasal 23	18.501.181
Total	718.799.348

13. Taxation

a. Taxes Payable

2024	
39.670.658	Value Added Tax
-	Income Taxes:
182.797.640	Article 4 (2) - Final
23.321.361	Article 21
	Article 23
245.789.659	Total

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2025
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.400.604.700
Beda temporer	(737.556.273)
Beda tetap:	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.131.360.900
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(2.234.191.086)
Taksiran penghasilan (rugi) fiskal tahun berjalan	18.560.218.241
Kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(203.738.557.577)
Taksiran akumulasi rugi fiskal	(185.178.339.336)
Taksiran akumulasi rugi fiskal:	
Tahun 2021	30.500.486.951
Tahun 2022	143.309.728.778
Tahun 2023	8.047.930.692
Tahun 2024	3.320.192.915
Total	185.178.339.336

b. Current Tax

The reconciliation between income before income tax benefit (expense), as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss is as follows:

2024	
12.416.961.743	Income before income tax benefit (expense) per statements of profit or loss and other comprehensive income
177.321.550	Temporary differences
	Permanent differences:
(8.727.437.638)	Non-deductible expenses
(7.187.038.570)	Interest income already subjected to final income tax
(3.320.192.915)	Estimated fiscal (income) loss current year
(200.418.364.662)	Compensation fiscal loss from prior years
(203.738.557.577)	Accumulated estimated fiscal loss
	Accumulated estimated fiscal losses:
49.060.705.192	Year 2021
143.309.728.778	Year 2022
8.047.930.692	Year 2023
3.320.192.915	Year 2024
203.738.557.577	Total

13. Perpajakan (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, kerugian pajak dapat dikompensasikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perusahaan menyampaikan SPT pajak berdasarkan *self-assessment*.

c. Pajak Tangguhan

Rincian pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2025	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2025	
Liabilitas imbalan kerja	185.068.991	52.509.902	30.152.498	267.731.391	Employee benefits liabilities
Aset hak-guna	(285.357.727)	(302.800.253)	-	(588.157.980)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	291.349.812	88.027.971	-	379.377.783	Lease liabilities
Aset pajak tangguhan - neto	191.061.076	(162.262.380)	30.152.498	58.951.194	Deferred tax assets - net
	1 Januari/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2024	
Liabilitas imbalan kerja	134.121.848	39.257.164	11.689.979	185.068.991	Employee benefits liabilities
Aset hak-guna	(149.671.244)	(135.686.483)	-	(285.357.727)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	155.909.752	135.440.060	-	291.349.812	Lease liabilities
Aset pajak tangguhan - neto	140.360.356	39.010.741	11.689.979	191.061.076	Deferred tax assets - net

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mencatat rugi fiskal. Perusahaan tidak membentuk aset pajak tangguhan atas kerugian pajak tersebut karena tidak ada kepastian bahwa kerugian pajak tersebut dapat dimanfaatkan sebelum habis masa berlakunya.

Rekonsiliasi antara taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.400.604.700	12.416.961.743	Income before income tax benefit (expense) per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku (22%)	(4.268.133.034)	(2.731.731.583)	Tax expense computed using the applicable tax rate (22%)

13. Taxation (continued)

b. Current Tax (continued)

Under Indonesian taxation laws, tax losses may be carried forward for a period of 5 (five) years. The Company submit tax returns on the basis of self-assessment.

c. Deferred Tax

The details of the Company's deferred tax assets are as follows:

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company recorded tax loss. The Company did not provide deferred tax asset for that tax loss since there is no certainty of such tax loss can be utilized before the expiry date.

The reconciliation between income tax benefit (expense) computed using the applicable tax rates on the accounting income before income tax benefit (expense) as reported in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2025 and 2024, are as follows:

13. Perpajakan (lanjutan)

	2025
Pengaruh pajak atas:	
Beda tetap	22.622.641
Laba (rugi) fiskal	4.083.248.013
Taksiran manfaat (beban) pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(162.262.380)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Pada tanggal 18 Desember 2024, Perusahaan menerima Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan (BAPPP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Berdasarkan BAPPP, Perusahaan harus membayar kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23/26 untuk tahun pajak 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp218.226.057 dan Rp321.950.625. Perusahaan telah melunasi seluruh kekurangan pembayaran untuk tahun pajak 2020 dan 2021 pada tanggal 30 Desember 2024 dan membebankannya pada laba rugi tahun 2024.

13. Taxation (continued)

	2024	
Tax effect on:		
Permanent differences	3.501.184.766	
Fiscal income (loss)	(730.442.442)	
Estimated tax benefit (expense) per statements of profit and loss and other comprehensive income	39.010.741	

Request Letter for Explanation of Data and/or Information (SP2DK)

On December 18, 2024, the Company received Minutes of Implementation of Request for Explanation (BAPPP) from the Directorate General of Tax (DJP) regarding Request Letter for Explanation of Data and/or Information for fiscal years 2020 and 2021. Based on BAPPP, the Company has to pay the underpayment of income tax articles 21 and articles 23/26 for fiscal years 2020 and 2021 amounted to Rp218,226,057 and Rp321,950,625, respectively. The Company has fully paid the underpayments for fiscal years 2020 and 2021 on December 30, 2024 and charged them to the 2024's profit or loss.

14. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Cipta Kerja untuk tahun 2025 dan 2024. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban (penghasilan) imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, aktuaris independen, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 12 Maret 2026 dan 10 Maret 2025.

Perhitungan imbalan kerja menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2025
Tingkat bunga diskonto per tahun	6,00%
Kenaikan gaji per tahun	5,0%
Umur pensiun normal	56 Tahun
Tingkat kematian	TMI*) IV (2019)
Tingkat cacat	10% dari Tingkat Kematian/Mortality Rate

*) TMI = Tabel Mortalita Indonesia

14. Estimated Liabilities for Employee Benefits

The Company provides employee benefits to its employees in accordance with Law No. 6/2023 and Government Regulation No. 35/2021 on Job Creation (Cipta Kerja) for year 2025 and 2024. The employee benefits liabilities is unfunded.

The following tables summarize the components of net benefits expense (income) recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the amount recognized in the statements of financial position for employee benefits liabilities as calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Rekan, for the years ended December 31, 2025 and 2024 in its reports dated March 12, 2026 and March 10, 2025, respectively.

The calculation of employee benefits used the "Projected Unit Credit" method which utilized the following assumptions:

	2024	
Annual discount rate	7,00%	
Annual salary increase rate	5,0%	
Normal pension age	56 Tahun	
Mortality rate	TMI*) IV (2019)	
Disability rate	10% dari Tingkat Kematian/Mortality Rate	

*) TMI = Indonesian Mortality Table

14. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

14. Estimated Liabilities for Employee Benefits (continued)

a. Beban imbalan kerja karyawan

a. Employee benefits expense

	2025	2024	
Biaya jasa kini	211.400.201	139.241.910	Current service cost
Biaya bunga	58.056.872	39.199.744	Interest cost
Total	269.457.073	178.441.654	Total

b. Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan

b. Movement in the employee benefits liabilities

	2025	2024	
Saldo awal	841.222.686	609.644.764	Beginning balance
Beban imbalan kerja tahun berjalan	269.457.073	178.441.654	Current year employee benefits expense
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	137.056.810	53.136.268	Actuarial loss recognized in other comprehensive income
Pembayaran imbalan aktual	(30.775.699)	-	Actual benefit paid
Total	1.216.960.870	841.222.686	Total

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of employee benefits liabilities to changes in the principal assumptions is as follow:

**Dampak atas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/
Impact of Employee Benefit Liabilities**

	Perubahan asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(61.888.728)	67.788.667	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	142.588.778	(119.861.226)	Salary increase

Profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasti (tidak didiskontokan) pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The maturity profile of defined benefits obligation (undiscounted) as at December 31, 2025 is as follows:

	2025	
1 - 5 tahun	725.319.306	1 - 5 years
5 - 10 tahun	1.790.749.315	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	2.490.439.565	More than 10 years
Total	5.006.508.186	Total

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

The management of the Company has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Company's liability for its employee benefits.

15. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total
PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu/formerly PT Bank KB Bukopin Tbk)	158.233	99,24%	791.165.000.000
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin	788	0,49%	3.940.000.000
Koperasi Konsumen Bhakti Jaya Makmur (dahulu/formerly Koperasi Karyawan Bank Bukopin)	425	0,27%	2.125.000.000
Total	159.446	100,00%	797.230.000.000

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) pada tanggal 1 Juli 2025 antara PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB) dan JB Woori Capital Co., Ltd. (JB Woori), dimana Bank KB akan menjual 85% kepemilikan sahamnya dalam Perusahaan kepada JB Woori. Perusahaan telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana perubahan pihak utama (pemegang saham pengendali) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Agustus 2025. Selama bulan September 2025 sampai dengan Januari 2026, Perusahaan telah melakukan komunikasi dengan OJK, dimana Perusahaan diharuskan mencari investor lokal untuk memenuhi ketentuan dari OJK. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pelaksanaan CSPA ini masih menunggu pemenuhan beberapa syarat, ketentuan dan persetujuan dari OJK.

15. Share Capital

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Based on the Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dated July 1, 2025 between PT Bank KB Indonesia Tbk (Bank KB) and JB Woori Capital Co., Ltd. (JB Woori), whereby Bank KB will sell 85% of its share ownership in the Company to JB Woori. The Company has submitted an application for approval of the proposed change in the controlling shareholder (ultimate shareholder) to the Financial Services Authority (OJK) on August 29, 2025. During the period from September 2025 to January 2026, the Company has conducted communications with OJK, whereby the Company was required to seek a local investor to comply with OJK's requirements. Until the completion date of the financial statements, the implementation of the CSPA is still pending the fulfillment of several conditions, terms, and approvals from OJK.

16. Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari kategori pembiayaan:

	2025
Piutang pembiayaan	79.765.683.738
Anjak piutang	3.697.020.456
Total	83.462.704.194

16. Financing Income

Financing income represents interest income derived from financing categories of:

	2024	
	30.267.918.126	Financing receivables
	3.713.835.395	Factoring
Total	33.981.753.521	Total

17. Gaji dan Tunjangan

	2025
Gaji, insentif, lembur dan imbalan kerja	14.845.910.183
Tunjangan	13.921.007.087
Lain-lain	2.809.480.528
Total	31.576.397.798

17. Salaries and Allowances

	2024	
	11.414.817.838	Salaries, incentives, overtime and employee benefit
	12.253.282.850	Allowances
	1.672.193.190	Others
Total	25.340.293.878	Total

18. Beban Umum dan Administrasi

	2025
Jasa tenaga ahli	4.466.917.407
Operasional kantor	2.361.963.448
Beban penagihan	1.634.659.336
Penyusutan	1.588.557.107
Beban pajak	672.286.748
Perbaikan dan pemeliharaan	298.586.452
Lain-lain	3.251.239.095
Total	14.274.209.593

18. General and Administrative Expenses

	2024
Professional fees	3.354.125.673
Office operational	2.552.493.679
Collection expense	2.021.832.494
Depreciation	1.332.051.724
Tax expense	2.167.162.547
Repair and maintenance	435.976.949
Others	1.832.079.323
Total	13.695.722.389

19. Beban Keuangan

	2025
Beban bunga pinjaman bank (Catatan 9)	
Pihak berelasi (Catatan 20)	14.136.647.601
Pihak ketiga	18.626.543.318
Beban bunga sewa	118.975.267
Amortisasi atas beban provisi dan administrasi pinjaman bank	2.721.995.729
Total	35.604.161.915

19. Financing Costs

	2024
Interest expense on bank loans (Note 9)	
Related party (Note 20)	117.153.707
Third parties	838.168.673
Lease interest expense	71.385.198
Amortization of provision and administrative expense on bank loans	34.235.120
Total	1.060.942.698

20. Saldo dan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

20. Balance and Transaction with Related Parties

The details of balances and transactions with related parties are as follows:

	2025	2024
Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents (Catatan/Note 4)		
<u>Kas di Bank/Cash in Banks</u>		
PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu/formerly PT Bank KB Bukopin Tbk)	3.347.364.249	28.549.024.146
PT Bank KB Bukopin Syariah	4.135.616.707	201.102.027
Sub-total	7.482.980.956	28.750.126.173
<u>Deposito Berjangka/Time Deposits</u>		
PT Bank KB Bukopin Syariah	30.000.000.000	23.800.000.000
Total	37.482.980.956	52.550.126.173
Piutang Lain-lain/Other Receivables		
PT Bank KB Indonesia Tbk	1.194.522.661	-
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.958.904	11.399.452
Total	1.197.481.565	11.399.452
Pinjaman Bank/Bank Loans (Catatan/Note 9)		
PT Bank KB Indonesia Tbk	171.680.152.170	39.904.826.802
PT Bank KB Bukopin Syariah	36.141.946.090	-
Total	207.822.098.260	39.904.826.802
Utang Lain-lain/Other Payables (Catatan/Note 11)		
PT Bank KB Indonesia Tbk	-	83.113.377
PT Bank KB Bukopin Syariah	342.350.371	163.978.107
Total	342.350.371	247.091.484

20. Saldo dan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Beban Keuangan/Financing Costs (Catatan/Note 19)

Beban bunga atas pinjaman bank/Interest expenses
on bank loans

PT Bank KB Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Syariah

Total

Hubungan dan sifat saldo/transaksi antara Perusahaan dan pihak-pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/Related parties

PT Bank KB Indonesia Tbk
(dahulu/formerly PT Bank KB Bukopin Tbk)
PT Bank KB Bukopin Syariah

Kompensasi manajemen kunci

Jumlah remunerasi yang dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp5.765.526.008 dan Rp4.313.477.159, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

21. Perjanjian-Perjanjian Penting

Perjanjian Pembiayaan Bersama - PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

a. Kredit Pemilikan Mobil (KPM)

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan dengan Bank KB, pemegang saham pengendali, berdasarkan Akta Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. No. 558 & 559 tanggal 24 Juli 2017. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank KB bersedia bekerjasama untuk memberikan pembiayaan penerusan pinjaman kredit bagi Perusahaan. Tujuan dari fasilitas pembiayaan ini adalah kerja sama pembiayaan Penerusan Pinjaman Kredit Pemilikan Mobil (KPM *Channelling*) antara Bank KB dengan Perusahaan.

Jangka waktu pembiayaan Bank KB untuk mobil baru tidak lebih dari 60 bulan dan untuk mobil lama tidak lebih dari 48 bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan. Tingkat suku bunga untuk fasilitas perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan (*channelling*) sebesar 10,5% per tahun efektif, untuk tenor berkisar antara 12 sampai dengan 60 bulan. Jumlah maksimum pokok piutang pembiayaan sehubungan dengan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan (*channelling*) ini adalah sebesar Rp100.000.000.000.

20. Balance and Transaction with Related Parties (continued)

2025	2024
13.480.888.770	117.153.707
655.758.831	-
14.136.647.601	117.153.707

The relationship and the nature of accounts/ transactions between the Company and the above related parties are as follows:

Hubungan/Relationship

Pemegang Saham Pengendali/Controlling Shareholder
Entitas Sepengendali/An Entity Under Common Control

Key management compensation

The remuneration paid to the Boards of Commissioners and Directors of the Company amounting to Rp5,765,526,008 and Rp4,313,477,159, respectively, for the years ended December 31, 2025 and 2024.

21. Significant Agreements

Joint Financing Agreement - PT Bank KB Indonesia Tbk (formerly PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

a. Car Ownership Loan (KPM)

The Company entered into a channeling financing agreement with Bank KB, a controlling shareholder, based on Notarial Deed No. 558 & 559 of Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. dated July 24, 2017. In the agreement, it was stated that Bank KB was willing to cooperate to provide financing in the form of channelling loan to the Company. The purpose of this financing facility is the collaboration of additional channelling financing for car ownership loan (KPM *Channelling*) between Bank KB and the Company.

The term of financing from Bank KB for new cars is not more than 60 months and for old cars is not more than 48 months from the date of disbursement of financing. The interest rate for the channelling facility agreement is 10.5% effective per annum, for tenor ranging from 12 to 60 months. The maximum principal amount of financing receivables in relation with this channelling financing agreement is Rp100,000,000,000.

21. Perjanjian-Perjanjian Penting (lanjutan)

Perjanjian Pembiayaan Bersama - PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

a. Kredit Pemilikan Mobil (KPM) (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 1 Maret 2018, dimana kedua pihak sepakat untuk merubah perjanjian ini menjadi Pembiayaan Bersama Kredit Pemilikan Mobil (KPM *Joint Financing*). Ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, sepanjang tidak diubah, akan tetap sama dan tetap berlaku.

Berdasarkan Akta Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., No. 142 tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas KPM *Joint Financing* dari Bank KB sebesar Rp200.000.000.000. Persentase komposisi pembiayaan Bank KB sebesar 98% dan Perusahaan sebesar 2%. Jangka waktu kerjasama adalah selama 12 bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, sedangkan untuk suku bunga kepada Debitur ditetapkan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas KPM *Joint Financing* dari Bank KB sebesar Rp300.000.000.000. Jangka waktu kerjasama adalah selama 12 bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, sedangkan untuk suku bunga kepada Debitur ditetapkan oleh Perusahaan.

b. Kredit Kendaraan Usaha melalui Multifinance (KUM)

Berdasarkan Akta Notaris Tri Firdaus Akbaryah, SH., M.H., No. 10 tanggal 29 Januari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama Penerusan Fasilitas Kredit Kendaraan Usaha melalui Multifinance (KUM *Channelling*) dengan Bank KB, dimana penggunaan kredit hanya untuk pembelian kendaraan baru dan atau kendaraan bekas yang akan digunakan untuk usaha atau untuk mendukung usaha dan bukan untuk angkutan penumpang umum. Jumlah pembiayaan penerusan pinjaman yang diberikan oleh Bank KB kepada Perusahaan adalah sebesar Rp100.000.000.000.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 18 Maret 2019 dimana para pihak setuju untuk mengubah perjanjian ini menjadi Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Usaha dan Alat Berat Melalui Multifinance (KUM *Joint Financing*). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan pelunasan seluruh pembiayaan.

21. Significant Agreements (continued)

Joint Financing Agreement - PT Bank KB Indonesia Tbk (formerly PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

a. Car Ownership Loan (KPM) (continued)

This agreement has been amended based on agreement dated March 1, 2018, both parties agreed to change this agreement to become joint financing for car ownership loan (KPM *Joint Financing*). Other provisions in this agreement, as long as they are not modified, will remain the same and applied.

Based on Notarial Deed No. 142 of Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. dated June 28, 2018, the Company obtained additional KPM *Joint Financing* facilities from Bank KB amounted to Rp200,000,000,000. Bank KB's financing portion is at 98% and 2% for the Company. The cooperation period is 12 months and bears fixed interest rate at 10.5% per annum, meanwhile, the interest rate for the Debtor is determined by the Company.

On January 14, 2019, the Company obtained additional KPM *Joint Financing* facilities from Bank KB amounted Rp300,000,000,000. The cooperation period is 12 months and bears fixed interest rate at 10.5% per annum, meanwhile, the interest rate for the Debtor is determined by the Company.

b. Business Vehicle Credit through Multifinance (KUM)

Based on Notarial Deed No. 10 of Tri Firdaus Akbaryah, S.H., M.H., dated January 29, 2018, the Company entered into a cooperation agreement for Channelling of Business Vehicle Facility Credit through Multifinance (KUM *Channelling*) with Bank KB, whereby, the use of credit was only for the purchase of new vehicles and/or used vehicles that would be used for business or to support business and not for public passenger transportation. The total channelling loan granted by Bank KB to the Company amounted to Rp100,000,000,000.

This agreement has been amended several times, the latest was on March 18, 2019, whereby, both parties agreed to change this agreement to become Joint Financing for Business Vehicle and Heavy Equipment Facility Credit Through Multifinance (KUM *Joint Financing*). This agreement effective since the date of the agreement was signed until the fullpayment of the financing.

21. Perjanjian-Perjanjian Penting (lanjutan)

Perjanjian Pembiayaan Bersama - PT Bank KB Indonesia Tbk (dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

b. Kredit Kendaraan Usaha melalui Multifinance (KUM) (lanjutan)

Bank KB berhak menetapkan sendiri besarnya suku bunga untuk suatu kelompok (*batch*) pencairan dan berlaku tetap (*fixed rate*) dan Perusahaan berhak menentukan sendiri suku bunga yang akan diberikan kepada Debitur dengan memperhatikan suku bunga Perusahaan dan Bank KB sesuai dengan porsi masing-masing.

Persentase komposisi pembiayaan Bank KB adalah sebesar 95%-100% dan Perusahaan sebesar 0%-5%. Agunan fasilitas kredit ini adalah berupa kendaraan atau alat berat yang dibeli oleh debitur.

Perjanjian Penyaluran Pembiayaan (*Channelling*) - PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS)

Berdasarkan surat KBBS tanggal 12 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kerjasama penyaluran pembiayaan (*Channelling*) dengan akad murabahah dari KBBS. Tujuan dari kerjasama/fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan penerusan pinjaman (*Channelling*) antara KBBS dengan Perusahaan atas pembiayaan kepemilikan mobil. Jumlah pokok yang dapat dibiayai adalah Rp50.000.000.000.

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama terkait dengan pembiayaan *channelling* antara Perusahaan dan KBBS tanggal 12 Januari 2022, perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan pelunasan seluruh pembiayaan *channelling*, perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pengakhiran perjanjian.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal

Manajemen Risiko Keuangan

Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

21. Significant Agreements (continued)

Joint Financing Agreement - PT Bank KB Indonesia Tbk (formerly PT Bank KB Bukopin Tbk) (Bank KB)

b. Business Vehicle Credit through Multifinance (KUM) (continued)

Bank KB has the right to set its own fixed interest rate for a batch of disbursements and the Company has the right to determine the interest rate that will be given to the Debtor by considering interest rates of the Company and Bank KB in accordance with their respective portions.

Bank KB's financing portion is at 95%-100% and 0%-5% for the Company. The collateral for this credit facility is the vehicle or heavy equipment purchased by debtor.

Channelling Agreement - PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS)

Based on the letter of KBBS dated June 12, 2017, the Company obtained a financing channelling facility with murabahah from KBBS. The purpose of this cooperation/financing facility is for channelling loan between KBBS and the Company for car ownership financing. The amount of principal that can be funded is Rp50,000,000,000.

Based on the Changes and Restatement of Cooperation Agreement regarding channelling financing between the Company and KBBS dated January 12, 2022, this agreement effective since the date of the agreement was signed until the fullpayment of the channelling financing, this agreement can be terminated by the party before the end of the agreement by giving written notification to the other party no later than 3 months before the termination of the agreement.

22. Financial Risk Management and Capital Management

Financial Risk Management

The Company defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Company's objectives.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko kredit

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan, Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit yaitu risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian. Risiko ini dapat terjadi karena penilaian kelayakan kredit nasabah yang tidak tepat atau piutang tidak dikelola dengan baik.

Risiko kredit juga dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro yang berdampak pada bisnis dan kapasitas pembayaran nasabah serta perubahan kondisi usaha mikro nasabah yang sulit diantisipasi sebelumnya. Perusahaan menerapkan kebijakan kehati-hatian dalam penerimaan kredit dan mengelola penagihan atas piutang pembiayaan.

Berikut ini adalah eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit dan analisis konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum untuk risiko kredit

Eksposur risiko kredit Perusahaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan, dimana eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatatnya.

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit muncul ketika sejumlah pelanggan terlibat dalam aktivitas bisnis serupa atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik serupa yang akan menyebabkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kontraktual juga terpengaruh oleh perubahan dalam kondisi ekonomi atau lainnya.

Perusahaan saat ini bergerak dalam bisnis piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah. Pelanggan sebagian besar adalah perusahaan dan mereka tidak terkonsentrasi di wilayah geografis tertentu.

Proses penentuan kualitas kredit Perusahaan membedakan eksposur untuk menyortir eksposur yang memiliki faktor risiko lebih besar dan potensi kerugian yang lebih tinggi. Kualitas kredit untuk setiap aset keuangan ditinjau secara berkala dan setiap perubahan diimplementasikan secara tepat. Distribusi aset keuangan menurut kualitas kreditnya diringkas sebagai berikut.

22. Financial Risk Management and Capital Management (continued)

Financial Risk Management (continued)

Credit risk

In providing financing facilities, the Company is exposed to credit risk, i.e. the risk of customers' failure to fulfill some or all of their obligations as required in the agreement. This risk can occur from improper assessment on customer's credit worthiness or the receivables are not well managed.

Credit risk can also occur because of the changes in macro economic conditions that have an impact to the customer's business and payment capacity and the changes in the conditions of the customers' micro-business, which are difficult to anticipate in advance. The Company applies prudent credit acceptance policies and manages the collection of financing receivables.

The following are the Company's maximum exposure to credit risk and credit risk concentration analysis.

i. Maximum exposure to credit risk

The Company's credit risk exposure is almost entirely derived from financing receivables, whereby the maximum credit risk exposure is equal to the carrying amount.

ii. Credit risk concentration analysis

Concentration of credit risk arises when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Company is currently engaged in financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables business. The customers are mainly corporate and they are not concentrated in any specific geographic region.

The Company's credit quality determination processes differentiate exposures in order to highlight those with greater risk factors and higher potential severity of loss. The credit quality for each financial asset is reviewed regularly and any amendment is implemented promptly. Distribution of financial assets by their credit quality are summarized as below.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menampilkan aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan ECL stages:

2025					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Kas dan setara kas	68.430.101.077	-	-	68.430.101.077	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	1.024.773.921.817	129.255.828	21.142.389.842	1.046.045.567.487	Financing receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(11.264.525.397)	(21.484.844)	(21.142.389.842)	(32.428.400.083)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	1.013.509.396.420	107.770.984	-	1.013.617.167.404	Net realizable value
Tagihan anjak piutang	24.908.333.332	-	-	24.908.333.332	Factoring receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(173.441.000)	-	-	(173.441.000)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	24.734.892.332	-	-	24.734.892.332	Net realizable value
Piutang pembiayaan murabahah	45.064.081.077	-	233.552.586	45.297.633.663	Murabahah financing receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(753.628.314)	-	(233.552.586)	(987.180.900)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	44.310.452.763	-	-	44.310.452.763	Net realizable value
Piutang lain-lain	1.321.282.115	-	-	1.321.282.115	Other receivables
Aset lain-lain - uang jaminan	45.000.000	-	-	45.000.000	Other assets - refundable deposits
Total	1.152.351.124.707	107.770.984	-	1.152.458.895.691	Total

2024					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Kas dan setara kas	56.826.135.076	-	-	56.826.135.076	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	558.130.333.765	147.227.204	23.792.811.000	582.070.371.969	Financing receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(6.940.813.525)	(47.452.003)	(22.238.403.372)	(29.226.668.900)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	551.189.520.240	99.775.201	1.554.407.628	552.843.703.069	Net realizable value
Tagihan anjak piutang	24.721.250.000	-	-	24.721.250.000	Factoring receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(223.563.817)	-	-	(223.563.817)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	24.497.686.183	-	-	24.497.686.183	Net realizable value
Piutang pembiayaan murabahah	8.840.928.629	50.983.866	347.108.808	9.239.021.303	Murabahah financing receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(109.957.899)	(15.324.011)	(298.057.611)	(423.339.521)	Less: allowance for impairment losses
Nilai realisasi neto	8.730.970.730	35.659.855	49.051.197	8.815.681.782	Net realizable value
Piutang lain-lain	12.137.328	-	-	12.137.328	Other receivables
Aset lain-lain - uang jaminan	7.000.000	-	-	7.000.000	Other assets - refundable deposits
Total	641.263.449.557	135.435.056	1.603.458.825	643.002.343.438	Total

Penjelasan mengenai kriteria ECL stages dijelaskan pada Catatan 2c.

Explanation on the criteria of ECL stages is described in Note 2c.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko suku bunga

Perusahaan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga.

Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Tabel dibawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat bunga:

22. Financial Risk Management and Capital Management (continued)

Financial Risk Management (continued)

Interest rate risk

The Company faced interest rate risk due to changes in interest rates on interest bearing financial assets and liabilities.

The financial policy provides guidance that the interest rate exposure should be identified and minimized/neutralized on a timely basis.

The table below describes the details of the maturity of the Company's assets and liabilities which are affected by the interest rate:

2025											
Bunga tetap/Fixed rate											
	Bunga mengambang/ Floating interest	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Total/ Total						
Aset						Assets					
Kas di bank dan setara kas	9.518.601.077	58.900.000.000	-	-	68.418.601.077	Cash in banks and cash equivalents					
Piutang pembiayaan	-	463.002.042.146	331.588.389.094	251.455.136.247	1.046.045.567.487	Financing receivables					
Tagihan anjak piutang	-	24.908.333.332	-	-	24.908.333.332	Factoring receivables					
Piutang pembiayaan murabahah	-	19.367.262.766	10.680.329.194	15.250.041.703	45.297.633.663	Murabahah financing receivables					
Total Aset	9.518.601.077	566.177.638.244	342.268.718.288	266.705.177.950	1.184.670.135.559	Total Assets					
Pinjaman bank	-	220.673.396.631	287.985.121.104	180.884.419.206	689.542.936.941	Bank loans					
Liabilitas sewa	-	909.597.193	689.881.562	124.965.710	1.724.444.465	Lease liabilities					
Total Liabilitas	-	221.582.993.824	288.675.002.666	181.009.384.916	691.267.381.406	Total Liabilities					
Neto	9.518.601.077	344.594.644.420	53.593.715.622	85.695.793.034	493.402.754.153	Net					
2024											
Bunga tetap/Fixed rate											
	Bunga mengambang/ Floating interest	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Total/ Total						
Aset						Assets					
Kas di bank dan setara kas	33.016.201.588	23.800.000.000	-	-	56.816.201.588	Cash in banks and cash equivalents					
Piutang pembiayaan	-	220.065.087.869	196.630.151.158	165.375.132.942	582.070.371.969	Financing receivables					
Tagihan anjak piutang	-	24.271.250.000	-	-	24.271.250.000	Factoring receivables					
Piutang pembiayaan murabahah	-	3.280.917.082	3.108.576.115	2.849.528.105	9.239.021.302	Murabahah financing receivables					
Total Aset	33.016.201.588	271.417.254.951	199.738.727.273	168.224.661.047	672.396.844.859	Total Assets					
Pinjaman bank	-	57.844.928.305	44.563.676.562	33.623.882.915	136.032.487.782	Bank loans					
Liabilitas sewa	-	524.063.579	469.863.061	330.390.685	1.324.317.325	Lease liabilities					
Total Liabilitas	-	58.368.991.884	45.033.539.623	33.954.273.600	137.356.805.107	Total Liabilities					
Neto	33.016.201.588	213.048.263.067	154.705.187.650	134.270.387.447	535.040.039.752	Net					

Perusahaan menganalisis tingkat suku bunga aset dan liabilitas keuangan secara dinamis. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk mendapatkan suku bunga tersedia yang paling menguntungkan.

The Company analyze its financial assets and liabilities interest rate exposure on a dynamic basis. The Company has also policies to obtain the most favorable interest rates available.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan arus kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penagihan piutang pembiayaan.

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

22. Financial Risk Management and Capital Management (continued)

Financial Risk Management (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk where the Company is unable to meet its obligations when they fall due. Management evaluates and monitors cash inflows (*cash-in*) and cash outflow (*cash-out*) to ensure the availability of funds to meet payment obligations when due. In general, the need for funds for repayment of short-term liabilities and long-term maturities are derived from collection of customers' receivables.

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities as at December 31, 2025 and 2024 based on contractual undiscounted payments:

2025								
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-3 Tahun/ 1-3 Years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Tidak memiliki jatuh tempo/ No maturity	Total/ Total		
Liabilitas							Liabilities	
Pinjaman bank	54.344.095.588	166.329.301.042	410.670.847.687	58.198.692.624	-	689.542.936.941	Bank loans	
Utang lain-lain	-	-	-	-	6.734.050.186	6.734.050.186	Other payables	
Liabilitas yang masih harus dibayar	3.342.917.118	-	-	-	-	3.342.917.118	Accrued liabilities	
Liabilitas sewa	247.425.000	746.825.000	844.525.000	-	-	1.838.775.000	Lease liabilities	
Total Liabilitas	57.934.437.706	167.076.126.042	411.515.372.687	58.198.692.624	6.734.050.186	701.458.679.245	Total Liabilities	
2024								
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-3 Tahun/ 1-3 Years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Tidak memiliki jatuh tempo/ No maturity	Total/ Total		
Liabilitas							Liabilities	
Pinjaman bank	7.219.099.505	50.625.828.800	78.187.559.477	-	-	136.032.487.782	Bank loans	
Utang usaha	58.433.230.450	-	-	-	-	58.433.230.450	Trade Payables	
Utang lain-lain	-	-	-	-	8.697.859.130	8.697.859.130	Other payables	
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.526.531.035	-	-	-	-	4.526.531.035	Accrued liabilities	
Liabilitas sewa	248.050.000	331.880.000	846.000.000	-	-	1.425.930.000	Lease liabilities	
Total Liabilitas	70.426.910.990	50.957.708.800	79.033.559.477	-	8.697.859.130	209.116.038.397	Total Liabilities	

Pengelolaan Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan pemegang kepentingan lainnya serta memelihara optimalisasi struktur permodalan.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Capital Management

The purposes of the Company in managing capital are to safeguard the Company's going concern so the Company is able to provide benefits to shareholders and other stakeholders and to maintain the capital structure optimization.

The Company manages the capital structure and makes adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through loans.

22. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal inti Perusahaan minimum sebesar Rp100.000.000.000;
- Rasio modal inti Perusahaan terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%;
- Gearing ratio* Perusahaan paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali;
- Rasio permodalan Perusahaan minimum 10%.

Posisi permodalan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 adalah sebagai berikut:

- Modal inti Perusahaan masing-masing sebesar Rp459.471.090.364 dan Rp440.339.652.356.
- Rasio modal inti Perusahaan masing-masing adalah 57,63% dan 55,23% dari modal disetor.
- Gearing ratio* Perusahaan masing-masing adalah 1,5 kali dan 0,3 kali.
- Rasio permodalan Perusahaan masing-masing adalah 80,08% dan 143,08%.

Analisa lebih lanjut terkait pemenuhan rasio-rasio permodalan di atas dijelaskan dalam Catatan 25.

23. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen Perusahaan mempertimbangkan bahwa nilai tercatat pada kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan liabilitas yang masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau memiliki tingkat bunga yang mendekati tingkat bunga pasar.

Uang jaminan tidak dinyatakan pada harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan, sehingga dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar uang jaminan karena tidak ada jangka waktu yang pasti meskipun tidak diharapkan akan diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan.

22. Financial Risk Management and Capital Management (continued)

Financial Risk Management (continued)

Capital Management (continued)

In managing capital, the Company analyzes on a monthly basis to ensure that the Company continues to comply with the Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 47/POJK.05/2020 regarding Business License and Institutional Multifinance Company and Sharia Finance Companies and Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 regarding Conduct of Business of Multifinance Company, as lastly amended by POJK No. 46 Year 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies which have some provisions as follows:

- The Company's core capital minimum of Rp100,000,000,000;
- The Company's core capital ratio of paid-up capital minimum of 50%;
- The Company's gearing ratio at a minimum of 0 times and a maximum of 10 times;
- The Company's capital ratio minimum 10%.

The Company's capital position as at December 31, 2025 and 2024 were as follows:

- The Company's core capital amounted to Rp459,471,090,364 and Rp440,339,652,356, respectively.
- The Company's core capital ratio was 57.63% and 55.23% of paid-up capital, respectively.
- The Company's gearing ratio was 1.5 times and 0.3 times, respectively.
- The Company's capital ratio was 80.08% and 143.08% respectively.

Further analysis of the compliance of the above capital ratios is explained in Note 25.

23. Fair Value of Financial Instruments

The management of the Company considers that the carrying values of cash and cash equivalents, other receivables, trade payables, other payables and accrued liabilities approximate their fair values because of their short-term nature which are due within 12 months or they carry interest rate that approximate the market interest rate.

Refundable deposits are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, are carried at their nominal amounts less any impairment losses. It is not practical to estimate the fair value of refundable deposits because there are no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the statements of financial position date.

23. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar dari piutang pembiayaan, tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan murabahah yang dikenakan tingkat suku bunga tetap dan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan dinilai menggunakan diskonto arus kas menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

23. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The fair value of financing receivables, factoring receivables and murabahah financing receivables which bear fixed interest rate and will mature in more than 12 months are determined by discounting cash flows using effective interest rate method. Bank loans are measured at amortized cost using effective interest rate method, thus the carrying values of the liabilities approximate their fair values.

24. Tambahan Informasi Arus Kas

a. Aktivitas operasi non-kas yang signifikan

	2025	2024
Penyelesaian piutang pembiayaan melalui aset yang diambil alih - aset lain-lain	2.890.233.791	6.403.965.932

Settlement of financing receivables with foreclosed assets - other assets

b. Rekonsiliasi liabilitas neto dari aktivitas pendanaan

	1 Jan. 2025/ Jan 1, 2025	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows from financing activities	
		Penerimaan/ Proceeds	Pembayaran/ Repayment
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	1.324.317.325	-	(1.975.274.177)
Pinjaman bank/ Bank loans	134.991.722.902	805.500.000.000	(255.925.497.759)

	1 Jan. 2024/ Jan 1, 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows from financing activities	
		Penerimaan/ Proceeds	Pembayaran/ Repayment
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	708.680.684	-	(766.054.802)
Pinjaman bank/ Bank loans	3.000.000	140.000.000.000	(5.045.512.218)

24. Additional Cash Flows Information

a. Significant non-cash operating activity

b. Net liabilities reconciliation from financing activities

	31 Des. 2025/ Dec 31, 2025	Penambahan aset hak-guna/ Additions to right-of-use assets	Amortisasi biaya transaksi pinjaman/ Amortized loan transaction cost
	1.724.444.465	2.375.401.317	-
	687.288.220.872	-	2.721.995.729

25. Pengungkapan Rasio Keuangan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Pengungkapan Rasio Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa rasio keuangan. Rasio-rasio ini disusun oleh Perusahaan berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam POJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan.

25. Financial Ratio Disclosures in Accordance with the Regulation of Financial Services Authority (POJK)

Financial Ratio Disclosures

Based on the Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 regarding Operation of Financing Company Business, as lastly amended by POJK No. 46 Year 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as determined in POJK for regulatory compliance purposes.

25. Pengungkapan Rasio Keuangan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (lanjutan)

Pengungkapan Rasio Keuangan (lanjutan)

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan POJK:

	Ketentuan Peraturan OJK/ OJK's Regulation Requirement	2025	Hasil/ Results	2024	Hasil/ Results	
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset (FAR)	Minimum/ Minimum 40%	93,29%	Terpenuhi/ Meet	90,26%	Terpenuhi/ Meet	Financing to asset ratio (FAR)
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	Berdasarkan rencana bisnis/ Based on business plan	158,34%	Terpenuhi/ Meet	434,22%	Terpenuhi/ Meet	Net financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	Minimum/ Minimum 10%	90,75%	Terpenuhi/ Meet	91,16%	Terpenuhi/ Meet	Net financing receivables for investment and working capital financing to total financing receivables ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) - neto	Maksimal/ Maximum 5%	0%	Terpenuhi/ Meet	0%	Terpenuhi/ Meet	Net non-performing financing (NPF) ratio
Rasio permodalan	Minimum/ Minimum 10%	80,08%	Terpenuhi/ Meet	143,08%	Terpenuhi/ Meet	Capital ratio
Gearing ratio	0-10x	1,5x	Terpenuhi/ Meet	0,3x	Terpenuhi/ Meet	Gearing ratio
Minimum modal inti	Rp100.000.000.000	459.471.090.364	Terpenuhi/ Meet	440.339.652.356	Terpenuhi/ Meet	Minimum core capital
Rasio modal inti terhadap modal disetor (MSMD)	Minimum/ Minimum 50%	57,63%	Terpenuhi/ Meet	55,23%	Terpenuhi/ Meet	Core capital to paid-up capital ratio (MSMD)

Status Pengawasan, Hasil Pemeriksaan dan Sanksi dari OJK

Pada tanggal 18 Desember 2021, Perusahaan menerima Pemberitahuan Penetapan Status Pengawasan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 9/POJK.05/2021 (POJK 9/2021) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dimana berdasarkan salah satu kriteria parameter kuantitatif, Perusahaan memiliki nilai rasio piutang pembiayaan bermasalah neto (NPF Neto) pada bulan Oktober 2021 sebesar 27,85% yang melampaui batas maksimal 5% sebagaimana diatur dalam POJK 9/2021. Dengan demikian, Perusahaan ditetapkan sebagai Perusahaan dalam status pengawasan khusus oleh OJK.

25. Financial Ratio Disclosures in Accordance with the Regulation of Financial Services Authority (POJK) (continued)

Financial Ratio Disclosures (continued)

The following are the financial ratios based on POJK:

Supervision Status, Examination Results and Sanctions from OJK

On December 18, 2021, the Company received a Notification of Determination of Special Supervision Status from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulations (POJK) No. 9/POJK.05/2021 (POJK 9/2021) regarding Status Determination and Follow-Up Supervision of Non-Bank Financial Institution, whereby, based on one of the quantitative parameter criteria, the Company has a net non-performing financing receivables (Net NPF) in October 2021 of 27.85% which exceeded the maximum limit of 5% as regulated in POJK 9/2021. Thus, the Company is designated as a Company under special supervision status by OJK.

25. Pengungkapan Rasio Keuangan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lanjutan)

Status Pengawasan, Hasil Pemeriksaan dan Sanksi dari OJK (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022 dan 9 November 2023, Perusahaan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) dari OJK. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang cukup mengenai kondisi tingkat kesehatan pada risiko kredit dan risiko operasional, serta menilai penerapan aspek tata kelola dan aspek permodalan, serta kepatuhan Perusahaan terhadap POJK di bidang Perusahaan Pembiayaan. Sehubungan dengan LHPL dari OJK, selama tahun 2022 dan 2023, Perusahaan juga menerima beberapa surat dari OJK terkait surat pemberitahuan, surat perbaikan rencana pemenuhan, surat peringatan tertulis, surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Menindaklanjuti LHPL tersebut, manajemen telah beberapa kali menyampaikan pemenuhan LHPL tersebut kepada OJK dan manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan akan dapat segera memenuhi hasil pemeriksaan OJK tersebut. Pada tanggal 9 Juli 2024, Perusahaan menerima surat tanggapan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan langsung tahun 2023, yang menyatakan Perusahaan telah melaksanakan seluruh rekomendasi yang ditetapkan dalam LHPL.

Pada tanggal 18 Januari 2024, status pengawasan khusus Perusahaan berubah menjadi status pengawasan intensif dan pada tanggal 31 Juli 2024, OJK memperpanjang jangka waktu status pengawasan intensif tersebut selama 6 bulan sejak surat ini ditetapkan, hingga penetapan dan/atau tindakan pengawasan selanjutnya. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Perusahaan juga menerima surat peringatan tertulis dari OJK karena Perusahaan belum melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK. Selama bulan Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025, Perusahaan telah beberapa kali menyampaikan rencana tindak lanjut atas status pengawasan intensif kepada OJK dan OJK telah memberikan tanggapannya, sehingga pada tanggal 12 Februari 2025, OJK melalui suratnya mengubah status pengawasan intensif Perusahaan menjadi status pengawasan normal dan mencabut sanksi peringatan tertulis diatas.

25. Financial Ratio Disclosures in Accordance with the Regulation of Financial Services Authority (OJK) (continued)

Supervision Status, Examination Results and Sanctions from OJK (continued)

On September 30, 2022 and November 9, 2023, the Company received Examination Result Report (LHPL) from OJK. The examination is carried out to obtain sufficient confidence regarding the soundness level of credit risk and operational risk, as well as assessing the implementation of corporate governance aspects and capital aspects, and compliance with POJK in the financing company sector. In connection with the LHPL from OJK, during years 2022 and 2023 the Company also received several letters from OJK regarding notification letters, letters of improvement of fulfillment plans, written warning letters, first warning letters and second warning letters. Responding to those LHPLs, the management has several times submitted fulfillment of the LHPL to OJK and management believes that the Company will be able to fulfill the OJK's examination result. On July 9, 2024, the Company received a response letter regarding the implementation of the follow-up to the recommendations of examination for the year 2023, which stated that the Company had implemented all recommendations set out in the LHPL.

On January 18, 2024, the Company's supervision status was changed to intensive supervision status and on July 31, 2024, OJK extended the fulfillment time for the intensive supervision status for 6 months from the date of this letter, until the determination and/or further supervisory actions. On August 9, 2024, the company also received a written warning letter from OJK because the Company has not implemented the supervisory actions requested by OJK. During August 2024 up to January 2025, the Company has submitted several action plans for the intensive supervision status to OJK and OJK has gave responses, hence, on February 12, 2025, OJK through its letter changed the Company's supervision status from intensive to normal and revoked the above written warning sanction.

26. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang diaktakan dalam Akta Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., No. 2 tanggal 7 Januari 2026, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Modal Kerja (*Non-Revolving*) dari Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp75.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung tambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat atau sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 48 bulan dikenakan bunga berkisar 7,50% - 7,75% per tahun sesuai dengan masing-masing tenor angsuran.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, No. 2 tanggal 2 Maret 2026, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Modal Kerja - *Installment 4 Non-Revolving* dari Oke Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini untuk mendukung modal kerja pada pembiayaan *fleet*. Jangka waktu fasilitas kredit selama 48 bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan dan dikenakan bunga sebesar 7% per tahun.

26. Events After the Reporting Period

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Based on the Addendum to Working Capital Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 2 of Siti Rohmah Caryana, S.H., dated January 7, 2026, the Company obtained an additional credit facility in the form of a Non-Revolving Working Capital Facility from Mandiri with a credit limit of Rp75,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support additional working capital for the financing of motor vehicles and heavy equipment or in accordance with the Company's business activities. The term of the credit facility is 48 months, bearing interest at rates ranging from 7.50% to 7.75% per annum, depending on the respective installment tenors.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank)

Based on Credit Agreement which was legalized by Notarial Deed No. 2 of Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, dated March 2, 2026, the Company obtained credit facility in the form of Working Capital Loan - *Installment 4 Non-Revolving* from Oke Bank with principal amount of Rp100,000,000,000. The purpose of this credit facility is to support working capital for fleet financing. The term of the credit facility is 48 months from the date of each drawdown and bears interest rate at 7% per annum.